

STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN BUDIDAYA RUMPUT LAUT DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PESISIR

(Studi Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh ujian sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**MUHAMMAD FAJRUL ISLAM PRANATALLAH
115030101111088**



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2016

MOTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**“Barangsiapa yang menghendaki kebaikan di dunia maka dengan ilmu. Barangsiapa yang menghendaki kebaikan di akhirat maka dengan ilmu. Barangsiapa yang menghendaki keduanya maka dengan ilmu”
(HR. Bukhori dan Muslim)**



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Strategi Pengembangan Kawasan Minapolitan Budidaya
Rumput Laut Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan
Masyarakat Pesisir

Disusun Oleh : Muhammmad Fajrul Islam Pranatallah

NIM : 115030101111088

Fakultas : Ilmu Administrasi

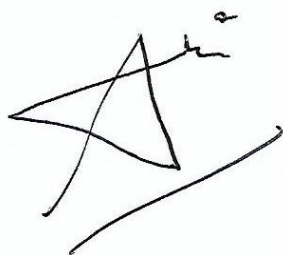
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Malang, 24 Juni 2016

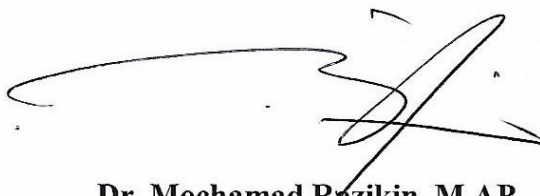
Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota



Dr. Alfi Haris Wanto, M.AP. MMG
NIP. 19810601 200501 1 005



Dr. Mochamad Rozikin, M.AP
NIP. 19630503 198802 1 001

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Barawijaya, pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 4 Agustus 2016
Jam : 10.00 WIB
Skripsi atas nama : Muhammad Fajrul Islam Pranatallah
Judul : Strategi Pengembangan Kawasan Minapolitan Budidaya Rumput laut dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir (studi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat)

Malang, 4 agustus 2016

DINYATAKAN LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua



Dr. Alfi Haris Wanto, M.AP. MMG
NIP. 19810601 200501 1 005

Anggota



Dr. Mochamad Rozikin, M.AP
NIP. 19630503 198802 1 001

Anggota



Dr. Hermawan, S.IP, M.Si
NIP. 19720405 200312 1 001

Anggota



Drs. Abdul Wachid, M.AP
NIP. 19561209 198703 1 008

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan Sebenar-benarya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya proleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 21 Juli 2016

Mahasiswa



NAMA : M. Fajrul Islam Pranatallah

NIM : 115030101111088

RINGKASAN

M. Fajrul Islam Pranatallah, 2016, **Strategi Pengembangan Kawasan Minapolitan Budidaya Rumput Laut Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir**, (Studi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat) Dr. Alfi Hariswanto, M.AP. MMG, Dr. Mochamand Rozikin, M.AP, 211 hal + xvii

Pengembangan kawasan minapolitan budidaya rumput laut di Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan berdasarkan oleh Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP. 32/MEN/2010 dan ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Nomor 1471/XI/Dislutkan/2010 yang menetapkan pengembangan kawasan minapolitan pada lima Desa di Kecamatan Sekotong, yaitu : Desa Candi Manik, Desa Buwun Mas, Desa Sekotong Barat, Desa Batu Putih, Desa Pelangan. Penetapan ke lima desa di Kecamatan sekotong tersebut ditujukan untuk pengembangan kawasan budidaya rumput laut.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dibatasi pada fokus penelitian, yaitu a) Strategi pengembangan kawasan minapolitan budidaya rumput laut di Kabupaten Lombok Barat, dan b) Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program pengembangan kawasan minapolitan budidaya rumput laut. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengmpulan data yang digunakan adalah : observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif melalui tahap pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, selain itu penggunaan metode analisis SWOT untuk menemukan faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pengembangan kawasan minapolitan budidaya rumput laut di Kabupaten Lombok Barat.

Hasil penelitian yang dilakukan didapati beberapa strategi yang digunakan dalam proses pengembangan kawasan minapolitan budidaya rumput laut di Kabupaten Lombok Barat, strategi itu antara lain yaitu a) perluasan areal budidaya b) peningkatan jumlah pembudidaya c) pengembangan Teknologi budidaya d) Penguatan permodalan. Ke empat strategi tersebut telah terlaksana di 2 lokasi yaitu Desa Buwun Mas, dan Desa Candi Manik namun masih belum maksimal, hal ini didapat dari pelaksanaan di lapangan yang sesuai dengan informasi yang didapat. untuk itu peneliti menggunakan analisis SWOT untuk mendapatkan rekomendasi perbaikan dari beberapa aspek penghambat yang dapat berpengaruh dalam pelaksanaan strategi pengembangan kawasan minapolitan yang kemudian dikembangkan untuk menjadi rekomendasi perbaikan ke dapannya. Sehingga peneliti merekomendasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat untuk lebih memberikan perhatian kepada para pembudidaya dalam hal pemberian bantuan dan pelatihan muali dari proses budidaya hingga proses pemasaran kepada para konsumen agar dapat memperbaiki kualitas rumput laut yang dijual sehingga mampu meningkatkan keuntungan bagi para pembudidaya rumput laut.

Kata kunci : minapolitan, Strategi, pengembangan

SUMMARY

M. Fajrul Islam Pranatallah, 2016, **The Strategy Of Developing Minapolitan Seaweed Cultivation Region to Improve the Welfare of Coastal Communities**, (Study on the Department of Marine and Fisheries in West Lombok District) Alfi Hariswanto, Dr., M.AP. MMG, Mochamand Rozikin, Dr., M.AP, 211 hal + xvii

The Developing Of Minapolitan seaweed farming in West Lombok district implemented by the Decree of the Minister of Marine and Fisheries No. KEP. 32 / MEN / 2010 and followed up with the release of the Regent Decree No. 1471 / XI / Dislutkan / 2010 which set the developing of Minapolitan in five villages in the District Sekotong, namely: the village of Candi Manik, Buwun Mas Village, Sekotong Barat Village, Batu Putih Village, Pelangan Village. Determination of the five villages in the district of Sekotong is aimed to developing of seaweed farming.

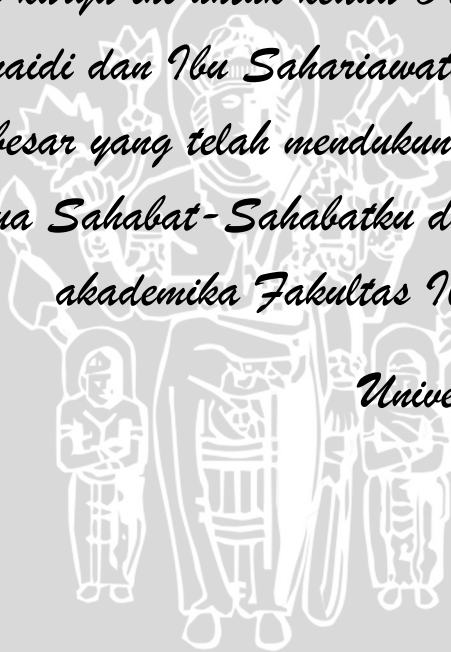
This research is qualitative descriptive study the limited to the focus of research, a) The strategy of developing Minapolitan seaweed farming in West Lombok regency, and b) the factors that affect the implementation of developing programs of Minapolitan seaweed cultivation. , The data used consist of primary data and secondary data. Data collection techniques used are: observation, interviews, and documentation. While the analysis of the data used is descriptive analysis through data collection phase, condensation, data presentation and conclusion, otherwise the SWOT analysis method is used to find supporting factors and obstacles in the implementation of development policies of Minapolitan seaweed farming in West Lombok regency.

The results of research conducted found some of the strategies used in the development process of Minapolitan seaweed farming in West Lombok district, a strategy that: a) expansion the area of cultivation b) increase in the number of farmers c) development of cultivation technology d) Strengthening the capital. All four of these strategies have been implemented in two locations: Buwun Mas village, and Candi Manik Village but still not maximal, that case this derived from the implementation on the ground that according to the information obtained. the researchers used a SWOT analysis to get recommendations for improving of some aspects of inhibitors that may affect the implementation of developing strategy of the Minapolitan which later developed to be a recommendation to improve Minapolitan region. So the researchers recommend Marine and Fisheries Agency of West Lombok regency to give more attention to the farmers in terms of providing support and training from the cultivation process to the process of marketing to the consumers in order to improve the quality of seaweed that are sold so as to increase profits for the growers of seaweed.

Keywords: minapolitan, strategy, development

LEMBAR PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan karya ini untuk kedua Orang Tua tercinta
Bapak Junaidi dan Ibu Sahariawati, Saudara serta
Keluarga besar yang telah mendukung dan mendoakan
selama ini. Semua Sahabat-Sahabatku dan seluruh civitas
akademika Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya*



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, dan juga Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, serta pengikutnya hingga akhir kiamat kelak.

Penyusunan Laporan skripsi ini mengambil judul “Strategi Pengembangan Kawasan Minapolitan Budidaya Rumput Laut Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir” yang menjadi persyaratan untuk menempuh program sarjana (S-1) dalam program Ilmu administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Selama proses penyusunan skripsi ini, peneliti memperoleh banyak dukungan dan doa dari berbagai pihak. Untuk itu peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si., selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
4. Dr. Alfi Haris Wanto, M.AP. MMG. selaku Ketua Komisi pembimbing, terimakasih telah bersedia membimbing peneliti dan memberikan saran yang membangun dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.

5. Dr. Bapak Mochamad Rozikin, M.AP selaku anggota komisi pembimbing Terimakasih telah memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat bagi keterlaksananya penelitian ini.
6. Dr. Hermawan S.IP, M.SI sebagai dosen penguji skripsi yang telah memberikan pengalaman, nasihat dan ilmu yang bermanfaat bagi tersusunnya skripsi ini.
7. Drs. Abdul Wachid, M.AP sebagai dosen penguji skripsi yang telah memberikan ilmu dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Administrasi, khususnya dosen Jurusan Ilmu Administrasi Publik yang selama ini telah memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat selama proses pembelajaran di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
9. Segenap jajaran Pejabat dan Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat yang telah bersedia menerima dengan baik penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan banyak Informasi yang berguna bagi penyusunan skripsi ini.
10. Masyarakat Desa Buwun Mas dan Candi Manik yang bersedia memberikan informasi bagi peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
11. Teman-Teman Alumni SMA 5 Mataram : Thorik, Januar, Faris, Fahrozi, Bayu, Rian. Terimakasih masih bisa mempererat tali silaturahmi antar alumni SMALA di Kota malang.
12. Sahabat-sahabat seperjuangan, Arief, Fitroh, Ikbal, Dedi, Zuhri, Langgeng, Irfean, Tio, Nurul, Lutfia, Titin, Siska, Fini, Hita, Diah, yang selalu

kompak memberikan semangat, doa, dan kebersamaan yang berkesan kepada penulis

13. Saudara-Saudari Kabinet “pejuang Kebaikan” LOF FORKIM 2014 :
Arief, arifin, Esa, Nugroho, Azhar, Anas, Ikhwan, Ricard, Lutfia, Mayang,
Dian April, Iin, Ida, Kartika, Rizka, Yunita, Inggit, dna, Hesti. Yang
memberikan banyak pengalaman dan kenangan berkesan bagi peneliti.
14. Para penghuni Kontrakan NATO CORP. Season 3 dan 4 yang terus
kompak berkarya dan memberikan kenangan selama penulis tinggal.
15. Teman-teman FIA Publik angkatan 2011 yang memberikan dukungan dan
semangat kepada peneliti.
16. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi
ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 4 Agustus 2016

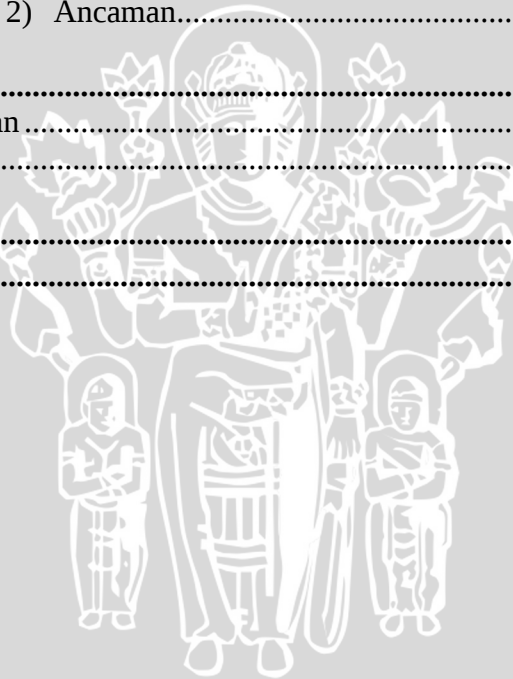
Muhammad Fajrul Islam Pranatallah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
MOTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
LEMBAR PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Kontribusi Penelitian	15
E. Sistematikan Pembahasan	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
A. Pembangunan dalam Administrasi	17
1. Administrasi Publik	17
2. Ruang lingkup Adminsitasi Publik	18
3. Administrasi Pembangunan	20
B. Pembangunan Masyarakat Pesisir	23
1. Masyarakat Pesisir	24
2. Pemberdayaan Masyarakat	30
3. Pengelolaan Perikanan	32
4. Pasca Panen dan Pemasaran	37
C. Kebijakan Kawasan Minapolitan	38
1. Dasar Kawasan Minapolitan	39
2. Pengertian Minapolitan	40
3. Tujuan Minapolitan	41
4. Syarat Penetapan Kawasan Minapolitan	42
5. Revolusi Biru	43
D. Strategi	45
1. Pengertian Strategi	45
2. Syarat Strategi	49
3. Manfaat Strategi	49

BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Jenis Penelitian	53
B. Fokus Penelitian.....	54
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	56
D. Sumber Data	57
E. Teknik Pengumpulan Data.....	58
F. Instrumen Penelitian	59
G. Analisis Data.....	60
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 64
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	64
1. Gambaran Umum Kabupaten Lombok Barat	64
a. Kondisi Geografis	64
b. Topografi.....	65
c. Lambang Daerah	67
d. Visi dan Misi.....	69
e. Kondisi Ekonomi	70
B. Gambaran Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat.....	72
1. Tugas Pokok dan Fungsi.....	72
2. Struktur Organisasi	73
3. Visi dan Misi.....	76
4. Tujuan dan Sasaran.....	78
5. Program Kerja	80
6. Sumber Daya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat.....	81
C. Penyajian Data Fokus Penelitian	83
1. Strategi Pengembangan Kawasan Minapolitan Budidaya Rumput Laut Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir	83
a. Perluasan Areal Budidaya	83
b. Peningkatan Jumlah Pembudidaya.....	97
c. Pengembangan Teknologi Budidaya.....	108
d. Penguatan Permodalan	116
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi Pengembangan Kawasan Minapolitan Budidaya Rumput Laut di Kabupaten Lombok Barat	134
a. Faktor pendukung (Analisis Lingkungan Internal)	134
1) Kekuatan.....	134
2) Peluang.....	138
b. Faktor penghambat (Analisis Lingkungan Eksternal)	142
1) Kelemahan.....	142
2) Ancaman.....	147
D. Analisis Data	152

1. Strategi Pengembangan Kawasan Minapolitan Budidaya Rumput Laut Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir	152
a. Perluasan Areal budidaya	152
b. Peningkatan Jumlah Pembudidaya	159
c. Pengembangan Teknologi Budidaya	167
d. Penguatan Permodalan	173
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi Pengembangan Kawasan Minapolitan Budidaya Rumput laut di Kabupaten Lombok Barat	179
a. Analisis Lingkungan Internal	179
1) Kekuatan	180
2) Kelemahan	182
b. Analisis Lingkungan Eksternal	184
1) Peluang	185
2) Ancaman	188
BAB V PENUTUP	200
A. Kesimpulan	200
B. Saran	202
DAFTAR PUSTAKA	206
LAMPIRAN	211



DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
Tabel 1.	Potensi Perikanan Budidaya Laut Nusa Tenggara Barat	4
Tabel 2.	Banyaknya Kecamatan Pesisir dan Desa/Kelurahan Pesisir Menurut Kabupaten / Kota tahun 2010.....	8
Tabel 3.	Jumlah Penduduk, KK Miskin pada Wilayah Desa Pesisir di Pulau Lombok.....	9
Tabel 4.	Pemanfaatan daerah perikanan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2009-2012	10
Tabel 5.	Matriks SWOT	48
Tabel 6.	Luas Kabupaten Lombok Barat Menurut Kecamatan.....	65
Tabel 7.	Jumlah Sungai yang ada di Kabupaten Lombok Barat	66
Tabel 8.	Perkembangan PDRB Kabupaten Lombok Barat Menurut Pengeluaran Tahun 2010-2014 (Juta Rupiah).....	71
Tabel 9.	Jumlah Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat Berdasarkan Pendidikan.....	82
Tabel 10.	Sarana dan Prasarana Pokok Dinas Perikanan Kabupaten Lombok Barat.....	82
Tabel 11.	Daerah Potensi Pengembangan Minapolitan Budidaya Rumput Laut Kabupaten Lombok Barat	91
Tabel 12.	Luas Areal Budidaya Laut dari tahun 2010 sampai 2014.....	93
Tabel 13.	Kondisi Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat	100
Tabel 14.	Sebaran Lokasi dan Tingkat Produksi Rumput Laut di Kabupaten Lombok Barat tahun 2013.....	102
Tabel 15.	Sebaran Lokasi dan Jumlah Penduduk yang Bekerja dalam Kegiatan Budidaya Rumput Laut di Kabupaten Lombok Barat tahun 2014.....	104
Tabel 16.	Rincian Lokasi dan Kelompok Penerima Manfaat Kegiatan Pengembangan Produk Unggulan Kabupaten Komoditas Rumput Laut Di Kabupaten Lombok Barat tahun 2014.....	107

Tabel 17. Realisasi Anggaran Bantuan tahun 2012-2014.....	119
Tabel 18. Struktur Organisasi Kelompok Kerja Desa (VWG)	123
Tabel 19. Usaha Perikanan Budidaya	126
Tabel 20. Usaha Pengolahan Ikan	127
Tabel 21. Usaha Pemasaran/Pasca Panen	128
Tabel 22. Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh kelompok pengelola sumberdaya	129
Tabel 23. Kegiatan yang Telah Dilaksanakan Oleh Kelompok Infrastruktur	131
Tabel 24. Kelompok Masyarakat yang Menabung dan Jumlah Tabungan.....	133
Tabel 25. Perkembangan Pemanfaatan Lahan Pembudidayaan Rumput laut di Kabupaten Lombok Barat.....	155
Tabel 26. Perkembangan Pembudidaya Rumput Laut di Kabupaten Lombok Barat	162
Tabel 27. Nama Kelompok Pembudidaya Berdasarkan Daerah Pembudidayaan	163
Tabel 28. Realisasi Penyaluran Anggaran Bantuan tahun 2012-2014.....	174
Tabel 29. Hasil Penilaian Kinerja Kelompok dalam Program CCDP-IFAD pada Desa Buwun Mas tahun 2014	177
Tabel 30. Daftar perusahaan pengolahan dan pemasaran rumput laut di Kabupaten Lombok Barat	178
Tabel 31. Matriks SWOT pengembangan kawasan Minapolitan Budidaya Rumput laut	198

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
Gambar 1.	Komponen dalam analisis data (<i>inetraktif model</i>)	61
Gambar 2.	Peta Wilayah Administratif Kabupaten Lombok Barat	64
Gambar 3.	Keadaan suhu udara dirincikan tiap bulan di Kabupaten Lombok Barat	67
Gambar 4.	Lambang Daerah Kabupaten Lombok Barat.....	67
Gambar 5.	Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat	75
Gambar 6.	Pembagian Kawasan Pengembangan Perikanan Budidaya.....	85
Gambar 7.	Peta Kawasan Pengembangan Potensi laut Kabupaten Lombok Barat	88
Gambar 8.	Peta Perencanaan Perluasan Kawasan Budidaya Laut di Kabupaten Lombok Barat	95
Gambar 9.	Alat penjemur rumput laut	113
Gambar 10.	Bantuan alat pembudidayaan rumput laut.....	113
Gambar 11.	Kebun Budidaya rumput laut	113
Gambar 12.	Pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan budidaya rumput laut.....	113
Gambar 13.	Pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan budidaya rumput laut.....	113
Gambar 14.	Proses Panen Rumput laut <i>Cottonii</i> Jumbo	115
Gambar 15.	Kebun Pembudidayaan Rumput laut <i>Cottonii</i> Jumbo	115
Gambar 16.	Pemberian bantuan bibit rumput laut <i>Cottonii</i> Jumbo Kepada para pembudidaya rumput laut	116
Gambar 17.	Kawasan Pengembangan Komoditas Unggul Rumput Laut di Kabupaten Lombok Barat T.A 2014.....	157
Gambar 18.	Pemberian materi pengembangan kapasitas para pembudidaya rumput laut	171
Gambar 19.	Masyarakat yang mengikuti pelatihan pengembangan kapasitas pembudidayaan rumput laut	171

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, sesuai dilansir oleh Badan Informasi Geografis di web (BIG.2014) dimana pulau di Indonesia berjumlah 13.466 yang mencakup pulau kecil dan pulau besar, luas wilayah Indonesia mencapai panjang 5.200 km dan lebar mencapai 1.870 km (bakosurtanal.go.id). Selain itu Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas, Indonesia memang memiliki banyak pulau hal ini disebabkan karena luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta km², hal ini mengakibatkan pulau-pulau yang ada di Indonesia menjadi terpisah dan membentuk banyak pulau. Namun hal itu tidak menjadi persoalan karena perairan Indonesia yang begitu luas memiliki keseimbangan dengan kekayaan hasil laut Negara Indonesia baik seperti keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya.

Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Berdasarkan UUD 1945 tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa masyarakat berhak untuk menikmati kekayaan alam yang ada demi kemakmuran masyarakat itu sendiri. Kekayaan alam khususnya kekayaan perikanan yang dimiliki Indonesia akan membawa dampak yang positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun keadaan tersebut

berbanding terbalik dengan kenyataannya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dari hasil PPLS Tahun 2011, saat ini jumlah desa pesisir mencapai 10.640 desa yang merupakan desa miskin. Selanjutnya dari penduduk miskin sebanyak 31,02 juta orang, sebesar 25,14% atau 7,87 juta orang adalah penduduk miskin di pesisir. Sementara Rumah Tangga Sasaran (RTS) di pesisir mencapai 2,13 juta yang terdiri dari sangat miskin, miskin, dan hampir miskin (knp.go.id). Tidak heran pemanfaatan sumber daya kelautan yang ada masih belum memberikan kemakmuran bagi masyarakat Indonesia, dengan jumlah desa pesisir miskin dan masyarakat pesisir berada digaris kemiskinan membuat banyaknya nelayan/pembudidaya Tradisional yang masih menggunakan teknologi tradisional membuat perkembangan perikanan Indonesia menjadi sulit untuk berkembang, hal ini disebabkan karena rata-rata perekonomian Masyarakat Indonesia masih rendah.

Potensi Negara Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan laut yang begitu melimpah namun belum maksimal dimanfaatkan, membuat pemerintah untuk lebih memaksimalkan memanfaatkan kekayaan laut Indonesia. pemaksimalan kekayaan laut, pemerintah pusat mengeluarkan program Minapolitan sebagai upaya pemanfaatan hasil laut Negara Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertindak dibawah pemerintah pusat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan. Minapolitan merupakan konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan

percepatan. Terbentuknya konsep Minapolitan didasari oleh ketidak seimbangan pembangunan pada wilayah perkotaan dan pedesaan yang terlihat dari banyaknya urbanisasi yang terjadi yang diakibatkan masyarakat pedesaan lebih memilih hidup di wilayah perkotaan dari pada di wilayah pedesaan, hal ini mengakibatkan wilayah desa menjadi terbelakang karena kegiatan ekonomi yang tidak bisa berkembang. Dalam mengatasi permasalahan tersebut munculah konsep baru yaitu agropolitan yang merupakan konsep pengembangan ekonomi disektor pertanian agar urbanisasi dapat dikurangi, perkembangan konsep agropolitan tersebut kemudian diadaptasi pada daerah pesisir yang kemudian diberi nama Minapolitan yang merupakan konsep perkembangan ekonomi yang berfokus pada sektor perikanan.

Program Minapolitan yang telah disahkan memiliki 2 (dua) konsentrasi pengembangan antara lain yaitu perkembangan kelautan dan perikanan yang berbasis perikanan budidaya dan tangkap. Hal ini dimaksudkan agar mudah untuk memberikan pemetaan perikanan dan kelautan secara strategis. Salah satu konsentrasi program Minapolitan yaitu pada sektor budidaya menjadi perhatian belakangan ini, hal ini dikarenakan kurang lebih 24 juta Hektar perairan laut dangkal Indonesia cocok untuk usaha budidaya laut dengan potensi produksi sekitar 47 juta ton/tahun. Kawasan pesisir yang sesuai untuk usaha budidaya rumput laut diperkirakan lebih dari 1 juta Hektar dengan potensi produksi sekitar 4 juta ton/tahun. Upaya perluasan yang merupakan usaha dalam bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan memaksimalan pemanfaatan disektor pembudidayaan di Indonesia merupakan usaha yang perlu dikembangkan karena

sektor budidaya merupakan sektor yang paling menjanjikan untuk dikelola dengan baik supaya dapat meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir.

Sektor budidaya yang belakangan ini menjadi perhatian yaitu pada sektor pembudidayaan rumput laut, hal ini dikarenakan rumput laut sangat diminati konsumen untuk diolah menjadi berbagai macam produk kosmetik, makanan, dan minuman. Untuk itu pemerintah pusat memanfaatkan peluang tersebut untuk mengembangkan budidaya rumput laut di Indonesia. Pembudidayaan rumput laut yang dimiliki Indonesia salah satunya terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat dimana kegiatan pengembangannya telah dilakukan. Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu penghasil rumput laut di Indonesia patut diperhitungkan, karena Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki potensi yang cukup menjanjikan dalam perkembangan usaha rumput laut. Luas perairan yang dimiliki Provinsi Nusa Tenggara Barat 29.159,04 Km² dan banyaknya perairan dangkal yang berbentuk teluk cocok dijadikan tempat pembudidayaan Rumput laut, Potensi pembudidayaan tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Potensi Perikanan Budidaya Laut Nusa Tenggara Barat

Komoditas	Potensi Area (ha)	Pemanfaatan (ha)
Rumput Laut	25.206,00	12,2
Mutiara	18.105,50	13.771,77
Kerapu	3,699,62	1,03
Lobster	4.183,90	12,11
Total	51.195,02	13.797,11

Sumber : Gema Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2013

Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa potensi perikanan budidaya di Provinsi Nusa Tenggara Barat mencapai 51. 195,02 Ha yang didapat dari

pembudidayaan mutiara sebesar 18.105,50 hektar, budidaya rumput laut sebesar 25.206,00 Ha, budidaya kerapu sebesar 3,699,62 Ha, budidaya lobster 4.183,90 Ha, namun dari jumlah potensi perikanan budidaya yang dimiliki Provinsi Nusa Tenggara Barat masih perlu dikembangkan lagi, karena dari semua potensi perikanan budidaya yang ada pemanfaatannya masih belum maksimal. Pemanfaatan potensi perikanan budidaya yang masih kurang tersebut diharapkan dari tahun ketahun dapat berkembang pemanfaatannya.

“potensi produksi dari area budidaya laut yang ada cukup besar mencapai 185.518 ton sementara potensi lestari yang ada sebesar 129.863 ton. Namun demikian, dari besarnya potensi tersebut, pemanfaatan area masih belum optimal yakni 73,26% atau ekuivalen dengan produksi 95.148 ton. Di sisi lain, potensi tambak di Nusa Tenggara Barat pun masih jauh dari optimal pengembangannya. Dari sekitar 25.100 ha potensi tambak baru sekitar 28% yang dimanfaatkan. Oleh karena itu produksi perikanan Nusa Tenggara Barat masih dapat ditingkatkan secara signifikan” (Gema Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat 2013:117)

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih belum optimal, hal ini dapat dilihat bahwa potensi yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang besar tersebut belum sebanding dengan pemanfaatan potensi perikanan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Belum optimalnya pemanfaatan tersebut haruslah menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah khususnya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mengelola potensi tersebut. Permasalahan tersebut dapat terbantu dengan adanya program Minapolitan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, hal ini yang membuat pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat secara serius mengoptimalkan potensi perikanan yang ada di daerah.

Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi yang menyambut baik dengan adanya program Minapolitan. Hal ini dikarenakan provinsi Nusa Tenggara Barat juga memiliki program unggulan yang serupa dengan tujuan program Minapolitan. Program unggulan Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut bernama PIJAR, program PIJAR merupakan pengembangan program Pemerintah RI yang dikenal dengan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) program tersebut dirancang sebagai sektor andalan dalam pembangunan ekonomi, serta penekanan kembali arti pentingnya sektor pertanian dalam rangka ketahanan pangan, mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan daya saing ekonomi nasional. Menindak lanjuti program tersebut dan melihat potensi yang ada Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan pengembangan 3 (tiga) komoditas unggulan yaitu : sapi, jagung, dan rumput laut yang disingkat menjadi PIJAR. Program PIJAR tersebut diresmikan pada tahun 2009, tidak heran provinsi Nusa Tenggara Barat menyambut baik dengan adanya program Minapolitan ini karena dengan adanya program tersebut menjadi pendorong Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk lebih serius mengembangkan subsektor budidaya rumput laut yang menjadi salah satu sektor dalam program Minapolitan.

Pengembangan subsektor budidaya dalam program Minapolitan memberikan peluang besar bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat mengingat bahwa untuk mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Barat yang Beriman, Berbudaya, Berdaya Saing dan Sejahtera merupakan visi yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Nusa Tenggara Barat tahun 2013-2018. Strategi pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah

ditetapkan melalui program pembangunan yang difokuskan pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang saling bersinergi antar sektor. Sektor-sektor tersebut adalah: Pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, peternakan, pariwisata, Infrastruktur dan lingkungan hidup. Pada sektor pertanian dan perikanan telah ditetapkan program unggulan yaitu sapi, jagung, dan rumput laut (PIJAR), dimaksudkan agar tujuan Nusa Tenggara Barat bersaing tahun 2018 dengan Percepatan, Inovasi, dan Nilai tambah (PIN) dapat terwujud, dengan target meningkatkan kualitas IPN. Berkembangnya kemitraan antara pemerintah, swasta dan Masyarakat, terkelolanya potensi sumberdaya alam secara berkelanjutan serta berkurangnya persentase penduduk miskin.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berkomitmen dalam program pengentasan kemiskinan pada masyarakat pesisir sebesar 2% / tahun di seluruh Provinsi Nusa Tenggara Barat. Program Minapolitan yang dipadukan dengan program PIJAR merupakan salah satu upaya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mengatasi angka kemiskinan di daerah pesisir. Program tersebut difokuskan pada program pengembangan budidaya rumput laut yang tersebar di 10 kawasan Minapolitan Provinsi Nusa Tenggara Barat, kawasan tersebut telah disahkan oleh program Minapolitan sebagai daerah budidaya rumput laut yang telah ditetapkan melalui pengembangan 10 (sepuluh) kawasan budidaya rumput laut yang tersebar di 7 (tujuh) kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Barat yaitu : untuk pulau Lombok ; Kabupaten Lombok Barat (Pengentap dan Sekotong), Kabupaten Lombok Timur (Grupuk dan Mertak), Kabupaten Lombok Tengah

(Serewe dan Ekas) dan untuk Sumbawa ; Sumbawa (Mapin dan Tarano), Dompu (Kwangko), Bima (Waworada) Serta Sumbawa barat (Kertasari).

Data yang dikeluarkan oleh Dinas kelautan dan perikanan tahun 2010 menyebutkan bahwa penduduk miskin di wilayah Nusa Tenggara Barat sebanyak 1.082.815 orang, dan sebanyak 465.330 orang (43,06%) yang berdomisili sebagai penduduk wilayah pesisir yang tersebar di 68 kecamatan dan 252 desa pesisir seperti pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Banyaknya Kecamatan Pesisir dan Desa/Kelurahan Pesisir Menurut Kabupaten / Kota tahun 2010

NO	Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Jumlah Kec. Pesisir	Desa/Kelurahan Pesisir
1	Lombok Barat	10	14
2	Lombok Tengah	4	11
3	Lombok Timur	6	22
4	Sumbawa	16	62
5	Dompu	8	24
6	Bima	12	63
NO	Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Jumlah Kec. Pesisir	Desa/Kelurahan Pesisir
7	Sumbawa Barat	4	19
8	Lombok Utara	-	22
9	Kota Mataram	2	9
10	Kota Bima	2	6
	Jumlah	68	252

Sumber : evaluasi Pelaksanaan Program Minapolitan, 2010

Berdasarkan tabel 2 jumlah desa pesisir yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat berjumlah 252 Desa, dari jumlah desa pesisir tersebut dapat disimpulkan potensi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memanfaatkan kekayaan sumber daya kelautan yang di miliki cukup besar. Banyaknya jumlah desa pesisir tersebut mamunculkan sebuah persoalan yang harus di selesaikan oleh pemerintah daerah

Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu personal tingkat kemiskinan masyarakat di daerah pesisir. Masalah kemiskinan di daerah pesisir tidak lepas dari persoalan kurang maksimalnya pemanfaatan sumberdaya kelautan yang di kelola oleh masyarakat pesisir di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kondisi kemiskinan wilayah pesisir di Provinsi Nusa Tenggara Barat sangatlah kompleks dan pemecahannya tidaklah mudah. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kemiskinan daerah pada Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dipublikasikan pada tabel 3, evaluasi program Minapolitan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut :

Tabel 3. Jumlah Penduduk, KK Miskin pada Wilayah Desa Pesisir di Pulau Lombok

Kab/Kota	Luas wilayah (Ha)	Jumlah Penduduk			Jumlah KK Miskin	Jumlah Penduduk Pesisir Miskin
		Total	Laki-laki	Wanita		
Kota Mataram	42,39	66.187	32.069	34.118	4.997	18.796
Lombok Barat	404,63	110.809	52.347	58.462	22.346	65.110
Lombok Utara	597, 46	158.674	75.266	83.408	23.116	77.518
Lombok Tengah	170, 88	58.719	27.498	31.221	10.832	26.282
Lombok Timur	533, 93	215.891	94.163	121.728	33.152	96.814
Jumlah	1.749,29	601.280	281.343	328.937	94.443	284.520

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2010

Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa jumlah penduduk miskin wilayah pesisir di Pulau Lombok sebesar 284,520 orang terdiri dari 94.443 KK yang tersebar di 22 kecamatan dan 78 buah desa pantai. Keseluruhan jumlah penduduk miskin menunjukan tingkat kemiskinan masih relatif tinggi yang menjadikan pemanfaatan sumber daya kelautan di Pulau Lombok belum termanfaatkan secara maksimal. Masyarakat pesisir di Pulau Lombok masih hidup

dalam garis kemiskinan, hal ini yang membuat provinsi Nusa Tenggara Barat harus serius dalam mengatasi permasalahan ini. salah satu lokasi pengembangan Minapolitan di Pulau Lombok terletak di Desa Pengentap Kabupaten Lombok Barat. Sesuai surat keputusan Nomor KEP.32/MEN/2010 menetapkan Kabupaten Lombok Barat sebagai kawasan Minapolitan, jenis Minapolitan yang diterapkan di Kabupaten Lombok Barat yaitu budidaya rumput laut. Penetapan tersebut sangat disambut baik oleh pemerintah kabupaten karena Kabupaten Lombok Barat memiliki potensi sumber daya perikanan yang cukup menjanjikan untuk dikembangkan, tantangan tersebut dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini:

Tabel 4. Pemanfaatan daerah perikanan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2009-2012

Jenis Sarana/Prasarana	Satuan	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. BUDIDAYA PERIKANAN	Ha	4.393,86	5.757,23	6.433,53	6.128,89
A. Budidaya Air Tawar	Ha	1.501,40	1.708,00	2.635,02	1.405,30
1. Kolam Air Tenang	Ha	720,00	835,00	1.651,02	803,30
2. Kolam Air Deras	Ha	3,00	10,00	13	75
3. Mina Padi	Ha	415,00	495,00	495	495
4. Mina Kangkung	Ha	362,00	362,00	362	30
5. Keramba	Ha	1,40	6,00	114	1,5
B. Budidaya Tambak	Ha	605,00	737,00	752	457
1. Tambak Contoh	Ha	5,00	5,00	5	5
2. Tambak Rakyat	Ha	600,00	732,00	747	452
C. Budidaya Laut	Ha	2.279,00	3.284,30	3.018,58	4.238,66
1. Mutiara	Ha	2.094	2.983,3	2.982	2.294
2. Rumput Laut	Ha	183	300	33,60	1.944,25
3. Kerapu		2	1	2,98	0,41
D. Usaha Pembenihan	Ha	8,46	27,93	27,93	27,93
1. BBI	Ha	1,58	1,58	1,58	1,58
4. UPR	Ha	6,88	26,35	26,35	26,35

Sumber : Kabupaten Lombok Barat dalam Angka, 2013

Berdasarkan tabel 4 di atas dapat kita lihat bahwa potensi perikanan Kabupaten Lombok Barat cukup menjanjikan dalam membangun perekonomian daerah, tabel di atas menunjukkan pemanfaatan perikanan didominasi oleh sektor budidaya laut. Potensi budidaya laut yang ada di Kabupaten Lombok Barat berjumlah 2.279,00 pada tahun 2009 dan terus bertambah hingga berjumlah 4.238,66 pada tahun 2012, Tidak heran budidaya laut menjadi potensi yang cukup menjanjikan dalam meningkatkan perekonomian daerah Kabupaten Lombok Barat.

Potensi kekayaan laut Kabupaten Lombok Barat yang masih belum dimanfaatkan secara maksimal perlu diperhatikan, untuk itu pemerintah kabupaten Kabupaten Lombok Barat memerlukan strategi yang tepat sebagai upaya pemanfaatan sumber daya kelautan agar lebih efektif. Penentuan Strategi yang perlu dilakukan pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk memaksimalkan potensi perairan yang dimiliki perlu pertimbangan dan pengkajian agar strategi yang dibuat mampu mengatasi permasalahan tersebut, strategi disusun harapannya dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi sebagaimana dijelaskan oleh Siagian (2002:16) yang menyebutkan bahwa:

strategi merupakan analisis yang tepat tentang kekuatan yang dimiliki organisasi, kelemahan yang mungkin melekat pada dirinya, berbagai peluang yang mungkin timbul dan harus dimanfaatkan serta ancaman yang diperkirakan akan dihadapi. Siagian (2002:16)

Berdasarkan pernyataan dari Siagian tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan pertimbangan keputusan yang didasari oleh kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang berada dilingkungan sekitar kemudian nantinya akan menjadi penentu pengambilan strategi, agar penyusunan strategi

dapat berjalan dengan tepat sasaran dan diimplementasikan secara efektif, maka ada tiga hal mutlak yang perlu diperhatikan :

- a. Strategi yang dirumuskan harus mampu disatu pihak memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang diperkirakan akan timbul dan pihak lain memperkecil dampak berbagai faktor yang sifatnya negatif atau bahkan berupa ancaman bagi organisasi dan kelangsungannya;
- b. Strategi harus memperhitungkan secara realistis kemampuan suatu organisasi dalam menyediakan sumberdaya, sarana, prasarana dan dana yang dipergunakan untuk mengoperasikan strategi tersebut;
- c. Strategi yang telah ditentukan dioperasionalkan secara teliti. Tolak ukur tepat tidaknya suatu strategi bukan terlihat pada proses perumusannya saja, akan tetapi juga mencakup pada operasionalnya atau pelaksanaannya (Siagian, 2002:102-103)

Berdasarkan pertimbangan yang perlu diperhatikan tersebut dapat memberikan dampak yang baik dalam pelaksanaan strategi dilapangan, strategi yang disusun oleh pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam hal ini strategi pengembangan kawasan Minapolitan di Kabupaten Lombok Barat perlu diperhitungkan dengan baik. Untuk itu dengan adanya program Minapolitan tersebut dapat membantu Kabupaten Lombok Barat dalam mempermudah pengambilan keputusan dalam mengembangkan pemanfaatan sumber daya perikanan yang lebih maksimal, strategi dasar yang menjadi patokan pengembangan kawasan Minapolitan rumput laut telah dirumuskan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu: perluasan areal budidaya, optimalisasi kepemilikan unit budidaya, peningkatan jumlah pembudidaya, pengembangan kelembagaan dan pembiayaan, dan tersinerginya antar komponen pendukung. Untuk penyusun strategi ditingkat kabupaten nantinya akan menyesuaikan dari keadaan lingkungan yang ada di daerah, namun strategi dari

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi pedoman dasar dalam penyusunan strategi di daerah.

Strategi yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam upayanya mengembangkan kawasan Minapolitan di Kabupaten Lombok Barat telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan strategi dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Strategi yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam upaya pengembangan kawasan Minapolitan Kabupaten Lombok Barat difokuskan pada pemberdayaan masyarakat pesisir, hal ini dikarenakan rata-rata masyarakat pesisir yang tinggal di wilayah Kabupaten Lombok Barat masih belum sejahtera dalam segi sosial dan ekonomi. Untuk itu perlunya upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dengan menyusun strategi pemberdayaan masyarakat yang mengacu dari beberapa aspek, hal ini seperti yang dijelaskan bahwa “Pemberdayaan mengacu pada peningkatan sumber daya dan kemampuan masyarakat miskin untuk berpartisipasi, memutuskan, mengontrol dan terlibat pada proses yang mempengaruhi kehidupan mereka” (Adiyoso, 2009). Berdasarkan pendapat dari Adiyoso tersebut, pemerintah Kabupaten Lombok Barat perlu menyusun strategi pemberdayaan masyarakat dengan mengacu beberapa aspek yang sudah dijelaskan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kabupaten Lombok Barat.

Dari permasalahan yang telah dijabarkan, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tentang kegiatan Minapolitan, yang berjudul: “STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN BUDIDAYA

RUMPUT LAUT DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT PESISIR (Studi padan Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Lombok Barat).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang diuraikan penulis, maka rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah strategi pengembangan kawasan Minapolitan budidaya rumput laut pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat?
2. Apakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat strategi pengembangan kawasan Minapolitan budidaya rumput laut di Kabupaten Lombok Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis strategi pengembangan kawasan Minapolitan budidaya rumput laut pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat strategi pengembangan kawasan Minapolitan budidaya rumput laut di Kabupaten Lombok Barat.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan membawa dampak yang positif dalam pengembangan pemanfaatan sumberdaya alam yang lebih baik yang berwawasan ekonomi kerakyatan dan memberikan kontribusi bagi pihak terkait. Adapun kontribusi penelitian yang hendak dicapai antara lain:

1. Kontribusi Akademik

- a. Sebagai bahan pengembangan Ilmu pengetahuan khususnya Ilmu administrasi Publik dibidang pemberdayaan masyarakat pedesaan dan peningkatan kualitas SDM pedesaan
- b. Dapat menjadi perantara dalam pengembangan konsep Minapolitan yang berwawasan peningkatan perekonomian masyarakat pesisir bagi para peneliti selanjutnya

2. Kontribusi Praktis

- a. Dapat menjadi bahan pengevaluasian program Minapolitan yang nantinya akan bermanfaat sebagai bahan pengembangan Minapolitan bagi pemerintah daerah
- b. Sebagai sarana menambah wawasan mengenai konsep Minapolitan yang mementingkan aspek pengembangan perekonomian masyarakat

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan dari penulisan skripsi yaitu diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penjelasan mengenai landasan teori yang membahas mengenai teori-teori dan konsep-konsep umum yang akan digunakan dalam penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai bagaimana penelitian ini dilakukan. Dimulai dari jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai analisa data dan informasi yang didapatkan dari hasil wawancara dan dokumentasi. Hal tersebut berupa gambaran umum lokasi penelitian, analisis data dan pembahasan. Dengan demikian akan diperoleh suatu hasil analisa yang akan dijadikan dasar dalam pembuatan kesimpulan dan saran penelitian ini.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi penjelasan mengenai kesimpulan dan saran dari peneliti yang nantinya dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembangunan dalam Administrasi Publik

1. Administrasi Publik

Penyelenggaraan pemerintahan tidak lepas dengan peran administrasi publik, Administrasi publik akan memainkan peran penting diantara lain dalam perumusan suatu kebijakan publik guna mewujudkan salah satu tujuan utama dibentuknya Negara. Menurut Harbert A. Simon (1999:3), mendefinisikan administrasi sebagai kegiatan-kegiatan kelompok untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Sedangkan menurut S.P. Siagian (2004:2), mendefinisikan bahwa Administrasi Publik sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Adapun administrasi publik menurut Hary (dalam Pesolong, 2007:8) adalah kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan memperoleh pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungan dengan masyarakat yang diperintahkan dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dipahami bahwa administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam sebuah lembaga yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan mampu untuk melakukan

perubahan bagi lembaganya atau lingkungan disekitar lembaga agar terwujudnya tujuan bersama.

2. Ruang Lingkup Administrasi Publik

Administrasi Publik sebagai sebuah disiplin ilmu dan sistem memiliki permasalahan yang sangat kompleks, penyelesaian masalah tersebut harus di selesaikan dengan bantuan para administrator. untuk menyelesaikan masalah tersebut perlunya ruang lingkup yang akan membatasi kinerja para administrator dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, lembaga administrasi Negara dalam syahfri (2012:115) menyebutkan ruang lingkup administrasi meliputi:

- a. Tata nilai: menyangkut nilai kultural, spiritual, etika, falsafah hidup yang menjadi dasar dan tujuan serta acuan perilaku dari sistem dan proses administrasi Publik
- b. Organisasi pemerintah negara: terdiri dari organisasi lembaga eksekutif (pemerintah), legislatif (badan perwakilan rakyat), yudikatif (badan peradilan), dan lembaga-lembaga negara lainnya yang diperlukan serta saling hubungannya dalam rangka penyelenggaraan negara, termasuk organisasi kesekretariatan lembaga-lembaga tersebut.
- c. Manajemen Pemerintah Negara: meliputi kegiatan pengelolaan pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan dan wilayah pemerintahan, merupakan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pemerintahan, seperti pengelolaan kebijakan, perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, pengendalian, pelayanan,

pengawasan dan pertanggung jawaban dari hasil-hasilnya dari setiap atau keseluruhan organisasi pemerintahan negara.

- d. Sumber daya aparatur: sumber daya manusia sebagai unsur dominan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan negara, pengelolaan, dan pembinaan mendapatkan perhatian dalam keseluruhan aspek dan dimensinya, mulai dari *recruitment* pengembangan kompetensi, pengembangan karier, dan kesejahteraan serta pemensiunannya.
- e. Sistem dan proses kebijakan negara: sebagai sistem dan proses kebijakan negara, peran administrasi publik terutama dalam fungsi dan proses: a) perumusan kebijakan; b) penetapan kebijakan; c) pelaksanaan kebijakan; d) pengawasan dan pengendalian kebijakan; e) penilaian hasil (evaluasi kinerja) pelaksanaan berbagai kebijakan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat (sosial, ekonomi, politik, hukum, agama, lingkungan hidup, dan lain sebagainya)
- f. Posisi, kondisi, dan peran masyarakat bangsa dalam bernegara: negara didirikan oleh rakyat bangsa untuk mencapai tujuan bersama sehingga rakyatlah pemilik kedaulatan. Dengan demikian, organisasi dan manajemen pemerintahan tidak dapat mengabaikan aspirasi dan peran masyarakat atau rakyat dalam penyelenggaraan pemerintah negara.
- g. Hukum administrasi publik: menyangkut dimensi hukum yang berkaitan dengan mengatur sistem dan proses penyelenggaraan negara, termasuk mengenai eksistensi, tugas, fungsi lembaga-lembaga pemerintahan negara, saling berhubungan satu dengan yang lain dimaksudkan agar kelembagaan

negara tersusun dan terselenggara secara efisien, proporsional, efektif dan legitimate

Ruang lingkup yang dijelaskan di atas dapat kita simpulkan bahwa dalam pembagian ruang lingkup tersebut para administrator mampu untuk membedakan proses kinerja setiap kegiatan administrasi sehingga dapat memberikan gambaran bagaimana dalam pelaksanaan kinerja administrasi yang mampu menghasilkan kinerja yang baik dan efektif.

3. Administrasi Pembangunan

Administrasi Pembangunan mencakup dua pengertian, yaitu administrasi, dan pembangunan. Secara umum telah diketahui bahwa yang dimaksud dengan administrasi ialah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan dilaksanakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pembangunan biasanya didefinisikan sebagai “rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara untuk memajukan seluruh aspek dari negara tersebut.

Pembangunan merupakan kegiatan yang menjadi tujuan utama setiap daerah dalam memajukan daerah, Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab pelaksana pembangunan harus terus melakukan inovasi pembangunan untuk memajukan daerah. Siagian (2008:4) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”. Sedangkan Ginanjar Kartasasmita (1996) memberikan pengertian yang

lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.

Pengertian dari para ahli di atas dapat disimpulkan pembangunan merupakan proses perubahan yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan strategi yang benar agar perubahan tersebut dapat tercapai sesuai dengan keinginan. Pelaksana pembangunan harus memiliki strategi yang tepat agar nantinya hasilnya yang diharapkan dapat tercapai. Pembangunan bagi daerah memiliki arti penting dalam pelaksanaan, seperti yang dijelaskan oleh siagian (2008:4) menjelaskan tujuh aspek pembangunan yaitu:

- a. Pembangunan merupakan suatu aspek: pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang di satu tempat bersifat independen akan tetapi di pihak lain merupakan “bagian “ yang bersifat tanpa akhir.
- b. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk ditetapkan. Dengan kata lain, jika dalam rangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terdapat kegiatan yang kelihatannya seperti pembangunan, akan tetapi sebenarnya tidak ditetapkan secara sadar dan hanya terjadi secara sporadis atau insidental, kegiatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pembangunan.
- c. Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, jangka sedang, dan jangka pendek. Seperti dimaklumi merencanakan berarti mengambil keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan pada jangka waktu tertentu di masa depan

- d. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan. Pertumbuhan dimaksudkan sebagai peningkatan kemampuan suatu negara untuk berkembang dan tidak sekedar mampu mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, dan eksistensinya. Perubahan mengandung makna bahwa setiap negara harus bersikap antisipatif dan proaktif dalam menghadapi tuntutan situasi yang berbeda, itu dapat diprediksikan sebelumnya atau tidak. Dengan kata lain, suatu negara yang sedang membangun tidak akan bisa juga hanya mampu mempertahankan status quo yang ada.
- e. Pembangunan mengarah pada modernitas, modernitas di sini diartikan sebagai cara hidup yang lebih baik dari sebelumnya, cara berfikir yang rasional dan sistem budaya yang kuat tetapi fleksibel. Walaupun demikian, perlu di ingatkan bahwa konsep modernitas tidak identik dengan “cara hidup gaya Barat”. Setiap negara yang modern harus tetap mempertahankan jati dirinya yang bersumber dari nilai-nilai yang dipandang luhur oleh negara yang bersangkutan.
- f. Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan bersifat multidimensional. Artinya, modernitas tersebut mencakup seluruh segi kehidupan bangsa dan negara, yang dapat menjelaskan bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.
- g. Semua hal yang telah disinggung di atas ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa sehingga negara yang bersangkutan semakin kokoh pondasinya dan semakin mantap keberadaannya sehingga negara akan

sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia mampu menciptakan situasi kerjasama antar bangsa.

Pemahaman tentang administrasi pembangunan sebenarnya tidak jauh beda dengan administrasi publik. Namun pada administrasi pembangunan memberikan perhatian terhadap pengertian umum, seperti keamanan, hukum, ketertiban pengumpulan pajak, memberikan pelayanan publik, dan penyelenggaraan hubungan dengan Negara lain. Hal ini yang membuat administrasi pembangunan bersifat umum dari administrasi publik.

B. Pembangunan Masyarakat Pesisir

Wilayah pesisir dalam pengertian biologis merupakan daerah pertemuan antara daratan dan laut. Ke arah daratan wilayah meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam laut, dan perembesan air asin. Sedangkan ke arah laut, wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih di pengaruhi proses alami yang terjadi di daerah, seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat, seperti penggundulan hutan dan pencemaran (Supriharyono, 2000:1).

Wilayah pesisir merupakan kawasan sumberdaya potensial di Indonesia. Kawasan ini adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Sumber daya ini sangat besar yang didukung oleh adanya garis pantai Indonesia mencapai panjang sekitar 81.000 km (Dahuri dalam Sahri 2011:359). Dari pengertian tersebut memberi gambaran keadaan pesisir yang merupakan daerah yang sebagian besar dipengaruhi oleh keadaan alam, wilayah pesisir menjadi tempat

paling menjanjikan dalam memberikan peluang untuk memanfaatkan hasil laut. Pemanfaatan wilayah pesisir dimaksudkan memberikan peningkatan perekonomian bagi masyarakat yang bertempat tinggal di daerah pesisir, masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar wilayah pesisir lebih banyak menggantungkan kehidupannya dari hasil laut.

Konsentrasi pembangunan kehidupan masyarakat dan berbagai pembangunan di wilayah pesisir disebabkan oleh tiga alasan ekonomi yang kuat, yaitu bahwa wilayah pesisir merupakan kawasan yang produktif di bumi, wilayah pesisir menyediakan tujuh kemudahan bagi berbagai kegiatan serta wilayah pesisir memiliki pesona yang menarik bagi obyek pariwisata ataupun pemanfaatan hasil perikanan. Hal-hal tersebut menyebabkan kawasan pesisir di dunia termasuk Indonesia mengalami tekanan ekologis yang parah dan kompleks sehingga menjadi rusak (Dahuri, 1998). Maka dari pada itu pembangunan haruslah memperhatikan semua aspek dalam proses pembangunan masyarakat, hal ini dimaksudkan agar sumber daya perikanan yang sudah ada dapat terjaga dan mampu di manfaatkan untuk kemudian harinya.

1. Masyarakat Pesisir

Secara geografis, “masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh, dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut. Sebagai suatu sistem, masyarakat nelayan terdiri atas kategori-kategori sosial yang membentuk kesatuan sosial” (Kusnadi, 2009:27). Selain itu masyarakat juga mempunyai kebudayaan-kebudayaan yang berbeda dengan masyarakat sosial lainnya sebagai referensi perilaku sehari-hari.

Kusnadi (2009:38) mengelompokan masyarakat pesisir menjadi tiga bagian yang dilihat dari aspek interaksi masyarakat dengan sumber daya ekonomi yang tersedia di kawasan pesisir sebagian berikut:

- 1) Pemanfaatan langsung sumber daya lingkungan, seperti nelayan (yang pokok), pembudidayaan ikan di perairan pantai (dengan jaring apung atau keramba), pembudidayaan rumput laut/mutiara, dan penambak.
- 2) Pengolahan hasil ikan atau hasil laut lainnya, seperti pemindangan, pengeringan ikan, pengasapan, pengusaha terasi/tepung ikan, dan sebagainya.
- 3) Penunjang kegiatan ekonomi perikanan seperti toko atau warung, pemilik bengkel (montir dan las), perusahaan angkut, tukang perahu, atau buruh kasar.

Masyarakat pesisir merupakan masyarakat tergolong dalam masyarakat kelas menengah kebawah. Masyarakat pesisir yang merupakan masyarakat yang rata-rata memanfaatkan sumber daya pesisir, namun selama ini pemanfaatan sumber daya kelautan yang dimanfaatkan masyarakat pesisir belum bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. oleh karena itu banyaknya kemiskinan yang terjadi dimasyarakat pesisir, hal ini diakibatkan masyarakat pesisir yang memanfaatkan sumber daya kelautan kurang maksimal yang disebabkan teknologi yang masih teradisional. Sanderson dalam Satria (2015:127) membagi tiga asumsi pokok kenapa masyarakat pesisir sulit untuk berkembang yang dijelaskan pada halaman 26:

- 1) Keterbelakangan cenderung dilihat sebagai suatu “keadaan asli”(original state), sebagai suatu keadaan masyarakat yang telah ada dalam aneka bentuk. Keterbelakangan terjadi akibat belum maksudnya; kapitalisme, sehingga untuk keluar dari ketertinggalan, kapitalisme-lah jawabannya
- 2) Keterbelakangan merupakan akibat dari banyaknya kekurangan yang ada; di dalam suatu masyarakat, seperti kekurangan kapital sehingga untuk mengatasinya diperlukan formasi kapital baru melalui difusi modal dan teknologi
- 3) Masyarakat terbelakang biasanya tidak mempunyai semacam kesadaran atau mentalitas yang menawarkan perkembangan. Kemajuan terjadi bila orang telah mengadopsi pemikiran rasional, nilai-nilai yang berorientasi masa depan, dan sistem etik. Sementara itu, umumnya nilai-nilai lokal masyarakat dianggap tidak kondusif bagi pencapaian kemajuan.

Dari kesulitan masyarakat pesisir di atas, masyarakat pesisir juga menghadapi sejumlah masalah politik, sosial, dan ekonomi yang kompleks. Menurut Kusnadi (2009:27-28) masalah tersebut adalah:

- a) kemiskinan, kesenjangan sosial, dan tekanan-tekanan teknologi yang datang setiap saat,
- b) keterbatasan akses modal, teknologi, dan pasar, sehingga mempengaruhi dinamika usaha,
- c) kelemahan fungsi kelembagaan sosial ekonomi yang ada
- d) kualitas SDM yang rendah sebagai akibat keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.

- e) Degradasi sumber daya lingkungan, baik di kawasan pesisir, laut, maupun pulau-pulau kecil.
- f) Belum kuatnya kebijakan yang berorientasi pada kemaritiman sebagai pilar utama pembangunan nasional.

Berdasarkan dari beberapa pendapat di atas. Kesulitan yang dihadapi masyarakat pesisir dalam memanfaatkan sumberdaya kelautan yang berdampak pada terjadinya kemiskinan, membuat banyak penelitian yang dilakukan untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi masyarakat Pesisir. banyak upaya yang dilakukan mulai dari melakukan pemberdayaan masyarakat pesisir hingga pemberian bantuan yang salah satunya yaitu pemberian modal usaha. Pemberian modal usaha merupakan solusi dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang terjadi dimasyarakat pesisir. Kusnadi (2015:23) yang menjelaskan strategi penguatan permodalan yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Mengembangkan fungsi lembaga keuangan mikro dan koperasi yang memihak nelayan, baik yang tumbuh melalui program intervensi pembangunan atau swadaya masyarakat.
2. Meyakinkan prospek dan meningkatkan komitmen lembaga perbangkan terhadap pembangunan sektor ekonomi-perikanan.
3. Membangun usaha bersama, seperti melalui sarana-prasaran penangkap secara kolektif, sehingga distribusi pendapatan yang diterima merata.

Selain pemberian modal usaha ada cara lain untuk mengatasi berbagai permasalahan masyarakat pesisir, hal ini dapat dilakukan dengan pengaturan peran wanita karena wanita nelayan sebagai salah satu komponen masyarakat pesisir selama ini tidak banyak menyentuh perhatian kita. termasuk dalam berbagai program pembangunan dan pemberdayaan diwilayah pesisir. Isu-isu peran merekapun tidak banyak terdokumentasikan dalam berbagai media. Wanita

nelayan seolah-olah hanya menjadi bayangan dari nelayan yang dalam pikiran kita kaum pria yang berjuang menghadapi gelombang besar atau angin besar untuk memperoleh hasil tangkap ikan. Kondisi demikian telah lama dianggap hal yang lumrah, karena dalam budaya kita dikonstruksikan secara sosial maupun budaya untuk menjadi seorang yang selalu berada di belakang pria yang mengurus kegiatan rumah tangga.

Pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia seharusnya memperhatikan kondisi wanita maupun pria atau bersifat general. Peran peroduktif wanita nelayan dapat dioptimalkan apabila semua faktor penghambat dapat teridentifikasi secara baik. Widodo (2008:33) menyatakan bahwa “walaupun secara kuantitatif jumlah wanita lebih banyak dari pria, belum banyak rencana pembangunan yang benar-benar mendasarkan pada kebutuhan kaum wanita, padahal mereka bekerja pada dua fungsi sekaligus, reproduktif dan produktif”. Kusnadi (2009:103) peran produktif adalah “peran perempuan pesisir untuk memperoleh penghasilan ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari”.

Di samping peran produktif yang harus dilakukan oleh kaum wanita, kewajiban yang harus dilakukan oleh perempuan pesisir menurut Kusmedi (2009:103) adalah “ikut mengelola potensi komunitas, yang hasil akhirnya juga untuk memenuhi kepentingan ekonomi investasi sosial rumah tangga masyarakat. Dan peran domestik perempuan yang dilaksanakan dalam kedudukan sebagai istri dari suami dan ibu dari anak-anaknya”.

Program pembangunan pesisir ke depan diharapkan dapat menyediakan kesempatan kepada wanita nelayan untuk mendapatkan peluang yang lebih besar bahkan sejajar dengan kaum pria. Widodo (2008:33) menyebutkan bahwa “optimalisasi peran wanita nelayan dapat dicapai melalui integrasi kebijakan pembangunan dan pemberdayaan perempuan ke dalam kebijakan nasional, provinsi, kabupaten/kota baik pada ranah perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, maupun evaluasi pembangunan”. Upaya ini tidak mudah jika tidak didukung kesadaran dan kepekaan para pengambil keputusan tentang kesetaraan dan keadilan gender yang diikuti oleh program-program yang dapat menjamin keterlibatan para wanita.

Program penguatan peran wanita dapat dilakukan melalui penguatan kelembagaan usaha melalui usaha yang berbasis kelompok. Melalui upaya ini para wanita diharapkan memiliki *bargaining position* yang lebih baik terhadap persaingan yang umumnya kaum pria dengan modal yang lebih besar. Upaya ini juga akan mempermudah akses wanita nelayan terhadap modal, pasar, inovasi, dan teknologi (Widodo, 2008:33). Perlunya perhatian pemerintah daerah dalam memberdayakan wanita nelayan, hal ini karena wanita nelayan tidak mungkin hanya menanti para nelayan pria pulang dari laut dan membawa hasil laut kepantai untuk diangkut oleh para wanita untuk dijual kembali atau untuk dikonsumsi pribadi. Permasalahan ini perlu untuk diperhatikan karena jika wanita nelayan mendapat pekerjaan dapat membantu perekonomian rumah tangga mereka dan juga dari pemanfaatan wanita nelayan dapat menurunkan angka pengangguran yang terjadi dimasyarakat pesisir.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan merupakan salah satu unsur dalam pengembangan masyarakat miskin khususnya di daerah pesisir, konsep pemberdayaan masyarakat muncul diakibatkan oleh masyarakat sebagian besar masih dalam kawasan kemiskinan. Penyebab kemiskinan pada masyarakat pesisir diakibatkan karena kebanyakan masyarakat menggantungkan kehidupan mereka pada hasil laut yang didapat, namun karena kurang maksimalnya pemanfaatan hasil laut mengakibatkan masyarakat pesisir sulit untuk menopang perekonomian mereka. Munculnya pemberdayaan masyarakat juga tidak lepas karena permasalahan gender, ketidaksetaraan gender yang tertanam dalam rumah tangga, diantara kerabat, dipasar tenaga kerja, hubungan ekonomi informal, dan di komunitas maupun jaringan yang lebih luas, serta perbedaan generasi, dan etnis, telah mempengaruhi akses masyarakat. Perdebatan terhadap persoalan gender ini sering terjadi di masyarakat terlebih lagi bagi masyarakat pedesaan, hal ini terjadi karena masyarakat pedesaan memiliki cara pandang yang sempit.

Masyarakat pedesaan yang umumnya menganggap apabila suatu tindakan yang diambil ternyata berhasil maka mereka akan terus melakukan tindakan tersebut, hal ini yang mengakibatkan masyarakat pedesaan susah untuk berkembang yang dikarenakan tidak adanya inovasi berfikir dalam mengembangkan perilaku ataupun tindakan. Secara konseptual pemberdayaan atau memberi kekuasaan (*empowerment*), besar dari kata “*power*” (kekuatan atau keberdayaan). Karenanya ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan (Suharto,2009). Pemberdayaan mengacu pada peningkatan

sumber daya dan kemampuan masyarakat miskin untuk berpartisipasi, memutus, mengontrol dan terlibat pada proses yang mempengaruhi kehidupan mereka (Adiyoso, 2009)

Dari penjelasan di atas dapat memberi gambaran bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan strategi yang sangat penting dalam membantu mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat pesisir, hal ini membuat para pemangku kepentingan dalam proses strategi pemberdayaan masyarakat harus lebih memperhatikan bagaimana mengatasi persoalan tersebut. Sumodiningrat (1997) mengemukakan bahwa strategi untuk memberdayakan masyarakat terdapat tiga hal yang harus dilakukan yaitu: (1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang; (2) memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat; dan (3) Memberi perlindungan, dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi lebih lemah.

Berdasarkan semua penjelasan diatas mengenai pemberdayaan masyarakat pesisir dapat menjadi bahan dalam membuat strategi pemberdayaan masyarakat pesisir, Nikijuluw (2001) menyebutkan unsur dalam pembuatan strategi tersebut yaitu:

1. Tersedianya dan terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang terdiri dari sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan
2. Tersedianya prasarana dan sarana produksi secara lokal yang memungkinkan masyarakat dapat memperolehnya dengan harga murah dan kualitas yang baik

3. Meningkatkan peran kelembagaan masyarakat sebagai peran wadah aksi kolektif (*collective action*) untuk mencapai tujuan-tujuan individu.
4. Terciptanya kegiatan-kegiatan di daerah yang memiliki ciri-ciri berbasis sumberdaya lokal (*resource-based*), dimiliki dan dilaksanakan serta berdampak bagi masyarakat lokal (*local society-based*), dan dengan menggunakan teknologi maju tepat guna yang berasal dari proses pengkajian dan penelitian (*scientific-based*)
5. Terciptanya hubungan transportasi dan komunikasi sebagai basis atau dasar hubungan ekonomi antar kawasan pesisir dan pedalaman.
6. Terwujudnya struktur ekonomi Indonesia yang berbasis pada kegiatan ekonomi di wilayah pesisir dan laut sebagai wujud pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya laut.

Strategi pemberdayaan masyarakat memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengatasi permasalahan yang biasa timbul di masyarakat khususnya di masyarakat pesisir, untuk itu perlunya keseriusan dari pemerintah daerah sebagai pembuat strategi dan pelaksana agar mampu meningkatkan perekonomian daerah dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

3. Pengelolaan Sumber daya Laut

widodo (2008:8) mengatakan untuk menghadapi penipisan sumber daya perikanan dan untuk merumuskan program pengelolaan yang berhasil, di perlukan beberapa informasi. Informasi tersebut diantaranya:

- 1) Proses-proses biologis dan ekonomi dari setiap perikanan. Proses biologis perikanan dalam hal ini di sekitar ilmu dinamika populasi dari

setiap atau jenis tertentu yang sedang dikaji. Proses biologi juga mencakup cara parameter-parameter lingkungan mempengaruhi reproduksi, pertimbangan dan mortalitas alami dari spesies itu. Proses ekonomi kemudian diperlukan untuk menentukan batas-batas tertentu dalam memanfaatkan sumber data. Masukan modal dan tenaga kerja serta nilai dari masukan ini beserta keluarganya.

- 2) Selama penipisan merupakan akibat dari penangkapan, selanjutnya suatu kerangka teori diperlukan untuk disusun, dalam hal mana suatu tingkat penipisan yang dikehendaki dan satu tingkat upaya penangkapan yang diinginkan dapat ditetapkan dan ditentukan dalam bentuk sebagai tujuan-tujuan pengelolaan. Kerangka teori seperti itu memerlukan integritas dari proses-proses biologi dan ekonomi dan informasi penduduk lainnya.
- 3) Terjadinya penipisan yang dahsyat adalah disebabkan oleh tidak adanya atau kurang hak-hak pemilikan yang efektif, sehingga kerangka-kerangka institusional atau kelembagaan dan perundang-undangan perlu dirancang dan diimplementasikan, serta diberdayakan untuk mengisi kesenjangan dan melengkapi atau mengganti praktik-praktik operasi pasar bebas.

Pengelolaan perikanan meliputi banyak aspek termasuk sumber daya ikan, habitat/lingkungan, dan manusia serta berbagai faktor eksternalnya. Secara prinsip, pengelolaan perikanan menurut FAO yang di kutip oleh Widodo (2008:56) merupakan:

Proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya dan implementasi dari aturan-aturan main di bidang ikan dalam rangka menjamin kelangsungan produktifitas sumber, dan pencapaian tujuan perikanan lainnya. Berdasarkan pengertian ini pengelolaan perikanan membutuhkan:

- 1) Bukti-bukti ilmiah terbaik (*best scientific evidence*) untuk analisis dan perencanaan perikanan yang memadai.
- 2) Proses diskusi (kebutuhan partisipasi) melalui konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder).

- 3) Penetapan berbagai tujuan dan strategi pengelolaan melalui pembuatan keputusan, alokasi sumber daya, dan implementasi aturan mainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengelolaan sumber perikanan mencakup berbagai aspek termasuk biologis, ekonomi, legal teknologi, sosial, dan politik.

Menurut widodo (2008:56) pengelolaan sumber daya perikanan saat ini menuntut perhatian penuh dikarenakan oleh:

- 1) Semakin meningkatnya tekanan eksploitasi terhadap berbagai stok ikan.
- 2) Meningkatnya kesadaran dan kepedulian umum untuk memanfaatkan lingkungannya secara bijaksana, yakni dengan melakukan pemanenan secara rasional (*rational harvesting*) dan berbagai upaya pembangunan secara berkelanjutan. Namun demikian, upaya pengelolaan perikanan memiliki beberapa keterbatasan (*constraint*) karena karakter umum sumber daya ikan dan pemanfaatannya.

Pertimbangan pengelolaan perikanan menurut Widodo dibagi menjadi empat bentuk pertimbangan di bawah ini:

- 1) Pertimbangan biologis

Pengelolaan perikanan juga harus memperhatikan struktur stok hasil dari sumber daya. Populasi ikan sering tersusun dari sejumlah stok yang berbeda, yang masing-masing terisolasi secara genetik satu terhadap lainnya melalui perbedaan perilaku atau penyebaran mereka. Stok yang berbeda juga merefleksikan diversitas genetik dan apabila stok tersebut ditangkap sampai pada tingkat kelimpahan yang sangat rendah atau

bahkan punah, maka diversitas genetik tersebut dapat saja hilang. Stok tidak begitu saja dapat diganti oleh lainnya, sebab adanya isolasi genetik, dan oleh karena produk dari stok tersebut juga akan hilang, mengarah pada kehilangan keuntungan secara permanen atau dalam jangka panjang. Pengelolaan perikanan seharusnya memperhatikan setiap stok secara terpisah dan menjamin pemanfaatan berkelanjutan dari setiap stok dan bukan memperlakukan sebagai suatu kesatuan.

2) Pertimbangan ekologi dan lingkungan

Lingkungan dari hasil perikanan jarang bersifat statis dan kondisi lingkungan akuatik dapat berubah secara nyata menurut waktu, seperti pasang surut, suhu, air, dll. Perubahan lingkungan seperti itu mempengaruhi dinamika dari ketersediaan perikanan, pertumbuhan, rekrutmen, mortalitas alami atau kombinasi. Perubahan dalam setiap komponen dari ekosistem dapat mempunyai dampak terhadap populasi dan komunitas sumber daya perikanan. Beberapa perubahan tersebut mungkin berada di luar kontrol manusia, meskipun demikian mereka itu perlu dipertimbangkan dalam pengelolaan sumber daya.

3) Pertimbangan sosial, budaya, dan kelembagaan

Populasi manusia dan masyarakat bersifat dinamis seperti halnya populasi biologi lainnya. Selain itu perubahan sosial berlangsung terus-menerus dalam skala berbeda, dipengaruhi oleh perubahan dalam cuaca, lapangan pekerjaan, kondisi politik, penawaran dan permintaan produk perikanan, dan faktor-faktor lainnya. Perubahan perubahan seperti itu

dapat mempengaruhi efektifitas dari strategi pengelolaan dan oleh sebab itu harus dipertimbangkan dan diakomodasi. Namun demikian, seperti faktor biologi, pengaruh faktor sosial dan budaya ini dalam pengelolaan perikanan sulit untuk dikuantifikasikan sehingga menambah ketidakpastian terhadap pengelolaan.

4) Pertimbangan ekonomi

Kekuatan pasar sangat berpengaruh terhadap pengelolaan perikanan. Selain itu pengelolaan perikanan akses terbuka (*open access*), di mana setiap orang diperbolehkan masuk dalam perikanan. Di bawah keadaan seperti itu orang akan terus masuk ke perikanan sampai keuntungan dari perikanan sedemikian rendah sehingga tidak lagi menarik bagi pelaku usaha baru (*new entrance*). Akibat yang tidak dapat dielakkan dari perikanan akses terbuka adalah kehilangan keuntungan sehingga mengarah kepada tidak efisiensi secara ekonomi, dan jika tidak ditegakkan tindakan pengelolaan yang afektif akan terjadi *over exploitation* (widodo, 2008:74-77)

Pertimbangan yang sudah dijelaskan di atas merupakan penjelasan bagaimana para membuat kebijakan dalam mempertimbangkan beberapa aspek yang telah dijelaskan di atas, selain itu dapat menjadi arah menentukan kebijakannya agar mampu memperbaiki sumber daya alam yang telah ada dan juga demi keberlangsungan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan lebih baik.

4. Pasca Panen dan Pemasaran

Produk hasil laut khususnya produk rumput laut pada dasarnya mempunyai sifat yang mudah rusak atau membusuk, oleh sebab itu hasil perikanan memerlukan penanganan yang memadai mulai dari panen sampai ke tempat pemasaran atau sebelum mencapai konsumen. Banyak produk rumput laut yang nilainya menjadi turun karena kurang baik dalam menangani hasil produksi. Widodo (2008:34) kerusakan hasil perikanan atau penurunan mutu produk dapat terjadi karena faktor internal akibat reaksi enzematik maupun faktor eksternal akibat serangan parasit maupun bakteri. Rumput laut atau alga laut (*sea weed*) merupakan komoditas perikanan penting di Indonesia. Rumput laut akan bernilai ekonomis setelah mendapat penanganan lebih lanjut. Pada umumnya penanganan pascapanen rumput laut oleh petani hanya sampai pada pengeringan saja, rumput laut kering masih merupakan bahan baku dan harus diolah lagi. Pengolahan rumput laut kering dapat menghasilkan agar-agar, karaginan, atau algin tergantung kandungan yang terdapat di dalam rumput laut. Pengolahan ini kebanyakan diolah oleh pabrik walaupun sebenarnya dapat juga oleh petani.

Permasalahan hasil perikanan sebagai satu sub sistem ekonomi memegang peran penting dalam mengembangkan usaha perikanan dan peningkatan nilai jual produksi perikanan. “pertumbuhan pasar dunia produk perikanan diperkirakan mencapai lebih dari 10,8% per tahun, lebih tinggi dibandingkan pemasaran komoditi patani lainnya” (Nainggola yang di kutip oleh Widodo, 2008:35) di samping itu kegiatan pemasaran juga dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang

cukup luas dalam setiap rantai pemasaran, juga menjadi sumber penghasilan kelompok masyarakat yang terlibat didalamnya.

C. Kebijakan Kawasan Minapolitan

Pelaksanaan program-program Pemerintahan yang seluruhnya dilaksanakan demi membangun Negara dilaksanakan dalam sebuah sistem yang terstruktur. Hal ini membuat pemerintahan harus membuat sebuah kebijakan yang tepat demi terlaksananya tujuan yang diinginkan. Abdul Wahab (1997:10) yang mengatakan bahwa istilah kebijakan seringkali penggunaan saling dipertukarkan dengan istilah tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan-rancangan besar. Berdasarkan penjelasan Abdul Wahab dapat diartikan bahwa pelaksanaan kebijakan bisa menyangkut permasalahan segala aspek kehidupan, dengan demikian diartikan bahwa kebijakan merupakan program yang disusun secara detail dengan mengumpulkan semua informasi permasalahan yang ada di masyarakat sehingga menjadi sebuah gagasan yang nantinya akan dirumuskan menjadi sebuah program. Salah satu kebijakan itu antara lain adalah kebijakan disektor perikanan yaitu melalui pengembangan konsep Minapolitan. Kebijakan Minapolitan merupakan kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang dibawahhi oleh kementerian Kelautan dan Perikanan yang akan menjadi pelaksana dan penanggung jawaban program Minapolitan tersebut. Pembangunan sektor Perikanan melalui Minapolitan dirancang melalui kumpulan proyek-proyek terlebih dahulu, kemudian dibentuklah sebuah kesimpulan yang melahirkan Program Minapolitan.

1. Dasar Hukum Kawasan Minapolitan

Setiap Negara memiliki peraturan atau Hukum yang mengatur keterlaksananya pemerintahan dengan baik, tanpa ada landasan hukum yang baik maka Negara tersebut menjadi tidak stabil baik dalam penyelenggaraan pemerintahan ataupun dalam pelaksanaan tugas dan wewenang. Oleh karena itu perlunya landasan hukum bagi setiap Negara sangatlah penting agar Negara tersebut tetap stabil, Indonesia adalah salah satu Negara yang berlandaskan hukum sehingga menjadi dasar dalam membuat suatu kebijakan yang nantinya akan di pergunakan untuk melakukan pembangunan, adanya suatu kebijakan pembangunan sektor perikanan dalam bentuk program kerja nyata dan suatu yang dapat mendukung keberhasilan optimalisasi potensi tersebut.

Berdasarkan pada pasal 33 UUD 1945 ayat 1,2 dan 3 maka pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan kebijakan berupa peraturan menteri dalam rangka optimalisasi dan pemanfaatan sumber daya perikanan laut maupun tawar dengan menggunakan pendekatan konsep Minapolitan. Adapun regulasi tersebut yang dapat di jadikan sebuah pedoman dalam menjalankan program tersebut adalah peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.12/Men/2010 tentang Minapolitan dan Nomor 35/2010 tentang penetapan kawasan Minapolitan serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.18/Men/2011 Tentang Pedoman Umum Minapolitan.

2. Pengertian Minapolitan

Konsep Minapolitan yang berkembang saat ini diadaptasi dari konsep agropolitan yang mengembangkan potensi pedesaan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan di sektor pertanian, sedangkan konsep Minapolitan yang mengadaptasi konsep agropolitan menekankan pada pengembangan ekonomi daerah disektor perikanan. Pembuatan konsep Minapolitan yang mengadaptasi konsep agropolitan tidak serta-merta hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi desa saja, tapi pembuatan konsep tersebut dimaksudkan untuk menekan angka urbanisasi masyarakat desa yang berpindah ke perkotaan yang berdampak pada terbelakangnya wilayah pedesaan (Bogart, 2006). Minapolitan sendiri berasal dari kata “mina” berarti ikan dan “politan” berarti polis atau kota, sehingga secara bebas dapat diartikan sebagai kota perikanan. Pengembangan konsep dimaksudkan untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan dengan pendekatan dan sistem manajemen kawasan cepat tumbuh layaknya sebuah kota (Sunoto, 2010). Berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan RI No Per.12/MEN/2010 kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya

Kota perikanan dapat merupakan kota penengah atau kota kecil atau kota kecamatan atau kota pedesaan yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang mendorong pertumbuhan pembangunan pedesaan dan desa-desa *hinterland* atau wilayah sekitarnya melalui pembangunan ekonomi yang tidak

terbatas sebagai pusat pelayanan sektor perikanan tetapi juga pembangunan sektor secara luas seperti usaha perikanan, industri kecil, pariwisata dan jasa pelayanan.

Minapolitan adalah konsep pembangunan perikanan dan kelautan berbasis wilayah dengan pendekatan sistem dan manajemen kawasan yang memiliki empat prinsip yaitu: prinsip integritas, efisien, kualitas dan akselerasi. Kawasan Minapolitan adalah kawasan ekonomi yang terdiri dari sentra-sentra produksi dan perdagangan komoditas kelautan dan perikanan, jasa, perumahan dan kegiatan lainnya.

3. Tujuan Minapolitan

Tujuan awal pelaksanaan program Minapolitan pada umumnya bertujuan untuk menekan angka urbanisasi yang mana masyarakat lebih memilih hidup di kota dari pada di desa, hal ini seperti di jelaskan oleh (Bogart, 2006) yang menganggap bahwa perkembangan Metropolitan dapat mempengaruhi kehidupan di pedesaan yang mana pemerataan pembangunan tidak seimbang. Untuk itu muncul konsep agropolitan yang berkonsentrasi pada pengembangan perekonomian disektor pertanian dengan membuat kota-kota kecil untuk menekan urbanisasi dan bisa mengembangkan perekonomian dasa, hal ini yang kemudian konsep agropolitan diadopsi pada daerah pesisir dengan mengerakkan ekonomi dari sektor perikanan yang diberi nama Minapolitan. Tujuan pengembangan kawasan Minapolitan juga dijelaskan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan dapat dijabarkan pada halaman 42:

- a. Meningkatkan produksi, produktivitas, dan kualitas produk kelautan dan perikanan;
- b. Meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidayaan ikan, dan pengolah ikan yang adil dan merata; dan
- c. Mengembangkan kawasan Minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di daerah.

4. Persyaratan Penetapan Kawasan Minapolitan

Penetapan Kawasan Minapolitan telah ditetapkan dimasing-masing daerah yang di pilih sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh tiap provinsi. Kawasan Minapolitan dapat ditetapkan sebagai kawasan Minapolitan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Kesesuaian dengan Rencana Strategis, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan/atau Rencana Zonasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) kabupaten/kota, serta Rencana Pengembangan Investasi Jangka Menengah Daerah (RPIJMD) yang telah ditetapkan.
- b. Memiliki komoditas unggulan dibidang kelautan dan perikanan dengan nilai ekonomi tinggi.
- c. Letak geografi kawasan yang strategis dan secara alami memenuhi persyaratan untuk pengembangan produk unggulan kelautan dan perikanan.
- d. Terdapat unit produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran dan jaringan usaha yang aktif berproduksi, mengolah dan/atau memasarkan yang

terkonsentrasi disuatu lokasi dan mempunyai mata rantai produksi pengolahan, dan/atau pemasaran yang saling terkait.

- e. Tersedianya fasilitas pendukung berupa aksesibilitas terhadap pasar, permodalan, sarana dan prasarana produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran, keberadaan lembaga-lembaga usaha, dan fasilitas penyuluhan dan pelatihan.
- f. Kelayakan lingkungan diukur berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, potensi dampak negatif, dan potensi terjadinya kerusakan di lokasi pada masa depan.
- g. Komitmen daerah, berupa kontribusi pembiayaan, personil, dan fasilitas pengelolaan dan pengembangan Minapolitan.
- h. Keberadaan kelembagaan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan.
- i. Ketersediaan data dan informasi tentang kondisi dan potensi kawasan.

5. Revolusi Biru

Penetapan kawasan Minapolitan pada dasarnya diakibatkan oleh kurang maksimalnya pengelolaan sumber daya perairan yang dilakukan masyarakat, pemikiran masyarakat pada saat ini banyak permasalahan yang ditimbulkan karena kesalahan dalam mengelola sumber perairan di dunia, seperti:

Permasalahan mendasar yang di hadapi perikanan saat ini adalah kecenderungan umum terjadinya penurunan produktifitas perikanan di sebagian besar wilayah perairan, lebih-lebih di daerah pantai. Kondisi yang demikian juga di perburuk oleh semakin menurunnya kualitas lingkungan/habitat ikan dan tingginya angka kemiskinan penduduk di beberapa wilayah pelabuhan dunia (Widodo, 2008:187).

Permasalahan tersebut menuntut setiap Negara untuk serius mengatasi permasalahan dalam pengelolaan sumber perairan, tidak terkecuali Negara Indonesia yang berlabelkan sebagai Negara maritim juga dilanda permasalahan yang sama. Mengatasi permasalahan tersebut Negara Indonesia mencanangkan revolusi biru, menurut keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.18/MEN/2011 tentang Pedoman Umum Minapolitan:

revolusi biru adalah perubahan mendasar cara berfikir dari daratan ke kelautan dengan konsep pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan produksi kelautan dan perikanan melalui pengembangan Minapolitan yang insentif, efisien, dan terintegrasi guna meningkatkan pendapatan rakyat yang adil, merata, dan pantas. Revolusi biru mempunyai empat pilar yaitu: 1) merubah cara berfikir dan orientasi pengembangan dari darat ke maritim, 2) pembangunan berkelanjutan, 3) meningkatkan produksi kelautan dan perikanan, 4) meningkatkan pendapatan rakyat yang adil, merata, dan pantas.

Pengertian lain dari revolusi biru dinyatakan oleh Khaeron(2012:18) yang biasa menyebutnya dengan asas *archipelago* merupakan:

Pengertian sebagai bangsa maritim mencakup cara pandang dan nilai dalam memperlakukan laut dan daratan sebagai satu kesatuan dengan laut sebagai asasnya. setelah itu, terbentuk budaya perikanan dan perilaku masyarakat Indonesia yang memperlakukan laut sebagai sistem besar yang lingkup daratan dan merangkai keduanya menjadi satu kesatuan (Khaeron, 2012:18)

Pada saat ini, kondisi ekonomi, sosial, dan budaya perikanan Indonesia mengalami perubahan mendasar meskipun hal ini kalah monumental dengan deklarasi Djoeanda. Meski perubahan-perubahan sudah nampak, masih banyak persoalan mendasar yang perlu mendapat penanganan segera dengan melibatkan partisipasi aktif semua *stakeholder* yang ada. Pemerintah telah berusaha keras untuk mewujudkan kebijakan yang prokelautan dan bersama-sama dengan masyarakat membangun kelautan Indonesia seperti yang dilakukan masyarakat bersama pada cabinet Djoeanda.

Perubahan penting kebijakan kelautan telah dilakukan pada era cabinet Djoanda. Salah satu perubahan penting itu adalah cara pandang dalam mengelola bumi dan air Indonesia untuk mengembalikan kenyataan sejarah, sosial, dan politik pada wujud aslinya seperti ditunjukkan Sriwijaya, Majapahit, dan semua kerajaan maritim yang pernah ada di kepulauan Nusantara (Khaeron, 2012:14)

Dibentuknya departemen atau yang sekarang disebut Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengurus sektor kelautan adalah sebuah bukti adanya kesungguhan yang semakin nyata untuk mengurus dan menjadikan laut sebagai salah satu pembangunan yang utama pemerintahan revormasi. Perubahan yang dilakukan sudah masuk ke sejumlah persoalan yang benar-benar menjadi kebutuhan nyata masyarakat, misalnya dengan memberdayakan masyarakat nelayan dan pesisir. Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, pembenahan dilakukan dengan tujuan mewujudkan Negara maritim yang kuat.

D. Strategi

1. Pengertian strategi

Pelaksanaan kinerja dibutuhkan strategi yang disusun dengan baik agar dalam pelaksanaan kinerja akan mencapai tujuan yang diharapkan. Suatu strategi sangat baik bagi organisasi karena penyusunan strategi akan dapat menjamin peningkatan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuannya. Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategos*, yang sering digunakan oleh kalangan militer adalah suatu cara untuk memenangkan pertempuran (Salusu, 2000:191). Definisi strategi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (<http://kbbi.web.id>) pada halaman 46:

- a. Ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu dalam perang dan damai
- b. Ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam perang
- c. Rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus

Menurut Suryono (2010:114) strategi merupakan suatu hal yang terus berkembang secara terus menerus untuk menemukan cara-cara baru. Sedangkan Siagian (2002:16) menyebutkan bahwa strategi merupakan analisis yang tepat tentang kekuatan yang dimiliki organisasi, kelemahan yang mungkin melekat pada dirinya, berbagai peluang yang mungkin timbul dan harus dimanfaatkan serta ancaman yang diperkirakan akan dihadapi.

Berdasarkan definisi mengenai strategi diatas pada hakekat nya memiliki persamaan makna bahwa yang dimaksud dengan strategi adalah suatu rencana berupa langkah-langkah yang tertuang dalam bentuk kebijaksanaan yang disusun dengan pertimbangan-pertimbangan yang cermat untuk mengatasi suatu permasalahan tertentu atau dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Tindakan perubahan yang dilakukan melalui pengambilan kebijakan oleh pimpinan untuk mencapai tujuan atau memecahkan persoalan tertentu yang mencakup adanya upaya atau tindakan tertentu, adanya pertimbangan secara wajar, penggunaan sumber daya yang tersedia secara efektif dan upaya mencapai tujuan jangka panjang.

Strategi yang diciptakan oleh organisasi didapat melalui analisis yang bersumber dari pemanfaatan potensi dari organisasi tersebut, hal ini dimaksudkan agar tujuan organisasi dapat tercapai sesuai tujuan yang telah ditentukan. Untuk menganalisis potensi yang akan dimanfaatkan untuk menjadi strategi organisasi yang efektif diperlukan informasi tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang berkaitan dengan kondisi dan situasi perusahaan atau organisasi tersebut. Salah satu metode untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman perusahaan atau organisasi adalah analisis SWOT. Menurut Griffin (2004:228), analisis SWOT adalah evaluasi atas kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknes*) internal suatu organisasi yang dilakukan secara berhati-hati, dan juga evaluasi atas peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) dari lingkungan. Dalam analisis SWOT, strategi terbaik untuk mencapai misi suatu organisasi adalah dengan (1) mengeksploitasi peluang dan kekuatan suatu organisasi, dan pada saat yang sama (2) menetralkan ancamannya, dan (3) menghindari atau memperbaiki kelemahannya.

Analisis SWOT dapat dilakukan dengan mengacu pada matriks analisis lingkungan yang ada. Matriks analisis SWOT dapat dilihat pada tabel 5 halaman 52. Membuat daftar kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman saja tentu tidak cukup. Daftar tersebut harus dibahas, dianalisis, dibandingkan dan dipertentangkan secara cermat. Dengan kata lain analisis SWOT ini harus dikerjakan untuk mendapatkan strategi yang tepat.

Tabel 5. Matriks SWOT

Internal	Kekuatan (<i>Strenghts</i>)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)
	Dituliskan beberapa kekuatan yang dimiliki	Dituliskan beberapa kelemahan yang dimiliki
Eksternal		
Peluang (<i>Opportunity</i>)	Strategi S-O	Strategi W-O
Dituliskan beberapa peluang yang mungkin dihadapi	Strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
Ancaman (<i>Threats</i>)	Strategi S-T	Strategi W-T
Dituliskan beberapa ancaman yang mungkin dihadapi	Strategi yang menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman	Strategi yang meminimalkan kelemahan serta menghindari ancaman

Sumber: Rangkuti (2006:31)

- Strategi S-O

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran organisasi, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang yang sebesar-besarnya

- Strategi S-T

Ini adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang di miliki organisasi untuk mengatasi ancaman.

- Strategi W-O

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara menimalkan kelemahan yang ada.

- Strategi W-T

Strategi ini di dasarkan pada kegiatan yang bersifat *defensive* dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman

Penggunaan Analisis SWOT tersebut dapat membantu peneliti dalam mengidentifikasi permasalahan yang akan di teliti, selain itu analisis SWOT dapat memudahkan menentukan strategi apa yang tepat agar permasalahan yang diteliti dapat menemukan jalan keluar.

2. Syarat strategi

Orientasi strategi adalah bertumpu pada implikasi didalam kehidupan sehari-hari. Agar penyusunan strategi dapat berjalan dengan tepat sasaran dan diimplementasikan secara efektif, maka ada tiga hal mutlak yang perlu diperhatikan:

- a. Strategi yang dirumuskan harus mampu disatu pihak memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang diperkirakan akan timbul dan pihak lain memperkecil dampak berbagai faktor yang sifatnya negatif atau bahkan berupa ancaman bagi organisasi dan kelangsungannya;
- b. Strategi harus memperhitungkan secara realistis kemampuan suatu organisasi dalam menyediakan sumberdaya, sarana, prasarana dan dana yang dipergunakan untuk mengoperasikan strategi tersebut;
- c. Strategi yang telah ditentukan dioprasionalkan secara teliti. Tolok ukur tepat tidaknya suatu strategi bukan terlihat pada proses perumusannya saja, akan tetapi juga mencakup pada operasionalnya atau pelaksanaannya (Siagian, 2002:102-103)

3. Manfaat strategi

Strategi diciptakan oleh suatu organisasi sebagai kelanjutan dari perencanaan kegiatan yang dilakukan. Penentuan strategi ini tentunya tidak terlepas dari rantai kegiatan yang akan dicapai pada masa mendatang. Dalam hal ini David (2002:15) mengungkapkan manfaat dari penetapan strategi pada organisasi antara lain:

- a. Aktivitas formulasi strategi akan mempertinggi kemampuan organisasi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi perusahaan.
- b. Membantu organisasi membuat strategi yang lebih baik dengan menggunakan pendekatan yang lebih sistematis, logis, rasional pada pilihan strategis.
- c. Strategi merupakan sebuah proses bukan keputusan atau dokumen. Tujuan utama dari proses adalah mencapai pengertian dan komitmen dari semua manajer karyawan.
- d. Keterlibatan karyawan dalam formulasi strategi memperbaiki pengertian mereka atas penghargaan produktivitas di dalam setiap perencanaan strategi dengan demikian dapat mempertinggi motivasi karyawan.
- e. Strategi memungkinkan untuk identifikasi. Penentuan prioritas, dan eksploitasi peluang. Memungkinkan alokasi waktu dan sumber daya yang lebih efektif untuk peluang yang teridentifikasi.
- f. Penerapan strategi membuat manajemen perusahaan menjadi lebih peka dan meningkatkan kesadaran atas ancaman external atau luar perusahaan serta pemahaman yang lebih baik mengenai strategi pesaing.

Strategi memungkinkan suatu organisasi atau perusahaan untuk lebih proaktif ketimbang reaktif dalam membentuk masa depan sendiri dan membantu untuk beradaptasi pada perubahan yang terjadi. Hal tersebut memungkinkan suatu organisasi atau perusahaan untuk mengawali dan mempengaruhi aktifitas sehingga dapat mengendalikan tujuan nya sendiri. Aktifitas pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan perusahaan untuk mencegah munculnya masalah

dimasa mendatang. Suatu organisasi atau perusahaan yang menggunakan pedoman strategi sebagai suatu kerangka kerja (*Framework*) untuk menyelesaikan setiap masalah tidak akan merasa bingung dalam berpijak karena sudah mempunyai garis besar rencana kedepan yang penjabarannya melalui strategi sehingga menjadi lebih efektif dalam mengatasi lingkungan yang semakin beresiko.

Secara implisit Siagian (2008:206-209) mengungkapkan manfaat dari penetapan strategi pada organisasi antara lain:

- a. Memperjelas makna dan hakikat suatu perencanaan melalui identifikasi rincian yang lebih spesifik tentang bagaimana organisasi harus mengelola bidang-bidang yang ada di masa mendatang.
- b. Merupakan langkah-langkah atau cara yang efektif untuk implementasi kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Sebagai penuntun/rambu-rambu dan arahan pelaksanaan kegiatan berbagai bidang.
- d. Dapat mengetahui secara kongkrit dan jelas tentang berbagai cara untuk mencapai sasaran/tujuan serta prioritas pembangunan pada bidang-bidang tersebut berdasarkan kemampuan yang dimiliki;
- e. Sebagian rangkaian dari proses pengambilan keputusan dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan
- f. Mempermudah koordinasi bagi semua pihak agar mempunyai partisipasi dan persepsi yang sama tentang bentuk serta sifat interaksi,

interdependensi dan interelasi yang harus tetap tumbuh dan terpelihara dalam mengelola jalannya roda organisasi, sehingga akan mengurangi atau bahkan menghilangkan kemungkinan timbulnya konflik antar berbagai pihak yang terkait. Dengan demikian strategi dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan upaya dalam menemukan permasalahan sehingga dapat melakukan pengembangan dari permasalahan yang diteliti, selain itu penelitian dilakukan untuk melakukan klarifikasi suatu peristiwa atau suatu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Menurut Sugiyono (2008:11) “penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain”. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak semata-mata ditentukan terlebih dahulu oleh peneliti secara sepihak, melainkan diperoleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan yang menjadi fokus penelitian, dan kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan-kenyataan tersebut (Sugiyono, 2008:213). Pendekatan kualitatif yang digunakan oleh peneliti dapat diperoleh berdasarkan pengalaman partisipan yang nantinya hal tersebut merupakan sumber data dalam penelitiannya.

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan, dan berkaitan dengan tujuan penelitian yang diharapkan peneliti yaitu untuk menjelaskan fenomena dan fakta sosial yang terjadi, maka jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif cocok untuk penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif agar mendapatkan suatu kealaman data secara utuh. Penggunaan metode deskriptif bertujuan untuk dapat melukiskan segala gejala yang ada dan bisa mengidentifikasi masalah-masalah yang diteliti.

B. Fokus Penelitian

Menurut Sugiyono (2008: 207), fokus penelitian merupakan pokok permasalahan yang didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial. Adapun Fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Strategi pengembangan kawasan Minapolitan budidaya rumput laut di Kabupaten Lombok Barat:
 - a) Perluasan areal budidaya
 - b) Peningkatan jumlah pembudidaya
 - c) Pengembangan Teknologi Budidaya
 - d) Penguatan Permodalan
2. Faktor-faktor pelaksana program pengembangan kawasan Minapolitan budidaya rumput laut di Kabupaten Lombok Barat:
 - a) Faktor Pendukung
 - 1). Menganalisis Kekuatan (*Strenghts*)
 - a. Adanya keputusan menteri kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2010

- b. kerjasama antara pihak ketiga dalam realisasi program
- c. Adanya bantuan program pendukung yaitu CCD-IFAD
- d. Bantuan pembinaan dari tenaga ahli kepada masyarakat pembudidaya rumput laut

2). Menganalisis Peluang (*Opportunity*)

- a. Hasil produksi rumput laut yang sangat diminati
- b. Masih adanya lahan pembudidayaan yang belum dimanfaatkan oleh pembudidaya untuk budidaya rumput laut
- c. Daerah pembudidayaan yang sangat strategis
- d. Pemberian bantuan bibit unggul dan teknik budidaya baru

b) Faktor Penghambat

1). Menemukan faktor Kelemahan (*Weakness*)

- a. Belum adanya tindak lanjut dari *Stakeholder* yang tergabung dalam program Minapolitan
- b. Keterbatasan tenaga ahli dalam pengimplementasian program Minapolitan
- c. Masyarakat pembudidaya yang masih belum terlalu menguasai teknologi budidaya yang moderen
- d. Masih sulitnya para pembudidaya mendapatkan modal

2). Menemukan faktor Ancaman (*Threats*)

- a. ketidak stabilan harga jual rumput laut basah ataupun kering yang berlaku dipasaran

- b. Masih banyaknya pembudidaya yang belum membudidayakan rumput laut secara terus-menerus
- c. Perubahan iklim yang tidak menentu
- d. Adanya perkembangan penyakit/parasit yang menjangkiti tumbuhan rumput laut

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti akan melakukan sebuah penelitian. Berdasarkan lokasi penelitian ini, peneliti memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang telah ditetapkan. Lokasi penelitian yang dipilih peneliti adalah Kabupaten Lombok Barat, hal tersebut dikarenakan Kabupaten Lombok Barat merupakan daerah pengembangan kawasan Minapolitan sesuai dengan keputusan Nomor KEP.32/MEN/2010 yang menetapkan Kabupaten Lombok Barat Sebagai daerah pengembangan kawasan Minapolitan Budidaya, selain itu Kabupaten Lombok Barat merupakan Kabupaten terbesar di Pulau Lombok dan merupakan Kabupaten yang memiliki garis pantai yang panjang dengan keanekaragaman hayati di dalamnya.

Situs penelitian adalah tempat atau peristiwa yang di dalamnya peneliti dapat mengamati keadaan sebenarnya dari obyek penelitian sehingga peneliti mendapatkan data yang valid, akurat dan benar-benar dibutuhkan dalam penelitian. Situs dalam penelitian ini adalah pada kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat.

D. Sumber Data

Data yang dimaksud dalam penelitian adalah sekumpulan informasi atau fakta yang berkaitan dengan kepentingan penelitian yang sedang dilakukan. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut Ruslan (2008:138) data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, dan secara langsung dikumpulkan oleh peneliti. Sedangkan data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat pihak lain). Dalam penelitian yang menjadi sumber data adalah:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber atau pihak yang memiliki kewenangan data atau informasi yang dibutuhkan. Data primer berupa hasil wawancara dengan petugas terkait dalam hal ini dari Pejabat terkait di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat seperti. Kepala Bidang perikanan Budidaya, Kepala Bidang Pengawasan dan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kepala Seksi Produksi Budidaya, Tenaga Pelaksanaan Program CCD-IFAD, Masyarakat Pembudidaya rumput laut di Desa Buwun Mas.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau data yang telah diolah oleh pihak lain. Data sekunder berupa Program kerja, Rencana strategis, laporan capaian kinerja program Minapolitan rumput laut, Laporan pelaksanaan program pemberdayaan

masyarakat pesisir, Laporan target dan realisasi Pencapaian hasil Produksi rumput laut dan Pendapatan Pembudidaya rumput laut, yang semua itu didapat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengertian teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2008: 225) adalah langkah strategis untuk mendapatkan data. Dengan demikian, teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Data Observasi merupakan data yang didapat melalui hasil *Survey* lapangan yang mengamati secara langsung kejadian-kejadian terhadap objek penelitian. Metode observasi dilakukan untuk mengamati dinamika dan gambaran perilaku masyarakat yang sebenarnya kemudian dikembangkan untuk mendapat kesimpulan dari Data obserfasi tersebut. Data observasi yang dipakai peneliti dalam penelitian ini berupa: hasil pengamatan peneliti terhadap kegiatan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat dalam pelaksanaan strategi pengembangan kawasan Minapolitan di Kabupaten Lombok Barat, kegiatan pembudidayaan rumput laut di Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat.

2. Wawancara (*Interview*)

Kegiatan wawancara peneliti dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada para informan yang terdiri atas Pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dengan narasumber Bapak sawal dan Bapak Asfin, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat dengan narasumber Bapak Ir. Misbah, Ibu Ir. Sri Susilowat, Bapak M. Irham. S.Pi, Bapak Uki. Warga pembudidaya rumput laut di dasa Buwun mas dengan narasumber bapak Kadis, bapak Joni, Bapak Badawi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan oleh peneliti untuk mengabadikan berbagai data yang didapat dari situs penelitian, dokumentasi dalam penelitian ini meliputi: pengarsipan segala dokumen terkait pelaksanaan strategi pengembangan kawasan Minapolitan di Lombok Barat, merekam proses wawancara dengan berbagai pihak terkait. Melalui dokumentasi ini peneliti lebih mudah dalam penyusunan laporan skripsi karena data telah tersedia dan bisa langsung disajikan serta dianalisis.

F. Instrumen Penelitian

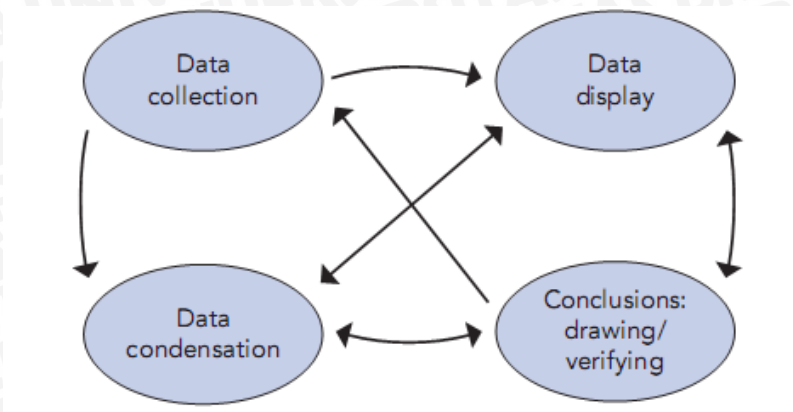
Instrumen penelitian dimaksudkan sebagai suatu alat yang mendukung untuk mengumpulkan, memperoleh data dalam rangka memecahkan masalah dan

mencapai tujuan penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pedoman wawancara yaitu berupa daftar pertanyaan yang diajukan pada informan. Hal ini sangat berguna dalam mengarahkan peneliti dalam pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai fenomena atau fakta yang sedang diteliti.
2. Perangkat penunjang lainnya yaitu meliputi buku catatan, alat tulis, dan alat perekam yang digunakan untuk mencatat apa yang di dengar, dilihat, dialami, dan yang dipikirkan dan juga untuk merekam percakapan wawancara dalam penelitian dalam rangka pengumpulan data di lapangan.

G. Analisis Data

Analisis data merupakan dasar dalam melaksanakan penelitian agar penelitian tersebut dapat terarah dan mendapat inti dari permasalahan yang ada, sehingga memudahkan peneliti untuk mengidentifikasi permasalahan dan menyusun hasil penelitian yang didapati di lapangan. Analisis yang di gunakan penelitian yakni menggunakan analisis data kualitatif, mengikuti konsep dari Miles dan Huberman. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data condensation* (kondensasi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan atau *ferivikasi*). Alur kegiatan analisis data interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Saldana (2014) dapat dilihat pada halaman 61:



Gambar 1. Komponen dalam analisis data (*inetractive model*)

Sumber : Miles, Huberman dan Saldana (2014)

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses awal yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mendapatkan data yang valid. Proses ini dilakukan melalui observasi ke lapangan, wawancara dengan berbagai pihak yang terkait dengan permasalahan, serta dokumentasi berupa foto.

b. Kondensasi Data

Kondensasi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan dan transformasi data mentah yang didapat dari lapangan. Kondensasi data berlangsung terus-menerus selama penelitian bahkan sebenarnya kondensasi data dapat dilakukan sebelum data terkumpul secara menyeluruh. Kondensasi data dilakukan dengan cara, data yang diperoleh di lokasi penelitian dituangkan dalam uraian atau laporan secara lengkap dan terinci. Laporan lapangan disederhanakan, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya, hal ini dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian

berlangsung dan pada tahap analisa data yang lain yaitu penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

c. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya (Sugiyono, 2008:95). Di dalam proses ini terdapat sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan maupun verifikasi. Dengan melihat penyajian data, peneliti dapat lebih memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

d. Menarik Kesimpulan atau Ferivikasi

Proses ini merupakan proses terakhir dalam metode atau model interaktif. Prosesnya dapat dilakukan secara fleksibel, tetapi tetap terbuka dan dirumuskan secara jelas, rinci, dan mengakar. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori (Sugiyono, 2012 : 99).

Adapun langkah-langkah analisis data penelitian yang akan dilakukan adalah:

1. Menganalisis strategi Pengembangan Kawasan Minapolitan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat

2. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program

Minapolitan berdasarkan temuan lapangan

Merumuskan strategi SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, and Threats*)

berdasarkan strategi yang telah ada dan kondisi lapangan berdasarkan hasil wawancara, dengan melihat kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Lombok Barat

a. Kondisi Geografis

Kabupaten Lombok Barat termasuk salah satu dari 10 (sepuluh) kabupaten/kota yang secara administrasi berada dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Secara geografis, Kabupaten ini berada di $115^{\circ} 49,12' 04''$ - $116^{\circ} 20' 15,62''$ Bujur Timur, dan $8^{\circ} 24' 33,82''$ - $8^{\circ} 55' 19''$ Lintang Selatan. Dengan luas wilayah sebesar 1.053,92 Km² yang dikelilingi garis pantai sepanjang 120 km serta pulau-pulau kecil (gili) sebanyak 23 pulau. Kabupaten Lombok Barat di Sebelah Utaranya berbatasan dengan Kabupaten Lombok Utara, sedangkan sebelah Selatannya berbatasan dengan Samudra Indonesia.



Gambar 2. Peta Wilayah Administratif Kabupaten Lombok Barat

Sumber: Kabupaten Lombok Barat dalam Angka, 2014

Kabupaten Lombok Barat mempunyai luas wilayah 1.053,92 KM dan terbagi atas 10 kecamatan, 3 kelurahan dan 119 desa serta 796 jumlah dusun. Kecamatan Gerung merupakan Ibu Kota Kabupaten sekaligus sebagai pusat pemerintahan. Adapun untuk luasan wilayah tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Barat pada tabel berikut:

Tabel 6. Luas Kabupaten Lombok Barat Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Persentase (%)
1	SEKOTONG	529,38	50,23
2	LEMBAR	62,66	5,95
3	GERUNG	62,30	5,91
4	LABUAPI	28,33	2,69
5	KEDIRI	21,64	2,05
6	KURIPAN	21,56	2,05
7	NARMADA	107,62	10,21
8	LINGSAR	96,56	9,16
9	GUNUNGSARI	89,74	8,51
10	BATU LAYAR	34,11	3,24
Jumlah		1.053,92	100,00

Sumber: Kabupaten Lombok Barat Dalam Angka, (2014:6)

b. Topografi

Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang keadaan geografisnya menguntungkan. Pemandangan alamnya yang indah, tanah yang subur, serta cadangan air yang melimpah menjadi potensi yang dimanfaatkan dengan baik oleh Kabupaten ini. Kondisi alam Kabupaten Lombok Barat sangatlah beragam banyak terdapat wilayah dataran tinggi pada daerah utara dan selatan Kabupaten Lombok Barat, dataran tinggi yang terletak di kabupaten Lombok Barat rata-rata memiliki tinggi 0-2.000 meter diatas permukaan laut. Tidak hanya dataran tinggi saja yang di miliki oleh

Kabupaten Lombok Barat adapun dataran rendah dan terdapat beberapa sungai yang mengelilingi Kabupaten Lombok Barat, dapat dilihat dari tabel berikut:

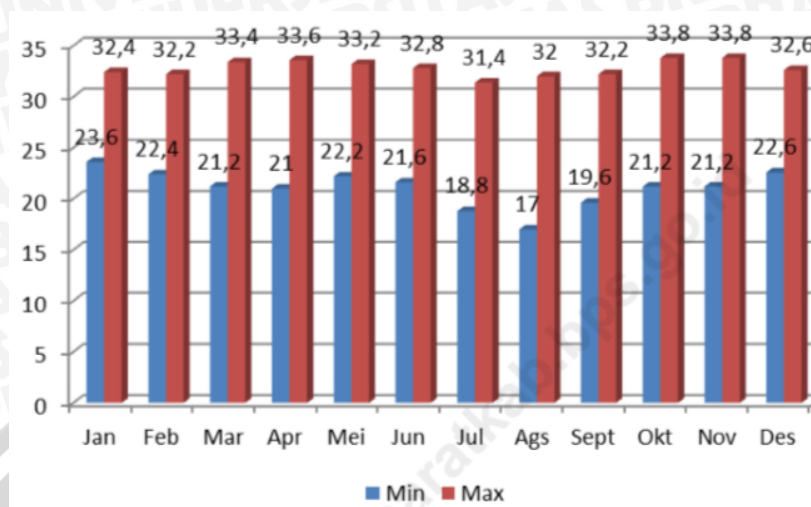
Tabel 7. Jumlah Sungai yang ada di Kabupaten Lombok Barat

No.	Kecamatan	Banyak Sungai	Nama Sungai
1	Sekotong	2	- Kelep - Pelangan
2	Lembar	1	- Jelanteng
3	Gerung	1	- Dodokan
4	Labuapi	1	- Bebak
5	Kediri	1	- Paku keling
6	Kuripan	2	- Sulin/ Lendang Lekong - Dalem/ Batu Kumbung
7	Narmada	1	- Jangkok
8	Lingsar	3	- Midang - Jangkok - Ancar
9	Gunung Sari	1	- Meninting - Midang
10	Batu Layar	1	- Meninting

Sumber: Kabupaten Lombok Barat Dalam Angka (2014:11)

Dari tabel tersebut dapat dilihat jumlah sungai yang mengelilingi Kabupaten Lombok Barat berjumlah 15 sungai yang berada di 10 kecamatan di Kabupaten Lombok Barat, tidak heran banyaknya sungai yang mengelilingi Kabupaten Lombok Barat membuat kabupaten ini memiliki sirkulasi air yang lumayan baik. Persebaran sungai yang terdapat di Kabupaten Lombok Barat memberikan pasokan air bagi sektor pertanian untuk mengairi persawahan di Kabupaten Lombok Barat.

Keadaan iklim di Kabupaten Lombok Barat relatif stabil dengan curah hujan, suhu yang stabil sehingga membuat iklim di Kabupaten Lombok Barat cenderung relatif panas, hal ini dapat dilihat dari gambar 3 pada halaman 67:



Gambar 3. Keadaan suhu udara dirincikan tiap bulan di Kabupaten Lombok Barat

Sumber: Kabupaten Lombok Barat dalam Angka, (2014:13)

Dari gambar grafik suhu udara di atas dapat dilihat suhu udara di Kabupaten Lombok Barat cenderung relatif panas. Keadaan suhu udara memiliki rata-rata suhu udara pada tiap bulannya di Kabupaten Lombok Barat mencapai angka tertinggi yaitu 33,8° celsius dan suhu terendah yaitu 17 derajat celsius. hal ini mengakibatkan keadaan suhu udara di Kabupaten Lombok Barat relatif panas.

c. Lambang Daerah



Gambar 4. Lambang Daerah Kabupaten Lombok Barat

Sumber: Kabupaten Lombok Barat dalam angka tahun 2014

Lambang daerah merupakan suatu identitas dari sebuah daerah yang memiliki sistem pemerintahan, hal ini menjadi sebuah identitas yang melekat selama mungkin yang bertujuan untuk membedakan dan memberikan ciri khas daerah yang membedakannya dengan pemerintahan di daerah lain. Lambang Kabupaten Lombok Barat memiliki beberapa arti dari semua simbol-simbol yang ada di lambang yang telah dimiliki, adapun arti dari simbol-simbol yang ada pada lambang Kabupaten Lombok Barat antara lain:

1. PERISAI berbentuk segi lima, melambangkan bahwa rakyat dan Pemerintah Lombok Barat telah mempertahankan dan mengamalkan Pancasila dalam usaha dan tindakan.
2. CAKRA senjata berbentuk bulat mempunyai empat trisula dapat dipakai untuk menangkis dan menyerang dari segala arah, ini melambangkan bahwa seluruh penduduk Lombok Barat dengan semangat persatuan membela kebenaran dan memberantas segala bentuk kebatilan serta senantiasa waspada terhadap segala penyelewengan terutama yang membahayakan.
3. KUBAH melambangkan sifat taqwa mengandung arti bahwa penduduk Lombok Barat pada umumnya berjiwa patuh dan taqwa menjalankan ibadah menurut agamanya masing-masing. Segala tindakan dan usaha dijalankan semata-mata karena Allah Tuhan Yang Maha Esa.
4. AIR dilukiskan dengan beriak lima dengan garis putih. Ini melambangkan bahwa Lombok Barat kaya dengan mata air, sehingga

sebagian besar daerah ini merupakan daerah pertanian yang subur. Sedangkan garis putih melambangkan keterangan dan ketentraman jiwa penduduknya dalam menunaikan tugas kewajiban sehingga stabilitas sosial politik dan ekonomi selalu dapat segera tercapai.

5. BUNGA TANJUNG (TERATAI) melambangkan keluhuran budi dan tahan uji sebagaimana sifat teratai yang tetap tumbuh pada air besar dan kecil bahkan dalam lumpur, sekaligus bunganya akan tetap menjulang ke atas.
6. BINTANG melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Nur cahaya).
7. Tulisan LOMBOK BARAT dibagian atas yakni Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat.
8. Tulisan PATUT PATUH PATJU artinya:
PATUT: Baik, Terpuji, hal yang tidak berlebih-lebihan
PATUH: Rukun, Damai, Toleransi, Harga menghargai
PATJU: Rajin, Giat, Tak mengenal putus asa.

d. VISI dan MISI

Visi merupakan sebuah pandangan kedepan dari setiap daerah yang bertujuan memberikan tujuan secara terarah untuk mewujudkan tujuan daerah yang lebih baik. Visi Kabupaten Lombok Barat sebagai daerah yang patuh dengan peraturan dan perundang-undangan negara tetap konsisten dengan RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014–2019 sebagai dasar dalam penentuan visi dan Misi daerah. Adapun visi yang ditetapkan adalah sebagai berikut: “ TERWUJUDNYA

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKUALITAS, PARTISIPATIF DAN VISIONER MENUJU LOMBOK BARAT SEJAHTERA ”

Misi merupakan identifikasi tujuan, sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh BAPPEDA sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Misi juga merupakan unsur yang paling fundamental dari sebuah visi, karena fungsi dari misi tersebut adalah menjembatani kondisi saat ini menuju masa depan sesuai dengan harapan yang ingin dicapai melalui suatu tindakan tertentu.

Adapun misi BAPPEDA Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang efektif dan berkualitas;
2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya dan pelayanan umum bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

e. Kondisi Ekonomi

Lokasi Kabupaten Lombok Barat yang strategis karena Kabupaten Lombok Barat terletak dijalur transportasi antar provinsi, selain itu Kabupaten Lombok Barat merupakan kabupaten yang memiliki banyak sekali objek wisata yang dimiliki. Lokasi strategis yang dimiliki oleh Kabupaten Lombok Barat memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan perekonomian daerah khususnya bagi Kabupaten Lombok Barat, hal ini membuat Kabupaten Lombok Barat menjadi daerah yang terkaya dari kabupaten lainnya yang ada di Pulau Lombok. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Barat tidak lepas dari membaiknya perekonomian masyarakat, perbaikan perekonomian Kabupaten

Lombok Barat dapat dilihat dari perolehan *Produk Domestic Regional Bruto* (PDRB) Kabupaten Lombok Barat yang terus meningkat dari tahun 2010 hingga 2014, peningkatan perekonomian berdasarkan *Produk Domestic Regional Bruto* (PDRB) kabupaten Lombok Barat disajikan pada tabel 8 berikut:

Tabel 8. Perkembangan PDRB Kabupaten Lombok Barat Menurut Pengeluaran Tahun 2010-2014 (Juta Rupiah)

Tahun	PDRB adh. Berlaku (juta rupiah)	PDRB adh. Konst. 2010 (juta rupiah)	Laju Pertumb. Berlaku (%)	Laju Pertumb. Konstan (%)
2010	7.011.320	7.011.320	8,20	4,87
2011	7.664.982	7.435.386	9,32	6,05
2012	8.325.952	7.827.193	8,62	5,27
2013	8.985.794	8.238.092	7,93	5,25
2014	10.136.233	8.687.696	12,80	5,46

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014

Berdasarkan tabel 8 perolehan PDRB Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2010 sebesar Rp 7.011 Triliun dan terus bertambah hingga pada tahun 2014 mencapai Rp 10.136 triliun atas dasar harga konstan. Kemajuan perekonomian kabupaten Lombok Barat terlihat dari kemajuan perekonomian tahun 2010 yang bernilai positif. Kemajuan perekonomian pada tahun 2010 berawal dari 4,87 persen, laju pertumbuhan perekonomian Kabupaten Lombok Barat terus meningkat hingga mencapai 5,47 persen pada tahun 2014. Perkembangan perekonomian yang terus melaju positif dari tahun ketahun tidak lepas dari kontribusi masing-masing aspek perekonomian daerah, selain itu dampak yang dirasakan dengan adanya peningkatan perekonomian daerah akan memberikan pengaruh kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan angka

kemiskinan. Tonggak posisi perekonomian yang ditetapkan Pada tahun 2010 memberikan banyak kontribusinya, salah satu sektor yang menyumbang kontribusi terbesar yaitu pada sektor konsumsi rumah tangga. Hingga akhir tahun 2014 konsumsi rumah tangga selalu memberikan kontribusi lebih dari 80 persen, hal itu yang mengakibatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat di Kabupaten Lombok Barat dinyatakan membaik.

B. Gambaran umum Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat memiliki tugas pokok dan fungsi yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor: 9 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah pada dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas pokok Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat adalah melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang kelautan dan perikanan dengan menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana strategis bidang kelautan dan perikanan;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perikanan budidaya, perikanan tangkap, pengawasan dan pengelolaan

pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;

- d. Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang kelautan dan perikanan;
- e. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang kelautan dan perikanan;
- f. Pelaksanaan kegiatan tata kelola dan penata usahaan Dinas Kelautan dan Perikanan, dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

Pelaksanaan tugas dan wewenang setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat berjalan sesuai keinginan dibutuhkan kelompok kerja yang bisa menjalankan pemerintahan khususnya bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Barat, hal ini sudah diatur dalam Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 33 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat, Susunan Organisasinya terdiri dari: Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Perikanan Budidaya, Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Bidang Pengawasan dan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun tugas sekretariat dan masing-masing bidang pada halaman 74:

A. Sekretariat:

Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, umum, keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan kantor.

B. Bidang Perikanan Budidaya:

Melaksanakan sebagian tugas dinas dan membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan di bidang perikanan budidaya yang meliputi usaha budidaya, pengembangan produksi, sarana dan prasarana, pembenihan dan kesehatan lingkungan.

C. Bidang Perikanan Tangkap:

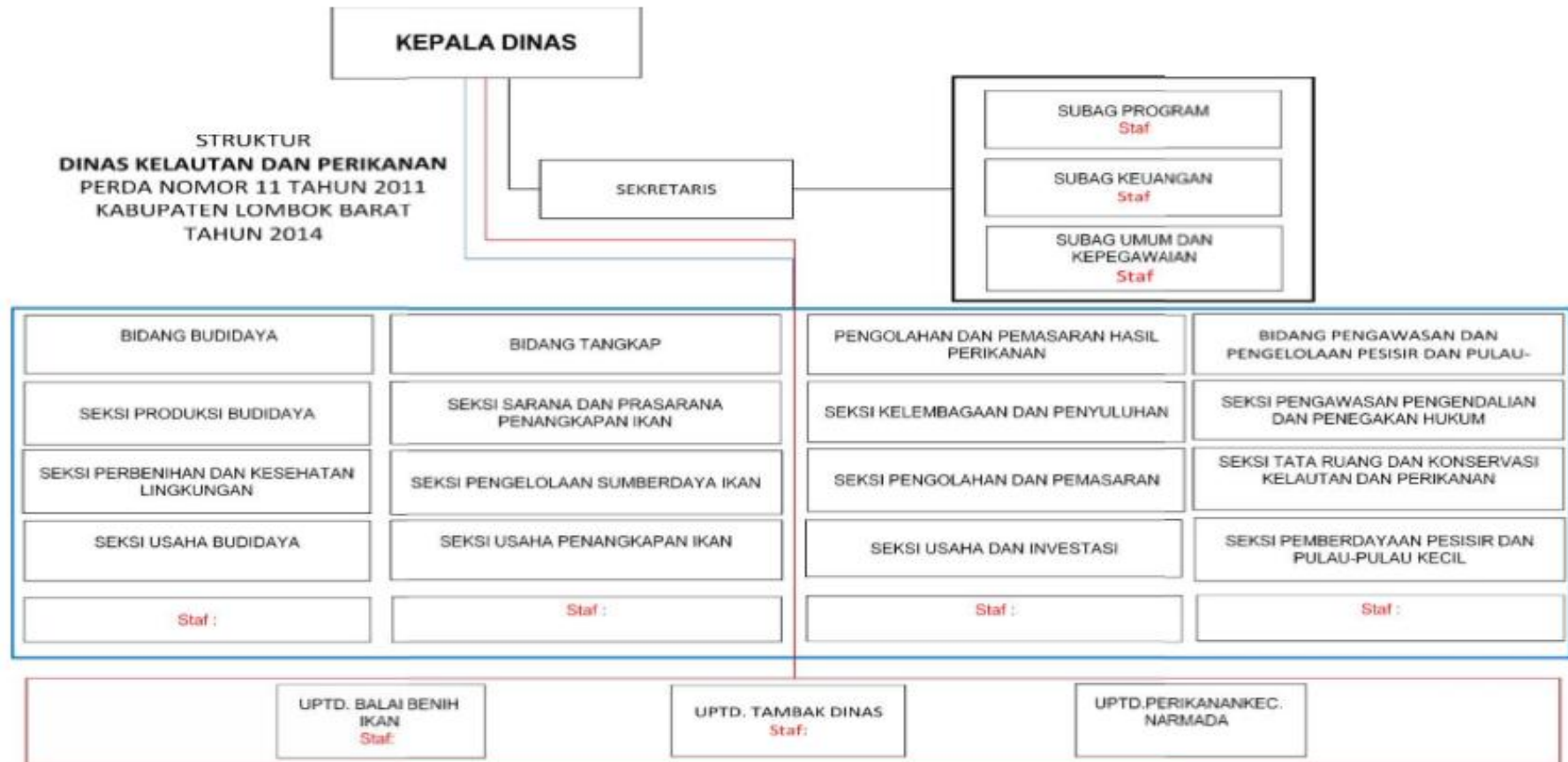
Melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap, pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap, pengelolaan sumber daya ikan dan pengembangan usaha penangkapan.

D. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan:

Melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pengolahan dan pemasaran, pelayanan usaha dan investasi, kelembagaan dan penyuluhan

E. Bidang Pengawasan dan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil :

Melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum, tata ruang dan konservasi kelautan dan perikanan, pemberdayaan pesisir dan pulau-pulau kecil.



Gambar 5. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat

3. Visi dan Misi

a. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan (Pasal 1 ayat 12 UU No. 25 Tahun 2004). Visi harus menggambarkan bagaimana wujud akhir yang diinginkan oleh suatu organisasi pada akhir periode perencanaan. Visi memegang peranan penting dalam menentukan ke mana arah yang akan dituju oleh suatu organisasi pada masa mendatang. Dalam pembangunan kelautan dan perikanan, keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestarian sumber daya menjadi pertimbangan utama dan harus diupayakan secara konsisten. Kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan tidak saja dimanfaatkan untuk masyarakat saat ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Oleh karena itu, visi pembangunan kelautan dan perikanan adalah: "Terwujudnya masyarakat kelautan dan perikanan yang maju, mandiri, dan bermartabat dengan dilandasi nilai patut, patuh, patju".

a. Kata "Maju" mengandung arti mempunyai kualitas dan kemampuan untuk berprestasi dan berdaya saing, sehingga masyarakat Kabupaten Lombok Barat dapat sejajar atau bahkan lebih tinggi dari daerah lain, ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup dan tercukupinya segala kebutuhan kehidupan masyarakatnya.

b. Kata "Mandiri" mengandung arti mampu sejajar dengan daerah lain dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri sehingga

mampu bersaing dengan sehat didasari keyakinan akan potensi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

- c. Kata “Bermartabat” mengandung arti harkat atau harga diri yang menunjukkan eksistensi atau identitas (jati diri) masyarakat Lombok Barat yang dapat dijadikan teladan karena ketaqwaan, kemakmuran, kebersihan, ketertiban, ketaatan, keamanan dan berkeadilan. Jadi masyarakat yang memiliki harga diri, kehormatan, keadilan dan harkat kemanusiaan.

Sedangkan arti Patut, Patuh, Patju adalah sebagai berikut:

- PATUT : Baik, terpuji, hal yang tidak berlebih-lebihan
- PATUH : Rukun, taat, damai, toleransi, saling harga menghargai
- PATJU : Rajin, giat, tak mengenal putus asa

b. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi (Pasal 1 ayat 13 UU No. 25 Tahun 2004). Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan suatu daerah/organisasi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani, serta nilai-nilai yang dapat diperoleh. Berkaitan dengan perumusan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013, maka perlu diperhatikan relevansi dan dukungannya terhadap pencapaian Misi Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010-2014 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010-2014. Dalam rangka pencapaian visi dimaksud, perlu ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya.
2. Meningkatkan peran sektor perikanan dan kelautan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi.
3. Meningkatkan dan memelihara daya dukung serta kualitas lingkungan perairan tawar, pesisir, pulau-pulau kecil dan lautan.
4. Meningkatkan kecerdasan dan kesehatan masyarakat melalui peningkatan konsumsi ikan.
5. Meningkatkan peran laut sebagai pemersatu dan peningkatan budaya bahari.

4. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Barat dalam kerangka pembangunan jangka menengah daerah adalah:

1. a. Menurunkan jumlah masyarakat miskin di wilayah pesisir melalui perluasan jangkauan pemberdayaan masyarakat.
- b. Meningkatkan produksi perikanan yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja di sektor kelautan dan perikanan.
2. a. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara lestari

- b. Meningkatkan produksi perikanan
 - c. Mendukung peningkatan PAD
3.
 - a. Menurunkan tingkat kerusakan ekosistem pesisir dan laut serta perairan tawar secara berkesinambungan
 - b. Peningkatan sistem pemanfaatan dan pengelolaan potensi kelautan dan perikanan secara berkelanjutan
 - c. Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan kerusakan potensi sumber daya kelautan dan perikanan
4.
 - a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan nelayan dan masyarakat kelautan dan perikanan.
 - b. Meningkatkan konsumsi ikan untuk meningkatkan kualitas pemenuhan gizi masyarakat.
5.
 - a. Meningkatkan investasi dan penanaman modal.
 - b. Mengembangkan dan memperkuat kerjasama antar daerah.
 - c. Mengembangkan mutu hasil dan pemasaran.
- b. Sasaran

Adapun sasaran pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten

Lombok Barat tahun 2014 adalah:

1.
 - a. Tercapainya usaha penurunan jumlah masyarakat miskin di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebesar 65%;
 - b. Bertambahnya sarana dan prasarana bidang kelautan dan perikanan;

2. a. Diterapkannya teknologi hasil kajian teknologi tepat guna;
b. Tercapainya hasil produksi perikanan 47.406 ton;
c. Tercapainya target PAD sebesar Rp. 465.000.000;
3. a. Adanya penurunan kerusakan ekosistem pesisir dan laut serta kegiatan pemanfaatan SDKP yang bersifat destruktif hingga mencapai 5% per tahun;
b. Disusunnya peraturan tentang usaha-usaha perikanan;
c. Terlaksananya pengawasan perairan oleh Pokmaswas

5. Program Kerja

Pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki sejumlah program kerja yang sudah ditetapkan melalui renstra tahun 2014-2019 yang dibagi menjadi dua program yaitu program urusan wajib dan program urusan pilihan. Program-program tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Program Urusan Wajib

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2. Program Urusan Pilihan

- b. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

- d. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
- e. Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat
- f. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
- g. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
- h. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
- i. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
- j. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Tawar
- k. Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Tim Statistik Kelautan dan Perikanan

6. Sumber Daya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok

Barat

Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat terbagi menjadi dua yaitu jumlah pegawai dan sarana-prasarana penunjang. Adapun rincian sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat yang dapat dilihat pada tabel 9 dan 10 pada halaman 82:

Tabel 9. Jumlah Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah
1	S2	3
2	S1	25
4	SMA/SMK	20
5	SMP	4
6	SD	1
Jumlah		53

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat tahun 2014

Tabel 10. Sarana dan Prasarana Pokok Dinas Perikanan Kabupaten Lombok Barat

No	Sarana Prasarana	Jumlah
1	Gedung Kantor dinas	1 di Gerung
2	Balai Benih ikan Air Tawar	1 di Peteluan Indah Lingsar
3	Pasar Benih ikan	1 di Sigerongan Lingsar
4	Tanah Balai Benih Ikan air Tawar	1 di Kuripan
5	Tambak dinas	1 di Empol Sekotong
6	Mobil Station Wagon	4 Unit
7	Mobil Pickup	2 Unit
8	Mobil Double Cabin	1 Unit
9	Sepeda Motor	37 Unit

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat tahun 2014

C. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Strategi Pengembangan Kawasan Minapolitan Budidaya Rumput

Laut dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Pesisir

a. Perluasan Areal budidaya

Perluasan areal budidaya khususnya pada budidaya rumput laut dilakukan untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang ada, mengingat pemanfaatan budidaya rumput laut masih kurang yang mana pemanfaatan budidaya rumput laut di Kabupaten Lombok Barat baru seluas 1000 Ha dari Potensi areal Budidaya seluas 2900 Ha. Masih belum maksimalnya pemanfaatan potensi budidaya rumput laut tersebut menjadikan belum maksimalnya pemanfaatan SDA khususnya sumberdaya laut yang ada di Kabupaten Lombok Barat, untuk memaksimalkan sumberdaya laut di Kabupaten Lombok Barat pemerintah pusat memberikan terobosan yaitu dengan membuat Program Minapolitan yang di luncurkan pada tahun 2009. Program Minapolitan tersebut memberikan harapan kepada daerah untuk mengembangkan potensi sektor perikanan di daerah, Kabupaten Lombok Barat merupakan daerah yang masuk dalam program Minapolitan tersebut, pernyataan tersebut didapat dari keterangan kepala biro bidang budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat sebagai berikut:

“Kabupaten Lombok Barat termasuk dalam program Minapolitan yang di buat oleh pemerintah pusat, sesuai dengan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan, pada KEPMEN tersebut Kabupaten Lombok Barat ditunjuk sebagai pelaksana program Minapolitan yang bertempat di Pengantap Desa Buwun Mas kecamatan Sekotong. Pelaksana program Minapolitan tersebut sudah

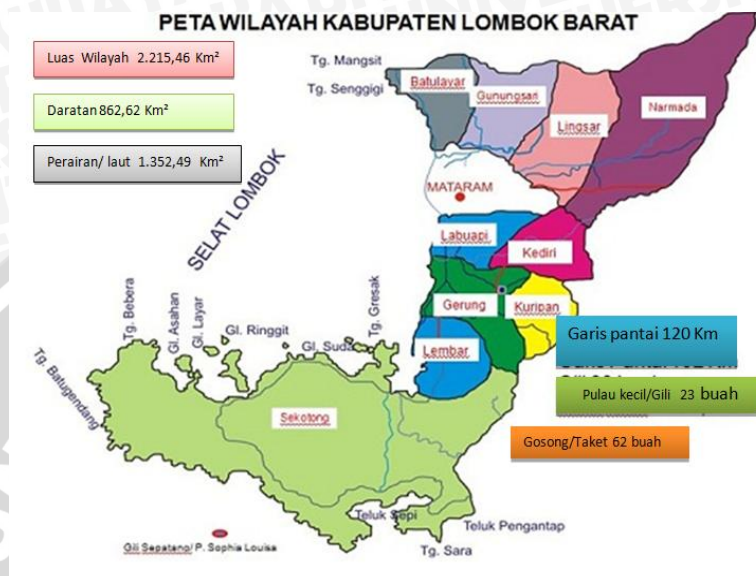
dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Barat mulai tahun 2010 dan Dinas Kelautan dan Perikanan ditunjuk sebagai pelaksanaanya“ (wawancara pada tanggal 9 Oktober 2015, pukul 10.00 di ruangan kepala bagian Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program Minapolitan di Kabupaten Lombok Barat sudah berjalan dari tahun 2010 dan Dinas Kelautan dan Perikanan ditunjuk sebagai pelaksanaanya, hal tersebut dimaksudkan karena Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat merupakan instansi yang memiliki wewenang dan kemampuan dalam bidang tersebut. Pelaksanaan program Minapolitan di Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan agar daerah mampu menjadi mandiri dalam memperoleh pendapatan daerah, selain itu di Kabupaten Lombok Barat masih banyak potensi Sumber daya alam yang masih belum dimanfaatkan secara baik. Dengan adanya program tersebut diharapkan dapat menjadi harapan daerah untuk menumbuhkan upaya kemandirian daerah dalam memperoleh pendapatan daerah.

Perluasan areal kawasan pembudidayaan di Kabupaten Lombok Barat menjadi kunci dasar kemajuan perikanan daerah, dengan adanya program Minapolitan pemerintah daerah dapat terbantu dalam mengembangkan sektor perikanan unggulan daerah. Perluasan areal budidaya yang menjadi harapan pemaksimalan pemanfaatan sumber daya alam yang masih belum bisa dimanfaatkan, untuk pelaksanaan perluasan areal budidaya yang mendasari program Minapolitan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat merancang strategi perluasan areal dengan memetakan potensi pengembangan budidaya. Pemetaan perencanaan pengembangan areal budidaya di Kabupaten

Lombok Barat sudah dirancang oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Lombok Barat yang bisa dilihat pada gambar 6 berikut:



Gambar 6. Pembagian Kawasan Pengembangan Perikanan Budidaya

Keterangan :

- 1 Kecamatan Lingsar untuk Kegiatan Pembenihan dan Pembesaran Ikan air tawar (Ikan Konsumsi dan ikan Hias)
- 2 Kecamatan Gerung, Kuripan, dan Batu Layar untuk Pengembangan Perikanan Budidaya Spesifik Lokasi
- 3 Kecamatan Narmada, Gunung Sari, Labuapi, dan Kediri untuk pembesaran ikan air tawar
- 4 Kecamatan Sekotong dan Lembar untuk pengembangan Budidaya Laut dan Payau

Sumber: Program Kerja Bidang Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014

Potensi pengembangan Budidaya yang ada di Kabupaten Lombok Barat memiliki dua konsentrasi pengembangan yaitu pengembangan budidaya air tawar dan air asin, pada dua sektor pengembangan tersebut dapat dilihat pada gambar diatas yang dimana sudah dibedakan jenis pengembangan budidaya dengan membedakannya menggunakan warna yang sudah ditentukan. Penentuan lokasi-lokasi pengembangan budidaya di daerah-daerah yang terpilih merupakan daerah yang berpotensi untuk melakukan proses pembudidayaan, dengan penentuan lokasi tersebut pemerintah dapat menganalisa potensi-potensi mana saja yang akan menjadi pemasukan bagi daerah. potensi pembudidayaan yang ada di Kabupaten Lombok Barat yang berkembang belakangan hari ini yaitu potensi pembudidayaan laut, hal ini dikarenakan Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan Provinsi yang sedang mengembangkan potensi laut yang salah satunya yaitu pembudidayaan laut. Pembangunan sektor kelautan yang digagas oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan sektor yang diplopori oleh pemerintah Provinsi yaitu program PIJAR (Sapi, Jagung, Rumput Laut).

Program PIJAR merupakan pengembangan program Pemerintah RI yang dikenal dengan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) program tersebut dirancang sebagai sektor andalan dalam pembangunan ekonomi, serta penekanan kembali arti pentingnya sektor pertanian dalam rangka ketahanan pangan, mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan daya saing ekonomi nasional. Menindak lanjuti program tersebut dan melihat potensi yang ada Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan pengembangan 3 (tiga) komoditas unggulan yaitu: sapi, jagung, dan rumput laut yang di singkat menjadi

PIJAR. Berdasarkan program PIJAR dan Minapolitan memberikan peluang pengembangan pembudidayaan rumput laut di Kabupaten Lombok Barat, hal ini dapat mengarah kepada pengembangan pemanfaatan potensi daerah yang lebih baik.

Pemanfaatan potensi daerah dibidang kelautan yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat merupakan bentuk usaha dalam memaksimalkan pendapatan daerah dan sebagai sarana meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Lombok Barat. Dengan program Minapolitan yang merupakan program yang berkonsentrasi dalam pengembangan potensi daerah akan memberikan manfaat yang besar dalam kemajuan kelautan dan perikanan daerah, oleh karena itu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat sebagai koordinator dalam pelaksanaan program tersebut menganalisa potensi daerah mana saja yang akan dijadikan daerah pengembangan budidaya rumput laut di Kabupaten Lombok Barat. Maka untuk merealisasikan program Minapolitan dibidang budidaya rumput laut yang ada di Kabupaten Lombok Barat, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lombok Barat menganalisa potensi areal yang cocok untuk dijadikan pembudidayaan rumput laut di Kabupaten Lombok Barat yang dapat dilihat pada gambar halaman 88:

Sumber: *Profil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat tahun 2014*

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa daerah-daerah yang terpilih menjadi pusat pengembangan budidaya laut berada disebelah Barat Pulau Lombok, lokasi pengembangan budidaya laut tepatnya berada di kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat. Daerah Kecamatan Sekotong dipilih karena daerah tersebut memiliki garis pantai yang cukup luas dan pantai yang masih alami sehingga cocok untuk melakukan proses budidaya laut, hal ini dapat terlihat dari gambar di atas yang menggambarkan perairan pesisir yang diberi warna merah, warna tersebut merupakan potensi lahan pembudidayaan rumput laut di kecamatan sekotong. Penyebaran lahan pembudidayaan rumput laut di Kecamatan Sekotong tersebar di 5 Desa yang ada di Kecamatan Sekotong, Desa yang

berpotensi melakukan pembudidayaan rumput laut antara lain yaitu Desa Candi Manik, Desa Buwun Mas, Desa Sekotong Barat, Desa Batu Putih, dan Desa Pelangan. Berdasarkan ke lima Desa pesisir yang berpotensi untuk dijadikan tempat pembudidayaan laut merupakan desa yang keadaan lautnya masih terjaga dengan baik dan masih sedikitnya pencemaran lingkungan yang terjadi di Desa tersebut.

Pelaksanaan program Minapolitan memberikan manfaat yang besar jika pemanfaatannya dapat dioptimalkan secara maksimal, oleh karena itu pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam hal ini yang berwenang adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat menindak lanjuti program Minapolitan dengan mengkaji lebih dalam dan menyusun strategi yang akan digunakan. Dalam proses perencanaan tersebut diperjelas oleh keterangan dari kepala bagian unit Budidaya sebagai berikut:

“Proses perencanaan program Minapolitan di Kabupaten Lombok Barat diawali dengan penentuan kawasan Minapolitan yang mana dalam hal di kaji dengan potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Lombok Barat, dari kajian tersebut didapat daerah Pengantap Desa Buwun mas sebagai daerah pelaksanaan Program Minapolitan. selanjutnya pemerintah kabupaten Lombok Barat membentuk tim kerja dalam program Minapolitan tersebut, selanjutnya dilakukan penetapan anggaran kerja yang nantinya akan melalui APBD 1 dan APBD 2 “(Wawancara pada tanggal 9 Oktober 2015, pukul 10.00 WITA di ruangan Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat)

Berdasarkan keterangan dari narasumber tersebut dapat diartikan bahwa pelaksanaan program Minapolitan di Kabupaten Lombok Barat sudah melalui proses yang sudah ditentukan oleh Kementerian Perikanan dan Kelautan, pelaksanaan program Minapolitan di Kabupaten Lombok Barat telah dilaksanakan di Pengantap Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong, penetapan Pengantap

sebagai kawasan Minapolitan sudah melalui berbagai pertimbangan dan pengkajian dari beberapa aspek, hal ini dijelaskan oleh bapak Ir. Misbah sebagai Ketua Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat yang mengatakan:

“Penetapan daerah Pengantap Sebagai kawasan Minapolitan sudah melalui berbagai kajian dan pertimbangan dari beberapa pihak yang berkompeten dibidangnya, kemudian kami tindaklanjuti dengan mengeluarkan SK Bupati yang dikeluarkan pada tahun 2010 yang menetapkan daerah Pengantap Desa Buwun Mas sebagai Kawasan Minapolitan di Kabupaten Lombok Barat. kemudian kami juga mengikutsertakan pihak ketiga dalam penentuan kawasan tersebut seperti konsultan perencanaan program yang pada akhirnya menghasilkan Master Plan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Lombok Barat” (wawancara pada tanggal 9 Oktober 2015, pukul 10.00 WITA di ruangan Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat)

Berdasarkan keterangan dari bapak Ir. Misbah selaku kepala bidang budidaya Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat tersebut dapat diartikan bahwa proses penetapan kawasan Minapolitan sudah melalui proses perundingan dari beberapa pihak, penetapan kawasan Minapolitan tersebut kemudian ditindaklanjuti dari pihak Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang sudah Mengeluarkan SK Bupati nomor 1471/XI/Dislutkan/2010 yang mengesahkan daerah-daerah yang ada diwilayah Kabupaten Lombok Barat sebagai kawasan Minapolitan di Kabupaten Lombok Barat. Penetapan daerah-daerah pelaksanaan program Minapolitan yang sudah ditetapkan melalui SK Bupati nomor 1471/XI/Dislutkan/2010 sudah dikaji oleh beberapa pihak yang menghasilkan beberapa daerah, daerah pelaksanaan program Minapolitan di Lombok Barat dapat dilihat pada tabel 11 pada halaman 91:

Tabel 11. Daerah Potensi Pengembangan Minapolitan Budidaya Rumput Laut Kabupaten Lombok Barat

No	Kecamatan/Desa/Dusun/Gili	Potensi (Hektar)
1	Desa Labuan Tereng -Teluk Lembar -Teluk Buwur	200
2	Desa Buwun Mas -Nambung -Pengantap -Gresek Pengantap -Ombul Pengantap -Teluk Sepi	500
3	Desa Sekotong Barat -Bangko Palut Medang -Gresak Medang -Tawun -Batu Kijuk -Pandanan -Gili Sudak -Gili Tangkong -Gili Gede -Gili Genting -Gili Rangit -Gili Nanggu	1500
4	Desa Batu Putih -Bangko-Bangko -Ketapang -Labuan Poh -Pemalikan -Pandanan -Siung	500
5	Desa Pelangan -Teluk Mekaki	200

Sumber: Program Pengembangan Kawasan Minapolitan Usaha Budidaya Rumput laut Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013

Berdasarkan tabel 11 dapat dilihat bahwa daerah yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Barat memiliki potensi lahan pengembangan budidaya laut yang cukup banyak untuk dimanfaatkan, sehingga penentuan lokasi yang sudah ditetapkan melalui SK Bupati nomor 1471/XI/Dislutkan/2010 akan memberikan pemetaan potensi pembudidayaan rumput laut yang lebih jelas. Lokasi perencanaan pengembangan yang sudah ditentukan tersebut nantinya akan dikaji lebih lanjut oleh pemerintah agar lokasi yang sudah ditetapkan akan menjadi lokasi yang benar-benar akan memberikan sumbangsih dibidang pertumbuhan ekonomi kelautan dan perikanan daerah.

Pengembangan areal budidaya rumput laut di 2 wilayah yang sudah ditentukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat memberikan kontribusi yang cukup membantu bagi kemajuan perikanan Kabupaten Lombok Barat. Usaha yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat untuk mengembangkan usaha perikanan di Kabupaten Lombok Barat sudah mampu memberikan kontribusi bagi daerah. kontribusi yang dihasilkan oleh sektor perikanan budidaya laut memang belum begitu berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, namun hal ini merupakan kemajuan yang bagus dalam pengembangan kemandirian daerah. Perkembangan areal budidaya perikanan Kabupaten Lombok Barat dapat dilihat pada tabel 12 pada halaman 93:

Tabel 12. Luas Areal Budidaya Laut dari tahun 2010 sampai 2014

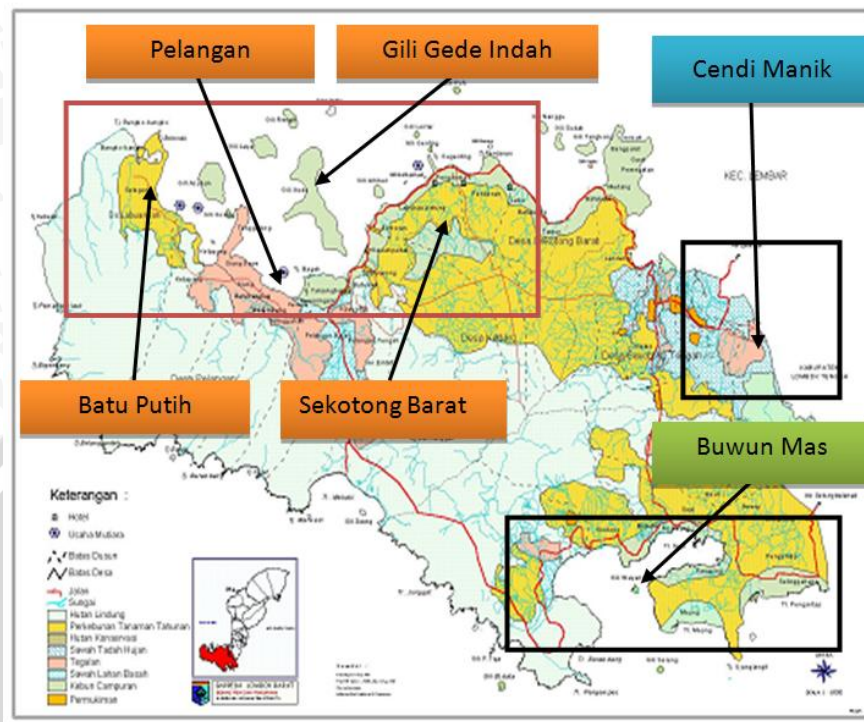
No	Jenis Ikan	Luas Areal (Ha)			
		2011	2012	2013	2014
1	Rumput Laut	183,1	1.944,25	1.000.00	1.000.00
2	Kerapu	-	0,4144	0.40	0.0925
3	Udang Barong/Lobster	-	0,03	0,03	0.03
4	Daging Kerang Mutiara	2.983	2.294	2.294,00	785.00
5	Bawal Bintang	-	-	0,05	0.05
6	Ikan Lainnya	-	-	-	0.05
	Jumlah	3.166,1	4.238.6944	3.294,48	1.785

Sumber: Seksi Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Lombok Barat, 2015

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pemanfaatan lahan pembudidayaan rumput laut dari tahun 2011 sampai 2014 mulai ada pengembangan pemanfaatan lahan yang mulai berkembang, yang pada tahun 2011 pemanfaatan lahan pembudidayaan rumput laut baru 183,1 Ha dan berkembang drastis pada tahun 2012 yang mencapai luas 1.944,25 Ha. Pemanfaatan lahan pembudidayaan rumput laut pada tahun 2011 sampai 2012 yang sangat berkembang tersebut dikarenakan upaya serius Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat dalam mengembangkan sektor perikanan daerah, dan selain itu peningkatan pemanfaatan lahan pembudidayaan rumput laut di Kabupaten Lombok Barat dikarenakan terpilihnya Kabupaten Lombok Barat sebagai daerah pelaksana program Minapolitan yang berasal dari pemerintah pusat sehingga daerah harus serius dalam mensukseskan program tersebut. Namun pada tahun 2013 terjadi penurunan pemanfaatan lahan pembudidayaan rumput laut, hal ini dikarenakan

adanya penurunan pemanfaatan lahan oleh pembudidaya disekitar kawasan pesisir kecamatan sekotong. Penyebab lain dari berkurangnya pemanfaatan lahan pembudidayaan adalah kebanyakan para membudidayaan menyediakan bibit yang dihasilkan oleh mereka sendiri, hal ini mengakibatkan mutu dari rumput laut yang dibudidayakan akan berkurang sehingga berdampak pada hasil panen yang didapat. Penurunan pemanfaatan lahan pembudidayaan rumput laut tidak berpengaruh panjang terhadap hasil produksi, terbukti pada tahun 2014 lahan yang dimanfaatkan masih sama dengan tahun 2013 namun hasil produksi yang didapat pada tahun 2014 meningkat sebesar 2.2 % dari hasil produksi tahun 2013. Pada tahun 2014 hasil yang didapat sebesar 51,258.94 ton, Sementara tahun 2013 tercatat 50,152.34 ton atau mengalami peningkatan sebesar 1,106.6ton.

Pengembangan potensi produk unggulan rumput laut di Kabupaten Lombok Barat yang terletak di dua lokasi yaitu Candi Manik dan Buwun Mas sudah berkembang dari tahun ke tahun, perkembangan tersebut membuat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat berencana akan mengembangkan areal pembudidayaan yang lebih besar. Perencanaan tersebut berlokasi di kecamatan sekotong yang bertempat pada enam lokasi disekitaran kecamatan Sekotong, keenam lokasi tersebut diklasifikasikan dalam tiga kategori yang ditandai dengan warna yang berbeda-beda. Penentuan lokasi tersebut dapat dilihat pada gambar peta yang ada pada halaman 95:



Gambar 8. Peta Perencanaan Perluasan Kawasan Budidaya Laut di Kabupaten Lombok Barat

Sumber: Program Kerja Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Lombok Barat tahun 2014

Pengembangan Kawasan Pembudidayaan rumput laut di kabupaten Lombok Barat telah terpilih enam kawasan yang merupakan kawasan berpotensi dalam pengembangan Budidaya rumput laut, kawasan itu antara lain Candi Manik, Buwun mas, Sekotong Barat, Gili Gede Indah, Pelangan, dan Batu Putih. Kawasan yang telah ditentukan tersebut memiliki potensi yang berbeda-beda hal ini terkait dengan perbedaan geografis, untuk memudahkan pengembangan dibuatlah pengelompokan potensi pembudidayaan yang dibedakan dengan menggunakan perbedaan warna pemetaan lokasi pembudidayaan. Perbedaan lokasi pembudidayaan dibagi menjadi tiga bagian potensi ke tiga lokasi tersebut antara lain mempunyai keterangan pada halaman 96:

1

Sekotong Barat, Batu Putih, Gili Gede Indah, dan Pelangan untuk Pengembangan komoditas kerang-kerangan, Udang, Rumput Laut dan Fin Fish (kerapu, kakap, bawal bintang, dll)

2

Cendi Manik untuk pengembangan udang, kepiting, Rumput Laut Jenis *Gracilaria* dan Fin Fish di areal payau/ Estuarine Zone.

3

Buwun Mas untuk pengembangan Fin fish dan berbagai jenis Rumput laut seperti *Cottonii*, *Spinosum*, dan *sargasum*.

Pengelompokan perencanaan perluasan areal budidaya laut di Kabupaten Lombok Barat yang berkonsentrasi pada daerah Kecamatan Sekotong menekankan beberapa sektor budidaya laut, perluasan areal pembudidayaan di Kecamatan Sekotong mengelompokkan tiga konsentrasi pengembangan antara lain di daerah Sekotong Barat yang mengembangkan komoditas kerang-kerangan, udang, rumput laut, dan(*fin fish*) seperti kerapu, kakap, bawal, dll. Kemudian pada daerah Candi Manik yang mengembangkan komoditas udang, kepiting, rumput laut dan (*fin fish*) diareal payau. Daerah ketiga yang bertempat di Buwun Mas yang mengembangkan komoditas (*Fin Fish*) dan Rumput Laut seperti *Cottonii*, *Spinosum* dan *Sargasum*. Pengelompokan ke tiga areal tersebut dimaksudkan untuk memberikan konsentrasi pengembangan yang terfokus sesuai potensi areal yang dikembangkan, selain itu ke tiga areal pengembangan tersebut memiliki ekosistem dan potensi yang berbeda-beda sehingga dalam proses perluasannya perlu adanya kontrol untuk menentukan langkah yang akan diambil selanjutnya.

b. Peningkatan Jumlah Pembudidaya

Pembudidayaan rumput laut yang dilakukan di daerah Kabupaten Lombok Barat telah terlaksana sejak 10 tahun yang lalu, namun bisa maksimal dilaksanakan mulai 6 tahun terakhir. fokus kegiatan pembudidayaan rumput laut terfokus pada kecamatan sekotong. Awal mula pelaksanaan pembudidaya rumput laut di wilayah sekotong diawali oleh masyarakat pesisir yang mulai kesulitan untuk mendapatkan hasil tangkap yang memadai untuk memberikan pemasukan pada perekonomian mereka, hal ini diperkuat dari keterangan salah seorang masyarakat yang bernama bapak Joni yang merupakan orang yang pertama dalam melakukan pembudidayaan rumput laut di Kecamatan Sekotong yang memberikan penjelasan sebagai berikut:

“dulu disini kita kalau mau dapat uang ngandalin pemasukan mulai dari menangkap ikan seperti gurita, cumi-cumi, dan jenis ikan sesuai musim lah itupun hasilnya tidak seberapa malah bisa tidak ada hasil yang kami dapat saat melaut, rata-rata masyarakat sini yang tinggal di Kecamatan sekotong dulu ada yang jadi tukang jaga ternak, petani, tukang buat batu bata, dan buruh bangunan pokoknya tergantung kalau ada pekerjaan kami lakukan apa yang ada. memang penghasilan tidak terlalu banyak tapi setidaknya bisa buat makan sehari-hari, tapi kebanyakan masyarakat disini ngandalin hasil laut untuk kebutuhan sehari-hari. (wawancara pada tanggal 4 Oktober 2015 pukul 14.53 WITA)

Berdasarkan keterangan yang didapat peneliti dari bapak Joni, menjelaskan bahwa keadaan masyarakat di Kecamatan Sekotong sebelum pelaksanaan pembudidayaan rumput laut rata-rata melakukan pekerjaan bergantung pada musim dan permintaan pekerjaan yang keuntungannya tidak seberapa untuk menjalankan perekonomian mereka. Namun untuk memenuhi perekonomian masyarakat sekotong tetap mengandalkan hasil laut untuk menambah pemasukan dan untuk dikonsumsi pribadi. Dengan permasalahan yang dihadapi oleh

masyarakat pesisir di Kecamatan Sekotong tersebut, munculah gagasan untuk memanfaatkan daerah pesisir yang selama ini belum sangat dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir di Kecamatan Sekotong. Awal munculnya gagasan pemanfaatan lahan pesisir sebagai lokasi pembudidayaan diawali dengan masyarakat di Kecamatan Sekotong yang mendengar keberhasilan masyarakat pesisir Lombok Timur dalam mengembangkan komoditas rumput laut di daerahnya, hal ini diperkuat keterangan dari Bapak Badawi selaku orang yang pertama kali ikut melakukan budidaya di Desa Buwun Mas yang memberikan keterangan sebagai berikut:

“saya dulu mulai budidaya rumput laut awalnya dapat info dari keluarga yang tinggal di Lombok Timur, katanya nelayan di Lombok Timur lagi banyak yang budidayain rumput laut. Jadi dari info itu saya coba datang ke sana dan tanya-tanya tentang budidaya rumput laut. Akhirnya saya sama kelompok nelayan saya nyobain budidaya rumput laut di Desa Buwun Mas ini.”
(wawancara pada tanggal 4 Oktober 2015 pukul 13.23 WITA)

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Bapak Badawi diketahui bahwa awal mula pembudidayaan rumput laut di Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat bermula dari inisiatif Bapak Badawi untuk ikut mengembangkan budidaya rumput laut seperti Kabupaten Lombok Timur yang sukses dalam mengembangkan Budidaya rumput laut, inisiatif Bapak Badawi dalam mengembangkan budidaya rumput laut di Desa Buwun Mas saat itu masih belum maksimal mengingat masih kurangnya pengalaman warga Desa Buwun Mas dalam mengembangkan potensi pesisir yang masih baru bagi mereka. Untuk menangani permasalahan yang dihadapi masyarakat Desa Buwun Mas dalam membantu memaksimalkan pemanfaatan potensi pesisir, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang melihat potensi tersebut berupaya memberikan

bantuan dengan cara melakukan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas bagi masyarakat pesisir yang ada di Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong. Banyak program pemberdayaan yang dilakukan pemerintah untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat khususnya masyarakat pesisir yang ada di Kecamatan Sekotong, salah satunya dengan memberikan terobosan dalam pemanfaatan lingkungan pesisir dengan melakukan bimbingan dalam pembudidayaan rumput laut agar lebih efektif dan efisien. Kecamatan Sekotong merupakan kecamatan yang memiliki daerah pesisir yang berpotensi untuk pembudidayaan rumput laut, untuk itu dengan adanya program pembudidayaan rumput laut harapannya dapat menumbuhkan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat di Kecamatan Sekotong.

Selama awal berjalannya kegiatan pembudidayaan rumput laut, masyarakat Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong memang masih belum maksimal dalam pemanfaatan. Masih banyaknya pembudidayaan rumput laut yang masih menggunakan teknologi yang masih tradisional yang membuat hasil yang didapat tidak begitu maksimal, sehingga membuat minat masyarakat akan pembudidayaan rumput laut pada dahulu kala masih sangatlah rendah. Pemanfaatan potensi budidaya rumput laut yang masih belum maksimal membuat pemerintah Kabupaten Lombok Barat memberikan perhatian untuk membantu memaksimalkan pemanfaatan sumber daya perikanan, hal ini bertujuan untuk memajukan kemandirian daerah dalam hal pengelolaan sumberdaya perikanan daerah. Dengan adanya program Minapolitan memberikan peluang besar dalam memaksimalkan potensi budidaya rumput laut, dalam hal ini Kabupaten Lombok

Barat sebagai salah satu daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ditunjuk sebagai daerah pelaksana program Minapolitan.

Pengembangan program Minapolitan di Kabupaten Lombok Barat sudah ditetapkan melalui SK Menteri No 32 Tahun 2010, selanjutnya ditindak lanjuti oleh daerah dengan menerbitkan SK Bupati nomor 1471/XI/Dislutkan/2010. Untuk menjalankan Program Minapolitan pemerintah Kabupaten Lombok Barat Membentuk POKJA yang ketua oleh Bupati, dalam hal penentuan strategi pemerintah Kabupaten Lombok Barat menunjuk Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai Kordinasi, mentoring, evaluasi, dan pelaporan. Dalam tugasnya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat harus menentukan langkah strategi dalam pengembangan program Minapolitan, selain itu Dinas Kelautan dan Perikanan harus menganalisis potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki Kabupaten Lombok Barat. Pendataan Potensi kelautan di Kabupaten Lombok Barat sudah disusun oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat yang mendata kondisi kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 13. Kondisi Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat

No	Potensi	Besaran
1	Luas Perairan	1.382,4 Km
2	Luas Daratan	1.053,92 Km
3	Garis Pantai Sepanjang	192 Km
4	Pulau-Pulau Kecil	23 Buah
5	Jumlah Pulau-Pulau kecil yang dikelola	6 Buah
6	Potensi Kecamatan/Kecamatan Pesisir	10/5 Kec
7	- Desa/ Desa Pesisir	88/5 Desa

8	Potensi Hutan Mangrove	307,17 Ha
9	- Rusak Ringan	188,83 Ha
10	- Rusak Berat	487, 98 Ha
11	Potensi Rumput laut	2.900 Ha
12	Potensi Tambak garam	279,192 Ha
13	Potensi Terumbu Karang	866,59 Ha
14	- Baik	266,04 Ha
15	- Rusak Ringan	266,04 Ha
16	- Rusak Berat	347,50 Ha
17	Jumlah Prasarana Pos Kawasan SKPD	1 Unit
18	Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI)	187 Unit
19	Jumlah Kawasan Sentra Produksi Perikanan	1 Kawasan
20	Kawasan konservasi	1 Kawasan

Sumber: Master plan Minapolitan rumput laut Kabupaten Lombok Barat tahun 2012

Berdasarkan dari tabel di atas dapat memberi gambaran potensi kelautan dan perikanan Kabupaten Lombok Barat cukup luas untuk dimanfaatkan, hal ini karena luas perairan yang dimiliki oleh Kabupaten Lombok Barat sebesar 1.382,4 km memiliki potensi sumberdaya yang melimpah. Kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki Kabupaten Lombok Barat memberikan keuntungan bagi daerah dalam mengembangkan sektor perikanan daerah, selain itu masih banyaknya potensi perikanan yang belum terlalu dimanfaatkan membuat peluang Kabupaten Lombok Barat masih besar dalam mengembangkan sektor perikanan daerah. Keaneka ragaman hayati yang dimiliki Kabupaten Lombok Barat juga tidak kalah, terbukti Kabupaten Lombok Barat memiliki Garis Pantai Sepanjang 192 Km yang berpotensi memiliki potensi pemanfaatan yang bagus.

Potensi pemanfaatan yang dimiliki dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata maupun sebagai tempat pembudidayaan, banyak pantai-pantai yang sudah dimanfaatkan sebagai objek wisata seperti pantai Sengigi, pantai Sekotong yang merupakan objek wisata yang sudah terkenal. Selain objek wisata pemanfaatan pantai di Kabupaten Lombok Barat juga diarahkan menjadi tempat membudidayakan berbagai jenis potensi laut seperti budidaya mutiara, rumput laut, ikan kerapu, ikan kakap yang memberikan manfaat bagi daerah dan juga masyarakat. Potensi perikanan yang dimiliki oleh Kabupaten Lombok Barat tersebar di beberapa wilayah yang dapat dilihat pada tabel 14 berikut:

Tabel 14. Sebaran Lokasi dan Tingkat Produksi Rumput Laut di Kabupaten Lombok Barat tahun 2013

No.	Kecamatan	Desa	Produksi 2013 (Ton)		
			Tambak	Laut	Jumlah
1.	Sekotong	Batu Putih	-	13.745,67	13.745,67
		Sekotong Barat	-	1.111,19	1.111,19
		Candi Manik	15.068,78	-	15.068,78
		Buwun Mas	-	35.258,14	35.258,14
2.	Lembar	Lembar	2.850,31	-	2.850,31
		Eat Mayang	2.543,53	-	2.543,53
		Labuan Tereng	553,00	-	553,00
Jumlah			21,015.62	50,115.00	71,130.62

Sumber: Seksi Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan pemanfaatan dibidang budidaya yang menjadi salah satu produk unggulan pemerintah Kabupaten Lombok Barat yaitu Budidaya Rumput laut, hal ini karena Budidaya rumput laut di Kabupaten Lombok

Barat menjadi produk unggulan yang masuk dalam program Minapolitan yang digagas oleh pemerintah pusat mulai tahun 2010 yang menetapkan Kabupaten Lombok Barat sebagai daerah Pelaksanaan Program Minapolitan dibidang budidaya rumput laut sesuai dengan SK Menteri Nomor 32 tahun 2010 tentang penetapan kawasan Minapolitan di Indonesia. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sebagai daerah yang terpilih melaksanakan program tersebut mempersiapkan sumber daya alam yang akan dimanfaatkan sebagai tempat pelaksanaan program tersebut, dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat memberikan pemaparan jumlah potensi produksi Pembudidayaan rumput laut yang ada di Kabupaten Lombok Barat, potensi pembudidayaan rumput laut tersebut dapat dilihat pada tabel 12 bahwa potensi Kabupaten Lombok Barat dalam mengembangkan Potensi Rumput laut di daerahnya sangatlah luas dan menguntungkan, terbukti pada tahun 2013 produksi rumput laut yang ada di kabupaten Lombok Barat menghasilkan 71,130.62 ton. Perolehan angka tersebut memberikan gambaran bahwa pemanfaatan Budidaya rumput laut di Kabupaten Lombok Barat sangatlah menjanjikan untuk dimanfaatkan, selain itu pembudidayaan rumput laut tersebut tidak memerlukan perawatan khusus sehingga pembudidayaan rumput laut sangatlah praktis.

Keuntungan dari pemanfaatan potensi lahan pesisir yang digunakan sebagai pembudidayaan rumput laut memberikan keuntungan tidak hanya bagi pemerintah daerah tetapi juga bagi para pembudidayaan yang tinggal di daerah pesisir. Pemanfaatan lahan oleh para pembudidayaan memberikan pemasukan bagi keluarga mereka, pemasukan dari hasil pembudidayaan rumput laut yang

dilakukan oleh masyarakat pesisir di Kabupaten Lombok Barat khususnya pada masyarakat pesisir yang tinggal di Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong memberikan pemasukan bagi kehidupan mereka sehari-hari. Untuk memudahkan pemerintah daerah dalam mendata kekayaan sumber daya alam khususnya disektor kelautan dan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat merincikan Pembudidaya rumput laut di Kabupaten Lombok Barat khususnya di dua Kecamatan tersebut untuk memetakan potensi yang dimanfaatkan oleh masyarakat dalam membudidayakan rumput laut. Dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat memberikan jumlah pembudidaya yang memanfaatkan potensi perairan Kabupaten Lombok Barat untuk kegiatan budaya rumput laut, data tersebut dapat dilihat pada tabel 15 di bawah ini:

Tabel 15. Sebaran Lokasi dan Jumlah Penduduk yang Bekerja dalam Kegiatan Budidaya Rumput Laut di Kabupaten Lombok Barat tahun 2014

No.	Kecamatan	Desa	Jumlah Pembudidaya (RTP)		
			Tambak	Laut	Jumlah
1.	Sekotong	Batu Putih	-	450	450
		Sekotong Barat	-	340	340
		Cendi Manik	345	-	345
		Buwun Mas	-	739	739
2.	Lembar	Lembar	50	-	50
		Eat Mayang	125	-	125
		Labuan Tereng	58	-	58
Jumlah			578	1.529	2.107

Sumber: Seksi Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014

Berdasarkan tabel 15 secara umum kondisi geografis kecamatan sekotong yang berbukit dan bergunung mempengaruhi penyebaran jumlah penduduknya. Dataran rendah yang umumnya terdapat di sepanjang pesisir memiliki sebaran penduduk yang lebih besar dari pada di kawasan yang lebih tinggi. Sehingga dari 16.707 rumah tangga penduduk, lebih dari separuhnya bermukim di dataran yang lebih rendah (pesisir). Keadaan ini tentunya akan berdampak pada pola dan jenis mata pencarian yang mereka usahakan serta pada potensi sumberdaya alam yang ada. Program dan kegiatan sektoral yang mendukung peningkatan perekonomian mereka akan menjadi ketertarikan untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam yang ada khususnya sumber daya di daerah pesisir berupa sumber daya kelautan dan perikanan.

Jumlah penduduk yang terlibat dalam kegiatan budidaya saat ini tercatat 2.107 orang yang tersebar pada beberapa desa pesisir di kecamatan sekotong. Program pengembangan komoditas unggulan yang akan dilakukan tentunya akan meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat pembudidaya. Fenomena ini kedepan akan meningkatkan minat penduduk disekitar lokasi atau penduduk desa pesisir yang belum mengusahakan rumput laut atau kegiatan kelautan dan perikanan secara umum. apabila kita kaitkan dengan pemanfaatan areal potensial yang ada khususnya potensi areal rumput laut, yang baru dimanfaatkan hanya sebesar 1000 hektare dari areal potensial seluas 2.900 hektare (Areal tambak dan pesisir /laut). Untuk itu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat membuat strategi untuk menumbuhkan minat masyarakat pesisir untuk ikut melakukan budidaya rumput laut, keterangan mengenai rencana strategi tersebut

didapat peneliti dari narasumber Bapak H. Muhammad Irham S.PI selaku Seksi Produksi Budidaya yang memberikan keterangan sebagai berikut:

“Untuk strategi menumbuhkan minat masyarakat dalam membudidayakan rumput laut pada tahap awal berencana melakukan kegiatan pengembangan produk unggulan kabupaten ini akan dilibatkan 95 KK pembudidaya yang bernaung dalam 9 wadah kelompok Pembudidaya rumput laut. Dari 95 KK tersebut nantinya akan melibatkan semua tenaga kerja keluarga (Istri dan anak), sehingga akan terserap $\pm$ 285 orang tenaga kerja yang akan ikut ambil bagian dalam kegiatan pemberdayaan ini.” (Wawancara pada tanggal 13 Oktober 2015 pukul 10.45 WITA)

Berdasarkan keterangan yang didapat peneliti dari Bapak H. Muhammad Irham S.PI, menjelaskan bahwa strategi yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat untuk menarik perhatian masyarakat pesisir untuk ikut melakukan kegiatan pembudidayaan dilaksanakan dengan beberapa tahap. Tahap yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat yaitu dengan merekrut 95 KK yang ingin melakukan pembudidayaan rumput laut, lalu kemudian dari 95KK tersebut dibentuk menjadi sembilan kelompok pembudidaya yang nantinya akan mengelola potensi budidaya sesuai daerah yang mereka tempati. Nantinya sembilan kelompok tersebut dalam melakukan aktifitas pembudidayaan rumput laut akan melibatkan anggota keluarga mereka untuk mengelola budidaya rumput laut mereka, sehingga dapat memaksimalkan tenaga kerja dalam proses penanaman hingga panen dan dengan menggunakan anggota keluarga, mereka dapat menghemat pengeluaran karena dengan menggunakan anggota keluarga mereka tidak perlu mengeluarkan upah kerja sehingga mendapatkan hasil yang efisien. Untuk lebih jelasnya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat membuat sebuah tabel yang

menjelaskan Data mengenai hal dimaksud yang dapat terlihat pada tabel 16 berikut:

Tabel 16. Rincian Lokasi dan Kelompok Penerima Manfaat Kegiatan Pengembangan Produk Unggulan Kabupaten Komoditas Rumput Laut Di Kabupaten Lombok Barat tahun 2014

No	Jenis usaha Kelompok Penerima Manfaat	Volume	Lokasi		Keterangan
			Desa	Kecamatan	
1.	Budidaya Rumput laut di Tambak	5 Kelompok	Cendi Manik	Sekotong	Rumput Laut Jenis <i>Gracilaria</i>
2	Budidaya Rumput laut di Laut	4 Kelompok	Buwun Mas	Sekotong	Rumput Laut Jenis <i>cottonii</i>

Sumber: Seksi Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014

Berdasarkan tabel dan penjelasan di atas menggambarkan bahwa strategi yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat menerapkan kegiatan yang dimulai dengan tahap awal yang sangat penting yakni penyiapan masyarakat. Pada tahap awal tersebut dilakukan pemasyarakatan tentang program pembangunan yang akan dilaksanakan sehingga mengetahui tentang arti penting program dimaksud. Kontribusi masyarakat ditempatkan sebagai hal pokok, terutama keterlibatannya dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Pendekatan ini sangat penting artinya agar masyarakat mempunyai rasa memiliki atas hasil-hasil pembangunan tersebut, sehingga terwujudlah pembangunan yang berkesinambungan.

Meraih kepercayaan masyarakat adalah tahap berikut sehingga tingkat resistensi masyarakat terhadap program yang dikenalkan minimum. Salah satu upaya meraih kepercayaan masyarakat adalah memberikan hasil yang nyata dari

program yang diterapkan. Untuk itu maka aplikasi teknologi tepat guna di berbagai kehidupan ekonomi masyarakat menjadi alat yang efektif, karena dengan relatif cepat masyarakat dapat melihat hasil dari partisipasi mereka dalam program ini. Tetapi untuk kegiatan diberbagai daerah yang berbeda perlu didukung oleh metode lain yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kegiatan.

c. Pengembangan Teknologi Budidaya

Pengembangan teknologi budidaya dilakukan untuk memberikan kemajuan dalam proses pembudidayaan, hal ini dilakukan karena masih banyaknya pembudidayaan rumput laut yang masih menggunakan teknologi tradisional dalam proses pembudidayaan yang mengakibatkan hasil yang didapat kurang menguntungkan untuk dipasarkan. hal ini sangat disayangkan karena Kabupaten Lombok Barat memiliki sumber daya alam yang potensial untuk dimanfaatkan, salah satu yang paling potensial adalah Rumput Laut. Namun belum memadainya sarana prasarana, modal, tingkat penguasaan teknologi dan informasi baik pada proses disektor hulu maupun dihilir menjadi kendala bagi masyarakat setempat untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya yang ada. Dahulu sebelum adanya perhatian pemerintah terhadap komoditas unggul seperti rumput laut, para petani hanya mengandalkan pemasukan keluarga dengan menjadi nelayan dengan penghasilan tidak terlalu besar. Hal ini diperkuat oleh keterangan bapak Ir. Misbah sebagai Ketua Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat pada halaman 109:

”Dulu orang yang budidaya rumput laut di Kabupaten Lombok Barat masih minim informasi bagaimana menghasilkan rumput laut yang baik, namun setelah adanya perhatian pemerintah pusat yang memberikan terobosan program Minapolitan masyarakat pembudidayaan rumput laut mulai berbenah dengan adanya upaya pemerintah daerah sebagai pelaksana di daerah masing-masing yang memberikan bantuan dan ilmu dalam mengolah rumput laut dengan baik. Dulunya para pembudidaya dalam melakukan proses pengeringan rumput laut hanya dilakukan dengan beralaskan tanah yang membuat rumput laut menjadi kurang higienis dan kualitas pengeringan yang kurang baik hingga sekarang kami memberikan bantuan alat pengering yang dapat menghasilkan rumput laut yang higienis dan kering dengan sempurna.” (wawancara pada tanggal 9 Oktober 2015, pukul 10.00 WITA di ruangan Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat)

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh bapak Ir. Misbah sebagai Ketua Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat yang ditemui oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa perbaikan mutu dari produk unggulan rumput laut sudah dapat terlihat perubahan perilaku pembudidaya dalam mengolah rumput laut, hal ini tidak lepas dari upaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat yang memberikan bimbingan dan bantuan kepada masyarakat pembudidaya. Dengan adanya upaya pemerintah daerah dalam membantu masyarakat pembudidaya harapannya pelaksanaan kegiatan pembudidayaan akan terus berlanjut dan semakin maju sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir. Kekurangan informasi terhadap keberadaan atau kondisi pasar dan masih lemahnya tataniaga rumput laut akan dapat teratasi dengan adanya bantuan dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Menyadari atas keterbatasan tersebut, serta tingginya tuntutan pemenuhan ekonomi keluarga sebagai implikasi dari pertambahan jumlah penduduk maka ada

kecenderungan masyarakat pesisir melakukan upaya memperbaiki usaha, baik sebagai nelayan, petani/pembudidaya, penambang dan sektor jasa lainnya. Namun dalam pelaksanaan kegiatan usaha tersebut masih belum mampu mengangkat tingkat perekonomian dan kesejahteraan mereka dan seluruh anggota keluarga mereka. Untuk itu secara khusus komoditas rumput laut ini, menjadi salah satu alternatif komoditas yang perlu dikembangkan. Karena Rumput Laut merupakan salah satu sumber daya hayati yang terdapat di wilayah pesisir dan laut, yang memiliki banyak manfaat dalam kehidupan manusia.

Secara umum rumput laut dapat diolah menjadi berbagai jenis produk komersial, seperti karaginan yang merupakan bahan baku kosmetik, parfum, obat-obatan, dan pasta gigi. Komoditas ini juga banyak dimanfaatkan untuk bahan makanan dan minuman. Disamping berbagai manfaat tersebut di atas, rumput laut pun dapat menjadi komoditas utama dalam program revitalisasi perikanan. Keunggulan itu antara lain peluang ekspornya masih terbuka luas, harganya relatif stabil, dan belum ada kuota perdagangan bagi rumput laut. Untuk menunjang pengembangan dan kemajuan para pembudidaya, khususnya untuk pembudidaya yang bergerak dibidang produksi rumput laut. Maka diperlukan berbagai upaya selain sentra informasi dan inovasi dari perkembangan produk-produk berbasis rumput laut yang didukung pusat informasi yang nantinya akan dijadikan suatu pusat percontohan sebuah industri dalam skala semi produksi (*pilot plant*).

Kegiatan yang difokuskan pada pengembangan wilayah berbasis potensi lokal diharapkan dapat memunculkan produk unggulan daerah yaitu produk yang bercirikan kekhasan daerah. Produk unggulan yang akan dikembangkan

diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun pasar di luar daerah. Melalui pengembangan unit-unit usaha olahan pangan, diharapkan dapat mendorong tumbuhnya industri olahan pangan yang mencirikan wilayah masing-masing. Hal ini akan menjadi suatu keunggulan karena produk yang khas dan mencirikan daerah memberi nilai tambah dan meningkatkan daya saing. Untuk itu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat berupaya agar produk rumput laut dapat membantu masyarakat pesisir dalam mendapatkan penghasilan yang bisa menghidupi mereka.

Pengembangan produk unggul demi kemajuan perekonomian masyarakat pesisir memerlukan kerjasama antara masyarakat pesisir dan pemerintah daerah dalam upaya mensukseskan program ini, oleh karena itu pemerintah daerah berupaya memberikan pelayanan yang baik agar dalam pelaksanaan program tersebut masyarakat mendapatkan manfaat dari program tersebut. Produk unggulan yang saat ini dikembangkan di Kabupaten Lombok Barat adalah rumput laut, hal ini karena rumput laut merupakan komoditas budidaya yang memiliki berbagai macam manfaat, selain itu rumput laut merupakan komoditas yang menjadi penopang produk perikanan budidaya secara nasional. Pemanfaatan rumput laut sebagai komoditas unggulan daerah akan memberikan harapan bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat pesisir untuk ikut berperan aktif memanfaatkan potensi yang ada, untuk itu perlu adanya Kegiatan perbaikan mutu baik dari proses penanaman hingga panen agar rumput laut yang dihasilkan berkualitas baik.

Upaya Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Lombok Barat dalam berbaikan mutu pembudidayaan rumput laut di Kabupaten Lombok Barat sangatlah penting untuk dilaksanakan, oleh karena itu DKP Kabupaten Lombok Barat memberikan beberapa bantuan baik berupa bantuan perlengkapan pembudidayaan ataupun bantuan tenaga ahli sebagai proses pembimbingan dalam proses pembudidayaan rumput laut yang lebih baik. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Ir. Misbah sebagai Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat yang memberikan keterangan sebagai Berikut:

“Kami dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat telah memberikan berbagai bantuan kepada para pembudidaya rumput laut, baik itu dalam bentuk bantuan tenaga ahli dalam membimbing para petani rumput laut ataupun bantuan berupa sarana dan prasarana penunjang dalam kegiatan pembudidayaan rumput laut. Untuk sarana prasarana kami memberikan alat pengering rumput laut yang berupa seperti sebuah wadah untuk penjemuran dibawah sinar matahari yang terbuat dari besi yang kami berikan agar rumput laut yang dijemur tidak tercampur dengan pasir pantai ataupun kotoran lainnya. Selain itu kami juga mengadakan pertemuan antara masyarakat pembudidaya dengan para tenaga ahli dalam bidang budidaya rumput laut yang harapannya para pembudidaya mendapatkan ilmu dari pertemuan tersebut” (wawancara pada tanggal 9 Oktober 2015, pukul 10.00 WITA di ruangan Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat)



Gambar 9. Alat penjemur rumput laut
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat



Gambar 10. Bantuan alat pembudidayaan rumput laut
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat



Gambar 11. Kebun Budidaya rumput laut
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat



Gambar 12. Pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan budidaya rumput laut
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat



Gambar 13. Pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan budidaya rumput laut
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat

Pemberian bantuan dan pelatihan kepada para pembudidaya rumput laut dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Lombok Barat tidak hanya itu saja, namun bantuan yang diberikan kepada para pembudidaya juga dengan memberikan bantuan dalam penerapan bibit unggul yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Lombok Barat, hal ini dilakukan untuk meningkatkan mutu produksi rumput laut yang ada di Kabupaten Lombok Barat, penerapan bibit unggul dimotori oleh adanya kerjasama antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat dengan proyek CCDF-IFAD yang merupakan proyek tugas pembantu yang bekerja sama sejak tahun 2013 dalam hal pembangunan perikanan daerah. kerjasama ini menghasilkan banyak terobosan yang berlatar belakang pengembangan ekonomi masyarakat pesisir, hal ini yang membuat pelaksanaan program kesejahteraan masyarakat pesisir dapat mudah dan efektif karena dengan adanya bantuan tersebut. Bantuan bibit unggul yang diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Lombok Barat berupa bibit rumput Laut jenis *Cottonii* Jumbo yang merupakan Jenis baru yang akan dikembangkan di Kabupaten Lombok Barat. Pernyataan tersebut dijelaskan oleh Bapak Ir. Misbah selaku Kepala Bagian Perikanan Budidaya yang memberikan keterangan sebagai berikut:

“Kami dari DKP LOBAR memberikan terobosan kepada para pembudidayaan rumput laut tentang teknik budidaya rumput laut dengan menggunakan tehnik kultur jaringan bibit. Dengan teknik ini memudahkan para pembudidayaan rumput laut untuk mempercepat masa panen mereka, jenis rumput laut yang kami berikan juga merupakan jenis *Cottonii* Jumbo yang masa panen rumput laut jenis ini memakan waktu 45 hari. Namun untuk pembibitan cukup memakan waktu 20 hari. Pemilihan rumput laut *Cottonii* Jumbo dikarenakan jenis rumput laut ini lebih tahan terhadap penyakit dan lebih banyak dicari” (wawancara pada tanggal 9 Oktober 2015, pukul 10.00

WITA di ruangan Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat)

Berdasarkan keterangan yang diberikan Bapak Ir.Misbah, peneliti menyimpulkan bahwa upaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat dalam upaya memberikan bantuan kepada para pembudidaya rumput laut sangatlah membantu. Hal ini karena dengan dikembangkannya sistem kultur jaringan bibit, pembudidaya rumput laut bisa memperoleh keuntungan dengan waktu panen yang relatif singkat, selain itu dengan adanya jenis rumput laut yang dikembangkan yaitu *Cottonii* Jumbo yang merupakan jenis yang memiliki keuntungan yang jauh lebih baik karena jenis ini lebih besar dan keras serta lebih banyak mengandung karaginan. Oleh karena itu bantuan yang diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat sangatlah memberikan dampak positif dalam perkembangan pembudidayaan rumput laut di Kabupaten Lombok Barat. Adapun bantuan yang telah diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 14. Proses Panen Rumput laut *Cottonii* Jumbo

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Lombok Barat



Gambar 15. Kebun Pembudidayaan Rumput laut *Cottonii* Jumbo

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Lombok Barat



Gambar 16. Pemberian bibit rumput laut *Cottonii* Jumbo Kepada para pembudidaya rumput laut
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat

d. Penguatan Permodalan

Pelaksanaan program Minapolitan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya masyarakat pesisir, oleh karena itu untuk memenuhi tujuan tersebut salah satunya diperlukan bantuan modal agar dapat membantu masyarakat sehingga program tersebut dapat terlaksana dengan baik. modal dalam melakukan proses budidaya tidaklah sedikit bagi para masyarakat pesisir yang membudidayakan rumput laut, oleh karena itu para pembudidaya biasanya memperoleh modal untuk proses budidaya dengan meminjam modal usaha kepada para pemilik modal atau biasa disebut dengan tengkulak. Hal ini diketahui dari wawancara peneliti kepada Bapak Joni selaku ketua kelompok pembudidaya rumput laut yang memberi keterangan sebagai berikut:

“untuk modal usaha budidaya rumput laut yang kami lakukan biasanya didapat dari meminjam kepada tengkulak yang biasa menerima hasil panen rumput laut kami, untuk proses pembayaran kami biasanya dengan memotong harga panen rumput laut yang kami jual kepada mereka. Mau tidak mau ikut aja untuk mendapatkan modal usaha kami. Selain itu juga kami biasanya mendapat modal budidaya dengan mengumpulkan hasil kerja kami dari berkerja sampingan seperti bertani, buruh bangunan, menjaga dan merawat ternak orang, sampai modal tersebut dapat terkumpul.” (wawancara pada tanggal 3 Oktober 2015)

Berdasarkan keterangan dari Bapak Joni dapat diketahui bahwa dalam memperoleh modal usaha budidaya rumput laut biasanya mereka dapat dengan meminjam modal dari para tengkulak yang biasanya para pembudidaya menjual hasil panen rumput laut mereka, selain itu mereka juga biasanya mengumpulkan modal dengan melakukan pekerjaan sampingan seperti menjadi buruh bangunan, bertani, menjaga ternak orang dan banyak pekerjaan sesuai dengan permintaan pekerjaan yang ada. Mengumpulkan modal untuk menjalankan proses budidaya rumput laut menjadi kendala bagi para pembudidaya rumput laut yang tinggal di daerah pesisir Kabupaten Lombok Barat, hal ini dikarenakan oleh rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir di Kabupaten Lombok Barat. Mengatasi permasalahan dalam memperoleh permodalan bagi para pembudidaya menjadi permasalahan yang penting untuk diselesaikan dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, untuk itu perlunya perhatian pemerintah dalam membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh para pembudidaya rumput laut tersebut.

Upaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat dalam pemberian modal yang diberikan kepada masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya pada hasil laut, untuk itu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat mempunyai program kerja yang berkonsentrasi pada kesejahteraan masyarakat pesisir. Program tersebut bernama CCDP-IFAD yang merupakan program kerjasama dengan *International Fund for Agricultural Development* (IFAD) dalam melaksanakan *Coastal Community Development* (CCD) atau Proyek Pembangunan Masyarakat Pesisir (PMP).

Proyek tersebut merupakan salah satu program IFAD yang berkolaborasi dengan usaha pemerintah untuk pengentasan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan yang berkelanjutan (*propoor, pro-job, pro-growth and pro-sustainability*). Untuk itu peneliti menemui Bapak Uki selaku tenaga pelaksana dari program CCDP-IFAD untuk memperoleh keterangan, adapun keterangan yang diberikan oleh Bapak Uki sebagai berikut:

“program CCDP-IFAD merupakan program yang dibentuk karena kekhawatiran terhadap dunia pertanian yang masih menjadi lumbung kemiskinan, awalnya program ini diperuntukan untuk dunia pertanian, namun di tahun 2013 program CCDP-IFAD beralih ke bidang dunia kelautan dan perikanan. Hal itu karena di wilayah Indonesia bagian pesisir merupakan wilayah yang masih banyak angka kemiskinannya, padahal dengan potensi kekayaan laut yang ada di Indonesia seharusnya bisa menopang kehidupan masyarakat pesisir. program ini merupakan program bantuan yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaannya dan pengembangannya, kebanyakan program ini menyentuh daerah di timur Indonesia yang salah satunya yaitu Kabupaten Lombok Barat, sebenarnya ada 18 kabupaten dan kota yang mendapatkan program bantuan ini. Program CCDP-IFAD dilaksanakan di Kabupaten Lombok Barat mulai tahun 2013 dan akan berakhir di tahun 2017. Bantuan yang diberikan oleh program CCDP-IFAD merupakan bantuan yang bersifat pembangunan kapasitas masyarakat pesisir seperti penyaluran teknologi budidaya ataupun pelatihan bagi para pembudidaya, namun ada bantuan dana yang kami berikan tapi tidak di salurkan langsung semuanya, namun kami menyalurkannya secara sedikit-demi sedikit agar masyarakat tidak tergantung dengan bantuan tersebut.” (wawancara pada tanggal 5 Oktober 2015, pukul 13.00 WITA di ruangan Bidang Pengawasan dan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat)

Berdasarkan keterangan yang disampaikan Bapak Uki selaku tenaga ahli program CCDP-IFAD, peneliti mendapati bahwa proyek ini melibatkan kerjasama pemerintah, baik pada tingkat nasional maupun kabupaten/kota dalam hal pendanaan proyek pinjaman dan hibah dari IFAD, APBN, APBD, serta kontribusi masyarakat pesisir terkait, yang kesemuanya berjumlah total US\$ 43,219 juta

yang akan direalisasikan secara bertahap. Adapun realisasi anggaran yang sudah digunakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat dalam pemberian modal dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pesisir yang dapat dilihat pada tabel 17 berikut :

Tabel 17. Realisasi Anggaran Bantuan tahun 2012-2014

No	Tahun	Anggaran Dana Bantuan (Rp)
1	2012	61.421.500
2	2013	108.760.000
3	2014	221.820.000

*Sumber: Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Lombok Barat*

Pengembangan potensi perikanan memerlukan berbagai macam data dan informasi untuk mengukur sejauh mana proyek dapat dijalankan dan tepat sasaran diantaranya adalah dukungan infrastruktur untuk keberlanjutan usaha, menggali potensi produksi, rantai pasok dan jaringan pasar serta pelaku pemasaran hasil perikanan dan tidak kalah pentingnya juga adalah keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya yang ada di desa. Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu Kabupaten dari 12 Kabupaten/Kota yang ditunjuk oleh IFAD sebagai lokasi proyek. Untuk tahun pertama TA. 2013 sasaran proyek berada di 3 desa yaitu; Desa Lembar Selatan, Desa Labuan Tereng dan Desa Sekotong Timur (Eat Mayang). Tahun ke dua (tahun 2014) ada penambahan 6 desa yaitu: Desa Taman Ayu, Desa Cendi Manik, Desa Sekotong Barat, Desa Gili Gede Indah, Desa Batu Putih dan Desa Buwun Mas.

Kelompok masyarakat di 9 desa implementasi CCDP-IFAD Kabupaten Lombok Barat sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 sebanyak 92 kelompok masyarakat yang terbagi dalam kelompok usaha perikanan tangkap, usaha perikanan budidaya, usaha pengolahan dan usaha pemasaran, selain kelompok usaha di masing-masing desa juga ada kelompok non usaha yaitu kelompok pengelola sumberdaya dan kelompok infrastruktur.

Dalam kelompok usaha perikanan budidaya disesuaikan dengan kondisi lingkungan perairan seperti: budidaya rumput laut jenis *Eucheuma* sp. (Desa Buwun Mas dan Desa Sekotong Barat), budidaya sistem polykultur/rumput laut jenis *Gracilaria* sp., udang dan bandeng (Desa Cendi Manik dan Desa Eyat Mayang) dan budidaya siput mutiara (Desa Batu Putih). Usaha pengolahan ikan dan usaha pemasaran ada hampir di semua desa sasaran CCDP-IFAD kecuali di Desa Buwun Mas, jenis-jenis olahan yang dikembangkan berupa: kerupuk teripang, kerupuk rumput laut, kerupuk cangkang rajungan dan kerupuk ikan (semua jenis ikan disesuaikan dengan musim ikan), stick ikan, stick kerang jepang, terasi batangan, terasi panggang dan pengolahan daging rajungan, usaha pemasaran hasil perikanan yang direalisasi hanya 1 kelompok masyarakat yaitu di Desa Cendi Manik namun ada beberapa kelompok masyarakat seperti kelompok Putri Pesisir Mandiri (Dusun Cemara), kelompok Putri Dayung (Dusun Teluk Waru) sudah mengembangkan usaha pemasaran ikan sejak tahun 2013. Untuk lebih jelasnya terkait dengan jumlah, status, kegiatan, proposal, hasil/produksi, perkembangan dan kegiatan yang telah dilakukan oleh kelompok masyarakat di 9

desa implementasi CCDP-IFAD Kabupaten Lombok Barat dapat diuraikan dalam bentuk matrik yang dapat dilihat sebagai berikut:

1. Kelompok Kerja Desa (VWG)

Kelompok kerja desa yang merupakan salah satu upaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat dalam memberdayakan masyarakat pesisir, pembentukan kelompok kerja desa menjadi salah satu tahap dalam program CCD-IFAD yang merupakan program bantuan dalam upaya memaksimalkan potensi daerah pesisir. Dengan terbentuknya kelompok kerja desa harapannya dapat memaksimalkan potensi daerah pesisir baik pada masyarakatnya ataupun sumber daya alam dan juga mempermudah dalam proses koordinasi antar pemerintah dengan masyarakat di daerah pesisir, hal ini dijelaskan oleh bapak Uki selaku anggota pelaksana program CCD-IFAD memberikan keterangan sebagai berikut:

“pembentukan kelompok kerja desa merupakan salah satu prosedur yang kami lakukan dalam menjalankan program CCD-IFAD yang mana dalam pembentukan kelompok kerja desa tersebut kami selaku tenaga pelaksana program membentuk kelompok kecil yang ada disekitar kawasan pesisir Kabupaten Lombok Barat, maksud kami dalam pembentuk kelompok kerja desa bertujuan untuk memudahkan dalam proses koordinasi dan penyaluran bantuan” (wawancara pada tanggal 5 Oktober 2015, pukul 13.00 WITA di ruangan Bidang Pengawasan dan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat)

Berdasarkan keterangan dari bapak Uki selaku anggota pelaksana program CCD-IFAD, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa pembentukan kelompok kerja desa dapat memberikan kemudahan dalam proses koordinasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat kepada masyarakat yang ada di daerah pesisir Kabupaten Lombok Barat. Selain itu bapak Uki juga menjelaskan

prosedur-prosedur dalam memfasilitasi pelaksanaan sub-komponen Kelompok Kerja Desa, didukung oleh TPD dan staf PIU akan mengatur sebagai berikut:

- (i) Seleksi melalui pemungutan suara terhadap Kelompok Prasarana Proyek.
 - (ii) Fasilitasi terhadap kerja Kelompok Prasarana Proyek, khususnya pemilihan melalui pemungutan suara dan konsensus desa mengenai prasarana yang akan diberikan dan pengaturannya, termasuk kontribusi barang dan jasa (*in-kind contributions*) untuk proyek prasarana.
 - (iii) Fasilitasi dan seleksi/penetapan prioritas pelayanan dan kelompok usaha melalui pemungutan suara dan konsensus desa.
 - (iv) Fasilitasi dan pemilihan kelompok tabungan.
 - (v) Pemantauan dan pengawasan dari semua kelompok dan pemeliharaan catatan dan transparansi berkaitan dengan alokasi dan penggunaan sumber daya proyek.
 - (vi) Melaporkan kepada perangkat desa tentang kemajuan proyek dan hal-hal yang menjadi perhatian/minat untuk masyarakat desa yang lebih luas melalui rapat desa teratur dan konsultasi.
 - (vii) Memastikan keseimbangan gender dan keberpihakan pada masyarakat miskin dalam pencantuman rumah tangga dan individu dalam kelompok.
 - (viii) Mempromosikan dan menyelenggarakan program pengetahuan keuangan dan penyebaran pengetahuan yang relevan mengenai produk yang dihasilkan oleh proyek (misalnya informasi harga pasar melalui SMS).
- Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Kelompok Kerja Desa (VWG) dapat dilihat pada Tabel 18 halaman 123:

Tabel 18. Struktur Organisasi Kelompok Kerja Desa (VWG)

No.	Desa	Nama	Jabatan
1	Sekotong Barat	Haerudin Muridah Supiani Nuhasanah Zaenal	Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota
2	Lembar Selatan	Sanudin Al Haris Suparlan	Ketua Sekretaris
		Nurbaen Kemasy Abdul Muluk Nurhasanah	Anggota Anggota Anggota
3	Taman Ayu	H. Supardan Bq. Halimatussakdiah Saiful Bahri Munirah Lalu Imran	Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota
4	Buwun Mas	Muhammadiyah Amaq Burhan H. Angkasah Imran Jony Iskandar	Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota
5	Batu Putih	Munajah	Ketua
		Darwan Juraidah Saufi Lahili, S.Pd. Umar Dhani	Sekretaris Anggota Anggota Anggota
6	Eyat Mayang	Muhidin H. Raba'i Faidah H. Lalu Rustiadi Pahariah	Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota
7	Gili Gede Indah	Mashur, S.Pd. M. Zaidun Heslinda Suriati Junaedi	Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota
8	Cendi Manik	Sudirman Mawardi Nining Hilmiah Saptini Pathoni	Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota

9	Labuan Tereng	Kamarudin Siti Rafaah Rohidin Ruslan Sri Novianti	Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota
---	---------------	---	--

Sumber: Laporan Tahunan Program CCDP-IFAD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat, 2014

2. Kelompok Usaha (*Enterprises*)

Pembentukan Kelompok usaha dibuat untuk kegiatan ekonomi tertentu (misalnya penangkapan, budidaya laut, pengolahan) oleh rumah tangga yang berminat. Tujuan terbentuknya kelompok usaha dimaksudkan untuk membantu meningkatkan perekonomian bagi rumah tangga yang bermukim di daerah pesisir, hal ini menjadi konsentrasi dalam pemberdayaan masyarakat pesisir karena kehidupan masyarakat pesisir di Kabupaten Lombok Barat masih belum maksimal dalam pemanfaatan hasil laut yang memadai. Untuk itu dengan adanya pembentukan kelompok usaha tersebut dapat memaksimalkan pemanfaatan hasil laut yang didapat oleh para masyarakat pesisir, penjelasan lebih lanjut mengenai kelompok usaha dijelaskan oleh Bapak Uki selaku anggota pelaksana program CCD-IFAD yang memberikan keterangan sebagai berikut:

“untuk kelompok Usaha kami pelaksana program CCD-IFAD dari Dinas Kelautan dan Perikanan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat disekitar daerah pesisir agar mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru, kami berupaya untuk membantu masyarakat pesisir agar mampu secara mandiri mengembangkan usaha-usaha kecil yang nantinya akan memberikan pemasukan bagi keluarga mereka. Dalam kelompok usaha ini kami membagi beberapa kelompok usaha yang didalamnya terdapat sekitar 8-10 orang untuk kemudian akan mengembangkan usaha sesuai dengan potensi sumber daya yang ada, pembagian jenis kelompok usaha tersebut antara lain kelompok usaha perikanan budidaya, kelompok usaha pengolahan ikan dan kelompok usaha pemasaran/pasca panen, semua kelompok tersebut berkonsentrasi pada pemanfaatan potensi laut dan pesisir di daerah Kabupaten Lombok Barat. hal ini dimaksudkan agar potensi daerah khususnya daerah pesisir dapat dimanfaatkan secara maksimal.” (wawancara pada tanggal 5 Oktober 2015,

pukul 13.00 WITA di ruangan Bidang Pengawasan dan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat)

Berdasarkan keterangan dari bapak Uki didapati bahwa Pembentukan kelompok usaha menjadi titik utama dalam penguatan permodalan yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat, selain itu kelompok usaha dibentuk dengan sistem Kelompok kecil yang terdiri dari 8-10 orang untuk kemudian berkordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat untuk menganalisis potensi usaha apa saja yang akan dikembangkan pada lingkungan mereka. Proyek ini bekerja dengan kelompok yang ada, selama proyek/usaha yang diusulkan mereka layak dan konsisten dengan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. Pada tahun pertama kelompok yang ada dengan kepaduan yang kuat dan prospek yang baik untuk adaptasi akan menjadi fokus utama dukungan proyek. Diharapkan lebih banyak kelompok usaha yang muncul seiring masyarakat itu mendapatkan pengalaman dari kelompok sebelumnya. Proyek ini membuka peluang baru untuk proses adopsi terakhir di tahun ketiga dan seterusnya.

Keterlibatan perempuan dalam kegiatan usaha berorientasi produksi menjadi tantangan bagi beberapa kelompok usaha, terutama kelompok usaha yang terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan. Namun, perempuan sangat didorong untuk berpartisipasi dalam budidaya perikanan, pengolahan dan pemasaran ikan, prasarana masyarakat, jasa dan kelompok tabungan. Proses seleksi dan alokasi dana hibah mengikuti proses yang disebutkan di atas tetapi karena Kelompok Usaha memiliki dimensi kelompok usaha yang lebih besar dan keragaman

pengeluaran, mereka dapat dikenakan tingkat pengawasan yang lebih ketat. Contoh kegiatan Kelompok Usaha meliputi: budidaya rumput laut, tambak, rumpon, pengolahan ikan, penangkapan dan budidaya kepiting hijau/rajungan, keramba ikan. Untuk lebih jelasnya kelompok usaha (*enterprises*) dapat dilihat pada Tabel 19, 20, dan 21 berikut:

Tabel 19. Usaha Perikanan Budidaya

No	Desa	Nama Kelompok	Kategori Usaha	Komoditi (Jenis Ikan)
1.	Taman Ayu	Pajar Jaya	Budidaya Ikan Air Tawar (Ikan Nila)	Ikan Nila
2.	Cendi Manik	Bareng Maju	Budidaya Air payau (Polykultur)	Rumput laut jenis <i>Gracilaria</i> sp., bandeng dan udang
		Semoga Sukses	Budidaya Air payau (Polykultur)	Rumput laut jenis <i>Gracilaria</i> sp., bandeng dan udang
		Ingin Maju	Budidaya Air payau (Polykultur)	Rumput laut jenis <i>Gracilaria</i> sp., bandeng dan udang
3.	Batu Putih	Mina Siung	Budidaya Laut	Siput Mutiara
4.	Buwun Mas	Nambung Bersatu	Budidaya Laut	Rumput Laut <i>Eucheuma cottonii</i>
		Pesisir Pantai Nambung	Budidaya Laut	Rumput Laut <i>Eucheuma cottonii</i>
		Nambung Biru	Budidaya Laut	Rumput Laut <i>Eucheuma cottonii</i>
5.	Sekotong Barat	Maju Bersama	Budidaya Laut	Rumput Laut <i>Eucheuma cottoni</i>
		Mina Segara	Budidaya Laut	Rumput Laut <i>Eucheuma cottonii</i>
		Tawun Bersatu	Budidaya Laut	Lobster
6.	Eyat Mayang	Kelape Gading	Silvofisheries	Kepiting dan Bandeng

Sumber: Laporan Tahunan Program CCDP-IFAD, 2014

Tabel 20. Usaha Pengolahan Ikan

No	Desa	Nama Kelompok	Kategori Usaha	Komoditi (jenis ikan)
1.	Taman Ayu	Puri Ayu	Pengolahan mi dan kerupuk	Ikan kakap, tongkol, baronang, lagoon
		Wanita Harapan Kita	Pengolahan kerupuk dan dendeng	Ikan kakap, tongkol, baronang, lagoon
2.	Labuan Tereng	Putri Dayung	Pengolahan kerupuk, stick, terasi	Teripang, rumput laut, rajungan, udang rebon
		Mekar Sari	Pengolahan tortilla dan terasi	Udang rebon
		Putri Labster	Pengolahan terasi	Udang rebon
3.	Batu Putih	Mekar Sari Bangkit	Pengolahan kerupuk dan abon ikan	Rumput laut, Ikan tongkol, lagoon
4.	Lembar Selatan	Setia Rasa	Pengolahan kerupuk	Kerang, ikan belanak, tongkol, lagoon
		Mitra Usaha	Pengolahan kerupuk, peyek dan abon	Rumput laut, cangkang rajungan, tongkol, lagoon
		Putri Pesisir Mandiri	Pengolahan kerupuk, peyek dan abon	Ikan tongkol, lagoon
5.	Sekotong Barat	Putri Laut	Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	Lagoon, kerapu, kakap, baronang, bayaman dan ikan ekor kuning
6.	Eyat Mayang	Kelape Indah	Pengolahan stick kerang	Kerang kejepang (usus)
7.	Gili Gede Indah	Bina Keluarga	Pengolahan ikan pindang	Ikan tongkol
		Bina Maju	Pengolahan abon	Ikan tongkol, lagoon
		Abon	Pengolahan ikan pindang	Ikan tongkol
		Mele Maju	Pengolahan ikan pindang	Ikan tongkol

Sumber: Laporan Tahunan Program CCDP-IFAD, 2014

Tabel 21. Usaha Pemasaran/Pasca Panen

No	Desa	Nama Kelompok	Kategori Usaha	Komoditi (Jenis Ikan)
1.	Cendi Manik	Pade Angen	Pemasaran ikan laut dan ikan tawar	Belanak, baronang, rajungan, udang, ikan nila
		Cahaya Biru	Pemasaran ikan laut	Udang, kepiting, belanak, cumi-cumi

Sumber: Laporan Tahunan Program CCDP-IFAD, 2014

3. Kelompok Pengelola Sumberdaya

Kelompok pengelola sumberdaya merupakan kelompok yang bertanggungjawab terhadap lingkungan pesisir dan lautan, Kegiatan kelompok pengelola sumberdaya ada beberapa hal yang telah dilakukan seperti: patroli laut, pembibitan dan penanaman mangrove/bakau dan pohon waru, penyusunan draft Awiq-Awiq tentang pelarangan penambangan pasir pantai (Desa Taman Ayu). Kegiatan ini sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun oleh kelompok pengelola sumberdaya, dari kegiatan kelompok pada halaman 132:

1. Dapat mengembangkan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
2. Dapat memanfaatkan potensi sumberdaya pesisir lebih baik.
3. Masyarakat dapat memahami dan mengerti tentang manfaat dari tanaman mangrove.
4. Dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan etos kerja dari masyarakat.

Untuk lebih jelasnya masing-masing kegiatan yang telah dilaksanakan oleh kelompok pengelola sumberdaya dapat dilihat pada Tabel 22 halaman 129.

Tabel 22. Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh kelompok pengelola sumberdaya

No	Desa	Nama Kelompok	Kategori Usaha	Yang telah dikerjakan
1.	Taman Ayu	Taman Lestari	Penghijauan pantai, kampanye penyadaran lingkungan dan patrol	- Penanaman pohon waru di sepanjang pantai Dusun Taman - Pembuatan plank larangan penambangan pasir pantai - Mempersiapkan draft awiq-awiq tentang pelarangan penambangan pasir - Patroli rutin di sekitar perairan Dusun Taman
2.	Cendi Manik	Madak Bersatu	Pembibitan, penghijauan pantai dan patrol	- Pembibitan dan penanaman mangrove di sekitar pantai Dsn. Madak Belek - Patroli rutin di sekitar perairan Teluk Lembar dan sekitar tanaman mangrove
3.	Labuan Tereng	Mekar Jaya	Pembibitan, penghijauan pantai dan patrol	- Pembibitan dan penanaman mangrove di pinggir pantai sekitar Dusun Teluk Waru - Patroli rutin di sekitar perairan Dusun Teluk Waru dan sekitar tanaman mangrove
4.	Buwun Mas	Beriuk Tinjal	Patroli	- Patroli rutin di sekitar perairan Dusun Teluk Waru dan sekitar tanaman mangrove
5.	Batu Putih	Mele Maju	Pembibitan, patrol, survey	- Pembibitan mangrove di Dusun Siung - Patroli rutin di sekitar perairan Tenggolong, Gili Asahan, Labuan Poh dan Bangko-Bangko - Pembersihan pantai secara rutin (Gili Asahan dan tenggolong) - Melakukan survey

				kondisi terumbu karang dan hutan mangrove di sekitar wilayah Desa Batu Putih
6.	Lembar	Mangrove Lestari	Pembibitan, penghijauan pantai dan patrol	- Pembibitan mangrove di Dusun Cemara - Penanaman Mangrove di sekitar muara sungai Cemara - Patroli rutin di sekitar hutan mangrove yang ada disekitar Cemara, Puyahan dan Lembar Timur
7.	Sekotong Barat	Baywatch	Pemadasang mooring dan patrol	- Pemasangan Mooring boy di Kawasan Gita Nada (Gili Nanggu, Gili Sudak dan Gili Tangkong) - Patroli rutin disekitar perairan Gita Nada
8.	Gili Gede Indah	LPPL		- Patroli rutin di sekitar hutang mangrove
9.	Eyat Mayang	Beriuk Sadar	Pembibitan, penghijauan dan patrol	- Pembibitan dan penanaman mangrove di di sekitar Dusun Eyat Mayang Selatan - Patroli rutin di sekitar hutang mangrove

Sumber: Laporan Tahunan Program CCDD-IFAD, 2014

4. Kelompok Infrastruktur

Kelompok infrastruktur merupakan kelompok yang bertanggungjawab terhadap kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan termasuk akses jalan produksi untuk nelayan, pembudidaya maupun para ibu-ibu yang usahanya mencari kerang di muara sungai atau di pinggir pantai saat air laut surut. Kelompok ini tugasnya membangun fisik seperti Pos Informasi, jalan produksi dan pentaludan, rabat jalan, tambat labuh perahu/mooring buoy atau

dermaga apung/pontoon, pembuatan Jetty. Untuk lebih jelasnya masing-masing kegiatan yang telah dilaksanakan oleh kelompok infrastruktur dapat dilihat pada

Tabel 23:

Tabel 23. Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan Oleh Kelompok Infrastruktur

No	Desa	Nama Kelompok	Kategori Usaha	Yang telah dikerjakan
1.	Taman Ayu	KPSPMP	Rabat jalan 3 titik	Melakukan rabat jalan di Dusun Taman dengan panjang pada titik I (pertama) P=70 m, L=1,5m, T=10 cm. Titik II (Kedua) P=70 m, L=2 m, T=10 cm dan Titik III (Ketiga) P=70, L=2m, T=10 cm
2.	Cendi Manik	Bareng Maju	Perbaikan jembatan produksi	Melakukan perbaikan jembatan (pentaludan kiri kanan dan penambahan pilar di masing-masing sudut jembatan dan ditengah jembatan)
3.	Labuan Tereng	Teluk Mandiri	Pembangunan Dermaga Apung	Melakukan pembangunan dermaga apung dengan ukuran 6 x 6 m dengan pembangunan jeti sepanjang 50 m.
4.	Buwun Mas	Laut Biru	Rabat jalan produksi	Melakukan perabatan jalan di Dusun Sepi dengan Panjang 70 m, Lebar 2 m dengan tinggi 10 cm.
5.	Batu Putih	Maju Bersama	Pentaludan dan pengerasan jalan	Melakukan pentaludan di Dusun Siung sepanjang 362 m kiri kanan pada ruas jalan kemudian di tambah menjadi 366 m dan lebar rencana 1,5 m ditambah menjadi 2,7 m (swadaya masyarakat tetap dilaksanakan karena menyangkut kebutuhan masyarakat terutama aktivitas perikanan dan sosial masyarakat).

6.	Lembar Selatan	Bangun Bersama	Rabat jalan dan pentaludan	Melakukan perabatan jalan di Dusun Pesanggaran dengan Panjang 315 m, Lebar jalan direncanakan 1,5 m ditambah dengan swadaya kelompok dan masyarakat menjadi 2 m, selain rabat jalan juga dilakukan pentaludan yang merupakan swadaya kelompok masyarakat sepanjang 15 m dengan tinggi sekitar 1,5 m.
7.	Sekotong Barat	Bina Bersama	Pentaludan pantai	Melakukan pentaludan pantai di Dusun Telag Lupi dengan panjang 116 m dan sambungan jetty di Gili Tangkong sepanjang 36 m.
8.	Gili Gede Indah	Gili Bersinar	Rabat jalan produksi	Membangun rabat jalan produksi dari bahan paping blok di Dusun Gedang Siang sepanjang 232 m, lebar 1,5 m dan tinggi 15 cm.
9.	Eyat Mayang	Manjangan	Jembatan sebanyak 2 (dua) unit	Melakukan pembuatan jembatan penghubung jalan produksi di Dusun Eyat Mayang Selatan dengan Panjang 3 m dan lebar 2 m sebanyak 1 unit dan panjang 2,5m lebar 2 m sebanyak 1 unit.

Sumber: Laporan Tahunan Program CCDP-IFAD, 2014

5. Kelompok Tabungan

Jumlah kelompok usaha masyarakat CCDP-IFAD di Kabupaten Lombok Barat sebanyak 74 kelompok usaha. Sedangkan jumlah kelompok usaha yang mempunyai tabungan/kas sebanyak 22 kelompok. Tabungan atau kas ini merupakan dana dari hasil usaha kelompok bukan dari sisa BLM. Untuk lebih

jelasan kelompok masyarakat dan jumlah tabungan dapat dilihat pada Tabel 24 berikut:

Tabel 24. Kelompok Masyarakat yang Menabung dan Jumlah Tabungan

No.	Desa	Nama Kelompok	Jumlah Tabungan (Rp.)	Tempat Menabung
1.	Labuan Tereng	Teluk Makmur	2.100.000,-	Kelompok
2.	Labuan Tereng	Putri Dayung	4.500.000,-	BPR Pesisir
3.	Batu Putih	Hiu Lincah	400.000,-	Kelompok
4.	Batu Putih	Berambang Bersatu	500.000,-	Kelompok
5.	Batu Putih	Pade Pacu	250.000,-	Kelompok
6.	Batu Putih	Beriuk Maju	300.000,-	Kelompok
7.	Batu Putih	Berangen Maju	500.000,-	Kelompok
8.	Batu Putih	Abdi Keranga	500.000,-	Kelompok
9.	Batu Putih	Mekar Sari bangkit	700.000,-	Kelompok
10.	Lembar Selatan	Bahari	2.000.000,-	Kelompok
11.	Lembar Selatan	Mitra Usaha	2.500.000,-	Kelompok
12.	Lembar Selatan	Pesisir Putri Mandiri	5.250.000,-	PBR Pesisir
13.	Lembar Selatan	Pade Angen	2.000.000,-	PBR Pesisir
14.	Lembar Selatan	Berioq Angkat Kodong	5.000.000,-	Kelompok
15.	Lembar Selatan	Bajang Bahari	1.500.000,-	Kelompok
16.	Sekotong Barat	Beriuk Dayung II	800.000,-	Kelompok
17.	Sekotong Barat	Arung Laut	300.000,-	Kelompok
18.	Sekotong Barat	Batu Leong Indah	600.000,-	Kelompok
19.	Sekotong Barat	Beriuk Mancing	425.000,-	Kelompok
20.	Sekotong Barat	Pade Angen	475.000,-	Kelompok
21.	Sekotong Barat	Bina Maju	325.000,-	Kelompok
22.	Sekotong Barat	Maju Bersama	500.000,-	Kelompok
23.	Sekotong Barat	Mina Segare	500.000,-	Kelompok
24.	Sekotong Barat	Putri Laut	500.000,-	Kelompok
25.	Eyat Mayang	Keren Permai	1.000.000,-	Kelompok
26.	Eyat Mayang	Kelape Gading	1.300.000,-	Kelompok
27.	Eyat Mayang	Kelape Indah	450.000,-	Kelompok
J u m l a h			35.175.000,-	

Sumber: Laporan Tahunan Program CCDP-IFAD, 2014

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi Pengembangan Kawasan

Minapolitan Rumput Laut di Kabupaten Lombok Barat

a. Faktor pendukung (Analisis Lingkungan Internal)

1. Kekuatan

- a) Adanya keputusan menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2010 yang menjadikan Kabupaten Lombok Barat sebagai kawasan pelaksanaan program Minapolitan

Penetapan Keputusan menteri Kelautan dan Perikanan tersebut menjadi landasan hukum pelaksanaan kegiatan Minapolitan di Kabupaten Lombok Barat. Adanya keputusan menteri Kelautan dan Perikanan yang menetapkan Desa Buwun Mas sebagai daerah pelaksanaan program Minapolitan, hal ini diperkuat oleh penjelasan dari Bapak Misbah Selaku Kepala seksi Perikanan Budidaya yang memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Lombok Barat terpilih menjadi daerah pelaksanaan program Minapolitan sesuai dengan keputusan menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2010 yang menetapkan Desa Buwun Mas sebagai pelaksanaan program Minapolitan dalam bidang budidaya rumput Laut (wawancara pada tanggal 9 Oktober 2015, pukul 10.00 WITA di ruangan Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat)

Berdasarkan keterangan dari bapak Ir. Misbah dapat diketahui bahwa Kabupaten Lombok Barat menjadi daerah pelaksanaan program Minapolitan, hal ini menjadi alat pemacu dalam pengembangan kawasan pembudidayaan rumput laut di Kabupaten Lombok Barat. Tidak hanya itu, dengan adanya keputusan menteri tersebut akan membantu mensukseskan

perkembangan produk unggulan daerah yaitu Rumput Laut yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

b) Kerjasama antara pihak ketiga dalam realisasi program Minapolitan

Pelaksanaan program Minapolitan sebenarnya merupakan pekerjaan semua *stakeholder* yang sudah ditentukan dalam program Minapolitan, Namun dalam pelaksanaannya perlu adanya bantuan dari pihak ketiga untuk membantu pelaksanaan program Minapolitan. Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan program Minapolitan di Kabupaten Lombok Barat sudah melibatkan pihak ketiga dalam perancangan program Minapolitan, hal tersebut diketahui berdasarkan keterangan dari bapak H. Muhammad Irham S.PI selaku Kasi Produksi Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat yang memberikan keterangan sebagai berikut:

“saat perencanaan program Minapolitan kami melibatkan pihak ketiga atau bisa disebut konsultan perencanaan pembangunan yang memang biasa membantu kami dalam program-program kami di Dinas Kelautan dan perikanan” (Wawancara pada tanggal 5 Oktober 2015 Pukul 13.21 WITA)

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh bapak H. Muhammad Irham S.PI dibenarkan bahwa pelaksanaan program Minapolitan di Kabupaten Lombok Barat dilakukan dengan bekerja sama dengan konsultan perencanaan pembangunan yaitu CV. Vrangloid Rait, kerjasama tersebut bertujuan untuk menyusun perancang master plan pengembangan kawasan Minapolitan di Kabupaten Lombok Barat.

c) Adanya bantuan program pendukung yaitu CCD-IFAD

Pengembangan kawasan Minapolitan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lombok barat sudah melalui dilaksanakan mulai tahun 2010, dalam perjalanan pelaksanaan program ini pada tahun 2013 ada sebuah program bantuan dari luar negeri yang merupakan bantuan dari *International Fund for Agricultural Development* (IFAD) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, hal tersebut diperkuat dari keterangan Ibu Ir. Srisusilowati selaku Kabid P4K yang memberikan keterangan sebagai berikut:

“Pelaksanaan program Minapolitan di Kabupaten Lombok Barat memang sudah dilaksanakan dari tahun 2010, tapi seiring perjalanannya akhirnya pada tahun 2013 datang bantuan luar negeri dari *International Fund for Agricultural Development* (IFAD) yang bertujuan memberikan bantuan dalam memaksimalkan pemanfaatan wilayah pesisir untuk menekan angka kemiskinan di daerah pesisir. IFAD mengeluarkan program yang bernama CCD-IFAD yang kemudian diimplementasikan di daerah-daerah pesisir di Kabupaten Lombok Barat. Dengan adanya Program CCD-IFAD dapat membantu pelaksanaan Program Minapolitan, adapun konsentrasi dari program CCD-IFAD yang membantu dalam proses pemberdayaan masyarakat pesisir salah satunya dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru seperti membuat rumah produksi pengolahan hasil laut salah satunya rumput laut yang menjadi program utamanya. Dengan program ini harapannya bisa membantu perekonomian warga pesisir di Kabupaten Lombok Barat.(wawancara pada tanggal 8 Oktober 2015, pukul 13.40 WITA)

Berdasarkan keterangan dari Ibu Ir. Srisusilowati selaku Kabid P4K dapat disimpulkan bahwa program kerjasama tersebut menitik beratkan pada pengembangan produk unggulan daerah untuk dikembangkan sehingga dapat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat pesisir,

untuk itu dengan adanya program bantuan tersebut akan membantu untuk mensukseskan Kawasan Minapolitan menjadi lebih baik.

d) Bantuan tenaga ahli yang berkompeten dalam bidang
Pembudidayaan rumput laut

Upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengembangan kawasan Minapolitan budidaya rumput laut di Kabupaten Lombok Barat merupakan hal yang penting dalam melakukan pengembangan pada masyarakat pesisir, hal tersebut diwujudkan dengan melakukan pelatihan atau bimbingan dalam rangka pengembangan kapasitas masyarakat pesisir. Untuk itu perlunya bantuan dari pihak-pihak yang ahli dalam urusan pengembangan kapasitas bagi masyarakat pesisir, dalam hal ini peneliti mendapatkan kesimpulan berdasarkan keterangan dari bapak H. Muhammad Irham S.PI selaku Kasi Produksi Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat yang menjelaskan sebagai berikut:

“dulu saat proses penyuluhan dan pembinaan pada masyarakat di daerah pesisir dalam rangka sosialisasi program Minapolitan, kami mengundang beberapa tenaga ahli dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mereka kami undang untuk menyalurkan ilmu mereka kepada para tenaga pembantu yang kami sudah siapkan, tidak sampai situ saja kami juga memberikan kesempatan kepada para tenaga ahli dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memberikan sosialisasi dan pelatihan juga kepada masyarakat pesisir yang ada di Kabupaten Lombok Barat.” (wawancara pada tanggal 9 Oktober 2015, pukul 10.00 WITA di ruangan Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat)

Berdasarkan keterangan bapak H. Muhammad Irham S.PI dapat diketahui bahwa dengan adanya bantuan dari tenaga ahli tersebut dapat membantu dalam proses berjalannya program pengembangan kawasan

Minapolitan budidaya rumput laut di Kabupaten Lombok Barat. Bantuan tenaga ahli dari Kementerian Kelautan dan Perikanan bertujuan untuk transfer ilmu kepada para tenaga ahli di daerah agar mampu ikut serta dalam program pengembangan kawasan Minapolitan di Kabupaten Lombok Barat, selain itu kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat untuk memberikan sosialisasi langsung kepada masyarakat pesisir yang dilakukan oleh para ahli dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

2. Peluang

a) Hasil produksi rumput laut yang sangat diminati

Hasil produksi rumput laut merupakan komoditas yang sangat menguntungkan untuk dijual. Rumput laut merupakan bahan baku yang bisa dijadikan beberapa produk olahan seperti makanan dan kosmetik, oleh karena itu minat konsumen dengan komoditas rumput laut baik dipasar domestik maupun internasional sangat bagus, hal ini dikemukakan oleh Bapak Badawi salah seorang pembudidaya rumput laut di Desa Buwun Mas yang memberikan keterangan sebagai berikut:

“pasar rumput laut untuk dijual kepada para pengolah kebanyakan dalam bentuk kering, ini karena rumput laut kering lebih cepat diolah menjadi produk dibandingkan rumput laut basah yang memerlukan proses pengeringan terlebih dahulu. Pasar olahan rumput laut belakangan hari ini lagi banyak peminatnya karena rumput laut olahan dapat menghasilkan beberapa produk olahan seperti tortila, dodol, dan bahan kosmetik, selain itu rumput laut kering juga sering di *export* ke luar negeri yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan produk olahan.” (wawancara pada tanggal 18 Oktober 2015 pukul 14.11 WITA)

Berdasarkan keterangan dari bapak Badawi didapat penjelasan bahwa pasar rumput laut kering sangat diminati konsumen, ini karena rumput laut nantinya akan diolah menjadi berbagai macam produksi olahan baik berupa makanan atau menjadi bahan kosmetik. Dengan tingginya minat produsen pengolahan rumput laut tersebut menjadikan pembudidayaan rumput laut sangat menjanjikan untuk terus dikelola dan dikembangkan.

- b) Masih adanya lahan pembudidayaan yang belum dimanfaatkan oleh pembudidaya untuk budidaya rumput laut

Pembudidayaan rumput laut yang ada di Kabupaten Lombok Barat memiliki cukup lahan untuk dimanfaatkan, namun pemanfaatan lahan yang dilakukan selama ini masihlah sangat kurang. Penyebaran lahan yang cocok untuk budidaya rumput laut terpusat pada kecamatan sekotong, dengan potensi yang dimiliki Kabupaten Lombok Barat membuat pemerintah daerah berupaya memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Luas lahan yang belum dimanfaatkan sebagai lahan pembudidayaan rumput laut dijelaskan oleh bapak H. Muhammad Irham S.PI selaku Kasi Produksi Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat yang memberikan keterangan sebagai berikut:

“Lahan pembudidayaan rumput laut yang sudah dimanfaatkan oleh para pembudidaya barulah seluas 1000 hektar, sedangkan potensi pengembangan pembudidayaan rumput laut di Kabupaten Lombok Barat mencapai 2900 hektar lebih yang terpusat di Kecamatan Sekotong. Kami masih berupaya agar pemanfaatan lahan yang kita miliki di daerah bisa dimaksimalkan.” (Wawancara pada tanggal 9 Oktober 2015, pukul 10.00 WITA di ruangan Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat)

Keterangan yang diberikan oleh bapak H. Muhammad Irham S.PI disimpulkan bahwa luas lahan yang berpotensi sebagai lahan pembudidayaan rumput laut cukup luas yang belum dimanfaatkan, oleh karena itu pemanfaatan potensi lahan yang belum dimanfaatkan sebagai pembudidayaan rumput laut di Kabupaten Lombok Barat perlu dimaksimalkan lagi.

c) Daerah pembudidayaan yang sangat strategis

Penentuan daerah pembudidayaan rumput laut dalam program Minapolitan di Kabupaten Lombok Barat sudah melalui berbagai macam pertimbangan. Daerah pembudidayaan rumput laut dipilih oleh pemerintah Kabupaten Lombok Barat bertempat pada Kecamatan Sekotong, hal itu karena lokasi Kecamatan Sekotong memiliki daerah pesisir yang paling luas. Penetapan Desa Buwun Mas sebagai kawasan pelaksana program Minapolitan dijelaskan oleh bapak H. Muhammad Irham S.PI selaku Kasi Produksi Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat yang menjelaskan sebagai berikut:

“daerah pembudidayaan rumput laut yang ditetapkan sebagai kawasan pelaksanaan program Minapolitan di Kabupaten Lombok Barat terletak di Desa Buwun mas, daerah tersebut terpilih karena geografis Desa Buwun Mas berbentuk teluk dan dikelilingi oleh pulau-pulau kecil yang secara alami dapat menjadi pemecah ombak dan penahan arus laut yang berasal dari laut lepas. Faktor tersebut menjadi kelebihan Desa Buwun Mas menjadi daerah Pelaksanaan program Minapolitan budidaya rumput laut di Kabupaten Lombok Barat.” (Wawancara pada tanggal 9 Oktober 2015, pukul 10.00 WITA di ruangan Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat)

Dari wawancara di atas dengan Bapak H. Muhammad Irham S.PI dapat diketahui alasan Desa Buwun Mas Menjadi daerah pelaksana program Minapolitan, selain itu lokasi Kecamatan Sekotong sangat cocok untuk pembudidayaan rumput laut karena arus laut yang cukup tenang dan lokasi pembudidayaan berbentuk teluk yang membuat arus yang mengarah ke pantai tidak terlalu keras, selain itu daya pemecah gelombang alami berupa karang yang ada di sekitar areal pembudidayaan yang membuat lokasi tersebut cocok di jadikan tempat budidaya rumput laut. Dengan strategisnya lokasi pembudidayaan rumput laut yang dimiliki Kabupaten Lombok Barat harapannya dapat menambah pemasukan bagi daerah.

- d) Pemberian bantuan bibit unggul dan teknik budidaya baru dari pihak pemerintah Kabupaten Lombok barat dalam meningkatkan pendapatan pembudidaya

Pengembangan potensi budidaya rumput laut yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus dilakukan, salah satunya yaitu dengan melakukan inovasi jenis baru rumput laut yang nantinya akan dikembangkan untuk pembudidaya. Percobaan pembudidayaan rumput laut ini diawali dengan pemberian rumput laut jenis *Cottonii* Jumbo dan mengajarkan beberapa cara pembudidayaan seperti pembudidayaan dengan menggunakan sistem kultur jaringan. Hal ini berpeluang meningkatkan daya jual produk rumput laut sehingga memberikan dampak yang positif bagi perkembangan perekonomian masyarakat pembudidaya. Penjelasan tersebut

dijelaskan bapak Ir. Misbah selaku kepala bidang budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan yang memberikan keterangan sebagai berikut:

“kami dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat memberikan terobosan kepada para pembudidayaan rumput laut tentang teknik budidaya rumput laut dengan menggunakan teknik kultur jaringan bibit. Dengan teknik ini memudahkan para pembudidayaan rumput laut untuk mempercepat masa panen mereka, jenis rumput laut yang kami berikan merupakan jenis *Cottonii* Jumbo yang masa panen rumput laut jenis ini memakan waktu 45 hari. Namun untuk pembibitan cukup memakan waktu 20 hari. Pemilihan rumput laut *Cottonii* Jumbo dikarenakan jenis rumput laut ini lebih tahan terhadap penyakit dan lebih banyak di cari.”(Wawancara pada tanggal 9 Oktober 2015, pukul 10.00 WITA di ruangan Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat)

Terobosan yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat bertujuan memberikan peningkatan kualitas perekonomian masyarakat pesisir, hal ini sangat menguntungkan bagi para pembudidaya rumput laut karena dengan adanya terobosan bibit dan teknik budidaya tersebut dapat meningkatkan pendapatan mereka dan terus mengembangkan kegiatan pembudidayaan.

b. Faktor penghambat (Analisis Lingkungan Eksternal)

1. Kelemahan

- a) Belum adanya tindak lanjut dari *Stakeholder* yang tergabung dalam program Minapolitan

Pengembangan kawasan Minapolitan di kawasan Desa Buwun Mas sudah dilaksanakan mulai tahun 2010 hingga sekarang, namun dalam pelaksanaannya dirasa masih belum maksimal. Hal ini karena masih kurangnya tindak lanjut dari para *stakeholder* untuk mengembangkan

program Minapolitan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada bapak H.Muhammad Irham S.PI selaku Kasi Produksi Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat yang memberikan keterangan sebagai berikut:

”proses kinerja dari para *stakeholder* yang tergabung dalam program Minapolitan di Kabupaten Lombok Barat sebenarnya sudah di tetapkan,kami di Kabupaten Lombok Barat sudah menindaklanjuti keputusan menteri Nomor 35 tahun 2010 tersebut dengan membuat SK Bupati Nomor 1471/XI/Dislutkan/2010 yang di dalamnya sudah di tentukan siapa saja yang menjadi *stakeholder* dalam program Minapolitan ini, namun dalam pelaksanaannya masih belum ada. Para *stakeholder* kebanyakan lebih berkonsentrasi pada program mereka masing-masing, itulah mengapa pengembangan kawasan Minapolitan di Kabupaten Lombok Barat masih belum optimal” (Wawancara pada tanggal 5 Oktober 2015 Pukul 13.21 WITA)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada bapak H. Muhammad Irham S.PI dapat diketahui bahwa pengembangan kawasan Minapolitan yang dilakukan oleh para *stakeholder* masih belum optimal, hal ini karena para *stakeholder* masih berkonsentrasi pada program kerja mereka.

b) Keterbatasan tenaga ahli dalam pengimplementasian program Minapolitan

Pelaksanaan program Minapolitan di Kabupaten Lombok Barat mulai dari tahun 2010 hingga sekarang masih kurang optimal, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya yaitu keterbatasan Sumber Daya Manusia yang berkompeten dibidang tersebut. Keterbatasan Sumber Daya Manusia tersebut dikarenakan masih belum berkompetennya SDM yang ada dan kurangnya SDM yang akan ikut serta dalam pelaksanaan program Minapolitan tersebut. Hal ini disadari oleh Bapak H. Muhammad Irham S.PI

selaku Kasi Produksi Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Lombok Barat yang memberikan keterangan sebagai berikut:

“dalam pelaksanaan program Minapolitan yang dilakukan di Kabupaten Lombok Barat selama ini masih belum maksimal, ini dikarenakan keterbatasan SDM yang berkompeten dibidang ini. di Dinas Kelautan dan Perikanan saja SDM yang berkerja dalam melaksanakan program tersebut hanya tiga orang saja dan itupun mereka masih melaksanakan tugas lain yang masih didalam ruang lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat. Itu yang mengakibatkan pelaksanaan program Minapolitan di Kabupaten Lombok Barat masih Belum optimal”. (Wawancara pada tanggal 5 Oktober 2015 Pukul 13.21 WITA)

- c) Masyarakat pembudidaya yang masih belum terlalu menguasai teknologi budidaya yang moderen

Masyarakat pesisir yang rata-rata merupakan masyarakat yang berada di kelas menengah kebawah membuat mereka sulit untuk berkembang. Kehidupan masyarakat pesisir yang ada di Kabupaten Lombok Barat kebanyakan berada di daerah pedesaan yang jauh dari pusat kota, hal ini yang mengakibatkan perkembangan kehidupan masyarakat pesisir sangatlah berbeda dengan masyarakat kota ataupun masyarakat pinggiran kota. Perbedaan perkembangan kehidupan yang paling mencolok yaitu dalam segi teknologi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat di daerah pesisir yang mengandalkan kekayaan laut rata-rata masih menggunakan teknologi tradisional dalam mengolah hasil laut yang mereka dapat. Hal tersebut dapat terlihat pada para pembudidaya rumput laut di Kecamatan Sekotong yang rata-rata masih menggunakan peralatan tradisional dalam proses budidaya rumput laut, pernyataan tersebut diperjelas oleh keterangan

dari Bapak H. Muhammad Irham S.PI yang memberi keterangan sebagai berikut:

“untuk pembudidaya rumput laut di Kecamatan sekotong memang rata-rata masih menggunakan teknologi tradisional seperti dalam proses penjemuran rumput laut mereka hanya menggunakan alas terpal yang diletakkan di tanah. Padahal dengan proses penjemuran itu rumput laut bisa tercampur dengan pasir pantai atau kotoran hewan yang berterbangan yang bisa hinggap di rumput laut. Itu yang membuat hasil yang didapat pembudidaya kurang higienis dan kotor sehingga berpengaruh pada harga jual rumput laut.” (Wawancara pada tanggal 5 Oktober 2015 Pukul 13.21 WITA)

Pernyataan pada halaman 145 diperkuat juga oleh keterangan dari Bapak Badawi selaku pembudidaya rumput laut di Desa Buwun Mas yang memberikan keterangan sebagai berikut:

“iya mas, mau bagai mana lagi saya pakai terpal karena cuma itu alat jemur yang saya punya, memang ada alat jemur yang dikasih dari Pemerintah kabupaten Lombok Barat tapi itu masih sedikit jadinya kalau mau pakai harus gantian, di sini memang ada pembudidaya lain punya alat penjemur yang bagus tapi mereka biasanya punya uang lebih untuk beli alat penjemur sendiri, memangsih kalau ditaruh di bawah yang cuma pakai alas terpal bisa kena pasirlah atau kotoran yang penting bisa dijual aja sudah cukup.” (wawancara pada tanggal 4 Oktober 2015 pukul 13.23 WITA)

Penjelasan dari kedua narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa penguasaan teknologi dimasyarakat pesisir khususnya pada para pembudidaya rumput laut cenderung lambat, hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran para pembudidaya terhadap kualitas hasil panen rumput laut yang mereka akan jual. Salah satu lokasi masyarakat pesisir yang ada di Kabupaten Lombok Barat yaitu di desa Buwun Mas yang mana desa ini merupakan Desa yang melaksanakan program Minapolitan budidaya rumput laut. Para pembudidaya rumput laut yang ada dikawasan pelaksana program

Minapolitan budidaya rumput laut kebanyakan selama ini masih berada pada garis kemiskinan dan tidak bisa untuk mengembangkan pembudidayaan mereka sehingga masih banyaknya para pembudidaya yang masih menggunakan teknologi tradisional

d) Masih sulitnya para pembudidaya mendapatkan modal

Kemiskinan yang rata-rata terjadi dimasyarakat pesisir yang ada di Kabupaten Lombok Barat kebanyakan disebabkan belum maksimalnya pemanfaatan hasil laut yang menjadi penghasilan masyarakat pesisir. Selain itu kemiskinan yang dialami oleh masyarakat pesisir dikarenakan keuntungan yang didapat dari hasil memanfaatkan kekayaan laut tidak begitu besar, hal ini yang mengakibatkan sulitnya masyarakat pesisir untuk berkembang. Hal ini dirasakan oleh Bapak Kadis salah seorang petani rumput laut di Desa Buwun Mas yang memberikan keterangan sebagai berikut:

“iya dek, saya selama budidaya rumput laut masih kesulitan untuk nerusin budidaya rumput laut, hasil panen yang saya dapat masih kurang untuk lanjutin budidaya rumput laut. Biasanya untuk lanjutin budidaya lagi saya tunggu bantuan modal yang dikasih dari pemerintah untuk modal budidaya rumput laut saya. Tapi tidak selalu ada makanya supaya bisa lanjutin budidaya saya biasanya kerja sampingan kayak tukang bangunan, dan garap sawah orang untuk ngumpulin modal biar bisa budidaya rumput laut lagi(wawancara pada tanggal 11 Oktober 2015 pukul 11.23 WITA)

Keterangan dari Bapak Kadis memberikan gambaran bahwa kebutuhan modal usaha para pembudidaya rumput laut masih mengalami kendala. Untuk melanjutkan proses budidaya para pembudidaya rumput laut biasanya melakukan pekerjaan sampingan untuk mengumpulkan modal, hal tersebut

mengakibatkan masyarakat pesisir tidak dapat melakukan proses pemanfaatan kekayaan laut di sekitar mereka karena modal untuk mereka bekerja masih sedikit atau tidak ada sama sekali.

Dampak yang dihasilkan oleh ketidak adanya modal untuk melakukan pembudidayaan adalah para pembudidaya susah untuk membiayai usaha pembudidayaan rumput laut mereka dan roda perekonomian mereka akan terkendala karena tidak adanya pemasukan dari hasil laut yang mereka kelola.

2. Ancaman

- a) Ketidak stabilan harga jual rumput laut basah ataupun kering yang berlaku dipasaran

Penjualan hasil panen rumput laut yang dijual oleh para pembudidaya kepada para pengepul rumput laut masih mengalami kendala. Kendala tersebut diakibatkan oleh harga jual yang dipatok oleh para pengepul masih tidak stabil, hal ini diakibatkan permainan harga para pengepul rumput laut dan belum adanya penentuan harga dasar komoditas rumput laut. Permasalahan ketidak stabilan harga tersebut dirasakan oleh Bapak Kadis seorang pembudidaya rumput laut di desa Buwun Mas yang memberikan keterangan sebagai berikut:

“saya kalau mau jual hasil panen rumput laut dipengepul agak kurang percaya karena harga setiap saya mau jual hasil panen selalu harganya berubah, saya tidak tau apa mereka ada permainan harga atau tidak supaya dapat untung tapi mau-gakmau saya jual ke mereka karena saya sudah minjam modal di mereka yang konsekuensinya saya harus jual ke para pengepul rumput laut sebagai syarat peminjaman modal.”
(wawancara pada tanggal 11 Oktober 2015 pukul 11.23 WITA)

Permasalahan ketidak stabilan harga juga diperkuat dari keterangan Bapak H. Muhammad Irham SP.I selaku KASI Bidang Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat yang memberikan keterangan sebagai berikut:

“untuk komoditas rumput laut memang dari dinas perikanan belum menentukan harga jual komoditas rumput laut ini, jadi bisa saja berubah-ubah tergantung permintaan. Untuk permasalahan berubah-ubahnya harga rumput laut oleh para tengkulak itu merupakan masalah bisnis masing-masing kami hanya memberikan himbauan untuk tidak terlalu memberatkan para pembudidaya rumput laut.” (wawancara pada tanggal 5 Oktober 2015 Pukul 13.21 WITA)

Keterangan dari kedua narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa permasalahan ketidak stabilan harga rumput laut diakibatkan oleh permainan harga dari para tengkulak yang menjadi penerima hasil panen para pembudidaya rumput laut, selain itu permintaan rumput yang masih belum stabil membuat harga komoditas rumput laut ikut tidak stabil.

b) Masih banyaknya pembudidaya yang belum membudidayakan rumput laut secara terus-menerus

Pembudidayaan rumput laut di Kabupaten Lombok Barat sudah sejak lama dilakukan. Namun dalam pelaksanaan pembudidayaan rumput laut para pembudidayaan tidak dapat melakukan kegiatan pembudidayaan secara terus menerus, hal ini karena para pembudidaya harus melihat keadaan laut apakah baik atau tidak untuk di lakukan pembudidayaan. Namun penyebab utama dari masih banyaknya pembudidaya rumput laut melakukan kegiatan pembudidaya secara rutin adalah karena keterbatasan modal yang mereka miliki sehingga mereka harus terlebih dahulu mengumpulkan modal dengan

berkerja sampingan, hal ini disampaikan oleh Bapak Badawi selaku salah satu ketua kelompok pembudidaya rumput laut di Desa Buwun Mas yang memberikan keterangan sebagai berikut:

“orang-orang pembudidaya rumput laut di Desa Buwun Mas memang tidak selalu membudidayakan rumput laut pada saat musimnya, kebanyakan mereka nunda masa budidaya karena melihat keadaan arus di pantai apakah bagus atau tidak. Selain itu juga maksud tidak ngelanjutin budidaya lagi yaitu untuk mengumpulkan modal budidaya selanjutnya. jadi tidak terus-terusan mereka membudidayakan rumput laut, sebagai gantinya mereka kebanyakan beralih kerja jadi kuli bangunan. Mungkin dengan adanya kerjaan lain mereka bisa nambahin pemasukan buat keluarga dan modal untuk budidaya rumput laut selanjutnya.” (wawancara pada tanggal 4 Oktober 2015 pukul 13.23 WITA)

Pernyataan dari Bapak Badawi diperkuat juga dengan keterangan dari Bapak Kadis yang memberikan terangan sebagai berikut:

“saya tidak rutin budidayain rumput laut paling selang dua atau tiga masa budidaya baru saya budidaya lagi, tergantung kalau ada modal baru saya ngelanjutin budidaya. Untuk dapat modal budidaya biasanya saya nunggu bantuan dari pemerintah atau ngumpulin modal dari kerja sampingan jadi buruh bangunan.” (wawancara pada tanggal 11 Oktober 2015 pukul 09.45 WITA)

Berdasarkan keterangan dari kedua narasumber tersebut diketahui bahwa rata-rata masyarakat yang membudidayakan rumput laut di Desa Buwun Mas tidak terus menerus membudidayakan rumput laut karena keterbatasan modal. Selain itu para pembudidaya terlebih dahulu harus menunggu sampai terkumpulnya dana untuk proses pembudidayaan selanjutnya. Perolehan dana untuk pembudidayaan didapat melalui mencari pekerjaan sampingan atau meminjam uang kepada makelar atau biasa disebut tengkulak.

c) Perubahan iklim yang tidak menentu

Perubahan iklim yang terjadi diseluruh permukaan bumi membuat perubahan musim yang tidak menentu, selain itu arus laut yang mengakibatkan gelombang laut yang tiba-tiba bisa berubah-ubah membuat daerah pesisir yang paling awal merasakan dampak tersebut. Perubahan iklim yang terjadi membuat Daerah pesisir sebagai daerah paling mengandalkan hasil laut paling besar menerima dampaknya, hal ini dikarenakan perubahan iklim yang terjadi membuat hasil tangkap atau pembudidayaan mereka menjadi menurun. Perubahan iklim yang terjadi dirasakan oleh Bapak Kadis salah satu pembudidaya rumput laut di Desa Buwun Mas yang memberikan keterangan sebagai berikut:

“cuaca sekarang suka berubah-ubah kadang pas kadang hujan apa lagi kalau musim hujan atau lagi angin besar saya agak khawatir kalo rumput laut yang saya budidayain akan rusak atau hasilnya jadi jelek apalagi kalau lagi masa panen yang rumput lautnya harus dikeringin pakai panas matahari, itu kalau lagi hujan rumput lautnya jadi agak lembap yang jadinya ngaruhin harga jual rumput laut.” (wawancara pada tanggal 11 Oktober 2015 pukul 09.49 WITA)

Perubahan iklim yang dirasakan oleh Bapak Kadis berdampak dari hasil rumput laut yang bapak dapat, cuaca yang tiba-tiba berubah dari panas menjadi hujan membuat kualitas rumput laut yang didapat menjadi menurun karena udara yang lembap. Dengan perubahan iklim yang tidak menentu tersebut membuat para pembudidaya harus menerima turunnya kualitas hasil panen yang didapat, hal tersebut membuat pemasukan bagi para

pembudidaya menjadi menurun tidak menentu karena kualitas rumput laut yang tidak baik.

- d) Adanya perkembangan penyakit/parasit yang menjangkiti tanaman rumput laut

Pembudidayaan rumput laut yang memanfaatkan lahan pantai sebagai tempat pembudidayaan belakangan ini dicemaskan oleh berkembangnya penyakit rumput laut yang menjangkiti lahan budidaya mereka. Hal ini diutarakan oleh salah seorang pembudidaya rumput laut yang menjelaskan sebagai berikut:

“beberapa bulan terakhir ini kita petani rumput laut khawatir rumput laut yang kita budidayakan kena penyakit karena ada beberapa teman kami yang kena penyakit parasit rumput laut dan akhirnya dia gagal panen karena rumput lautnya mati. Ada juga yang rumput lautnya dimakan sama hewan laut seperti penyu yang kadang-kadang suka masuk ke daerah pesisir kami untuk mencari makan” (wawancara pada 11 Oktober 2015 pukul 12.00 WITA)

Berdasarkan pernyataan dari salah satu pembudidaya rumput laut, peneliti mengambil kesimpulan bahwa perkembangan penyakit rumput laut membuat pembudidaya merasa resah, apa lagi dalam melakukan pembudidayaan rumput laut mereka mengeluarkan modal dan tenaga yang tidak sedikit. Para pembudidaya rumput laut khawatir pertumbuhan rumput laut mereka terancam tidak bisa berkembang dan bahkan mati sehingga menjadikan petani rumput laut terancam gagal panen.

D. Analisis Data

1. Strategi Pengembangan Kawasan Minapolitan Budidaya Rumput Laut dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir

a. Perluasan Areal Budidaya

Perluasan areal budidaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat merupakan upaya pengembangan potensi pemanfaatan rumput laut yang hingga kini masih belum maksimal. Perluasan merupakan upaya dalam melakukan pembangunan daerah kearah yang lebih baik. Siagian (2008:4) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”, sedangkan menurut Ginanjar Kartasmita (1996) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”. Berdasarkan pendapat dari kedua pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengembangan kawasan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang bertujuan untuk memberikan perubahan yang lebih baik. Pembangunan merupakan suatu hal yang tidak bisa dipungkiri sebab zaman yang akan semakin maju dan dinamika pertumbuhan yang semakin berkembang, oleh sebab itu pembangunan sangatlah diperlukan demi mengimbangi perkembangan zaman yang semakin maju. Pembangunan bagi daerah memiliki arti penting dalam pelaksanaan, seperti yang di jelaskan oleh Siagian (2008:4) menjelaskan tujuh aspek pembangunan pada halaman 153:

- a. Pembangunan merupakan suatu aspek pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang di satu tempat bersifat independen akan tetapi dipihak lain merupakan “bagian “ yang bersifat tanpa akhir.
- b. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk di tetapkan. Dengan kata lain, jika dalam rangka dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terdapat kegiatan yang kelihatannya seperti pembangunan, akan tetapi sebenarnya tidak ditetapkan secara sadar dana hanya terjadi secara sporadis atau insidental, kegiatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pembangunan.
- c. Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, jangka sedang, dan jangka pendek. Seperti dimaklumi merencanakan berarti mengambil keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan pada jangka waktu tertentu di masa depan.
- d. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan. Pertumbuhan dimaksudkan sebagai peningkatan kemampuan suatu negara untuk berkembang dan tidak sekedar mampu mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, dan eksistensinya. Perubahan mengandung makna bahwa setiap negara harus bersikap antisipatif dan proaktif dalam menghadapi tuntutan situasi yang berbeda, itu dapat diperediksikan sebelumnya atau tidak. Dengan kata lain, suatu negara yang sedang membangun tidak akan bisa juga hanya mampu mempertahankan status quo yang ada.
- e. Pembangunan mengarah pada modernitas, modernitas di sini diartikan sebagai cara hidup yang lebih baik dari sebelumnya, cara berfikir yang rasional dan sistem budaya yang kuat tetapi fleksibel. Walaupun demikian, perlu diingatkan bahwa konsep modernitas tidak identik dengan “cara hidup gaya barat”. Setiap negara yang modern harus tetap mempertahankan jati dirinya yang bersumber dari nilai-nilai yang dipandang luhur oleh negara yang bersangkutan.

- f. Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan bersifat multidimensional. Artinya, modernitas tersebut mencakup seluruh segi kehidupan bangsa dan negara, yang dapat menjelaskan bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.
- g. Semua hal yang telah di singgung di atas ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa sehingga negara yang bersangkutan semakin kokoh pondasinya dan semakin mantap keberadaannya sehingga negara akan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia mampu menciptakan situasi kerjasama antar bangsa.

Berdasarkan ketujuh aspek pembangunan menurut Siagian (2008:4) tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwa pembangunan merupakan unsur yang tidak dapat dilepaskan dari desakan untuk melakukan modernisasi dari segala unrus paradigma masyarakat. Oleh karena itu peneliti mengkaitkan proses pembangunan yang sudah dijelaskan di atas dengan proses pengembangan areal oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Pengembangan areal yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat dilakukan karena masih banyaknya potensi lahan untuk pembudidayaan rumput laut yang belum dimanfaatkan secara maksimal, terlihat dari potensi lahan pembudidaya rumput laut yang dimiliki Kabupaten Lombok Barat sebesar 2900 Hektar namun yang baru dimanfaatkan baru 1000 Hektar. Hal ini yang mendorong Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat untuk serius memanfaatkan potensi ini untuk dikembangkan secara maksimal. Pemanfaatan lahan pembudidayaan rumput laut di Kabupaten Lombok Barat yang dimanfaatkan sebagai pembudidayaan rumput laut dapat dilihat pada tabel 25 halaman 155:

Tabel 25. Perkembangan Pemanfaatan Lahan Pembudidayaan Rumput laut di Kabupaten Lombok Barat

No	Tahun	Luas Lahaan Pembudidayaan (Ha)
1	2009	183,1
2	2010	183,1
3	2011	183,1
4	2012	1.944,25
5	2013	1.000,00
6	2014	1.000,00

Sumber: Laporan tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat tahun 2009-2014

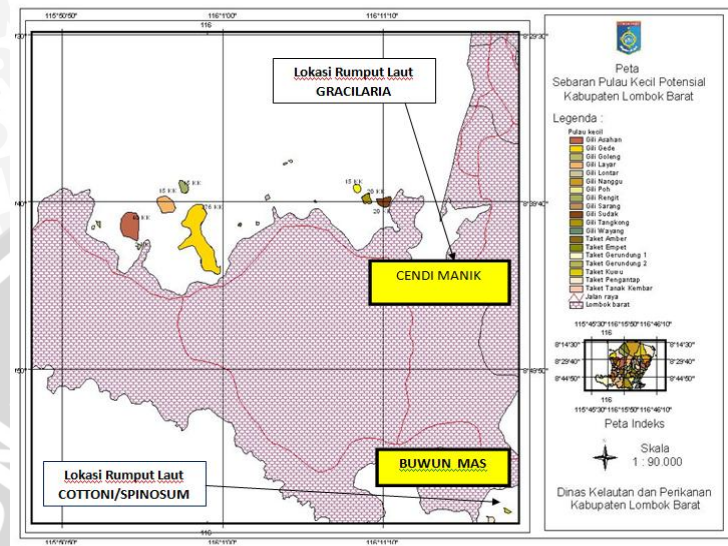
Berdasarkan data tabel di atas dapat diketahui bahwa pengembangan areal budidaya rumput laut yang ada di Kabupaten Lombok Barat terus mengalami peningkatan, hal ini bisa dilihat dari segi pemanfaatan lahan yang digunakan sebagai tempat pembudidayaan rumput laut terus diupayakan pemaksimalannya. Namun berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2013 pemanfaatan lahan pembudidayaan rumput laut mengalami penurunan, hal ini diakibatkan oleh sebagian para pembudidaya rumput laut berpindah pemanfaatan lahan yang sudah ditempati untuk pembudidayaan ikan keramba seperti lobster, kerapu, dll. Dengan berkurangnya pemanfaatan lahan tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap proses produksi rumput laut, hal ini karena para pembudidaya yang masih melakukan pembudidayaan rumput laut masih melakukan aktivitas pembudidayaan walaupun ada diantara mereka yang berpindah profesi menjadi pembudidaya ikan.

Upaya yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat dalam mengembangkan pemanfaatan areal budidaya rumput laut yaitu dengan cara memetakan terlebih dahulu daerah mana saja yang akan dimanfaatkan untuk dijadikan lokasi pembudidayaan rumput laut nantinya. Pemetaan potensi lahan pembudidayaan rumput laut di Kabupaten Lombok Barat memiliki banyak lokasi, namun dalam penerapannya harus menganalisa terlebih dahulu apakah lahan tersebut cocok untuk dimanfaatkan atau tidak. Peneliti mendapati keterangan dari hasil wawancara kepada bapak Ir. Misbah sebagai Ketua Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat yang memberikan keterangan:

“pengembangan kawasan budidaya rumput laut yang kami lakukan saat ini berkonsentrasi pada dua lokasi yaitu di Candi Manik yang di daerah tersebut kami dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat mengembangkan jenis rumput laut *gracikaria* yang dibudidayakan di daerah tambak, kemudian kami juga memiliki daerah Buwun Mas sebagai sentra pembudidayaan rumput laut *cottonii*. Kedua jenis rumput laut yang kami kembangkan merupakan jenis rumput laut yang cocok untuk dikembangkan pada daerah pesisir Kabupaten Lombok Barat “ (wawancara pada tanggal 9 Oktober 2015, pukul 10.00 WITA di ruangan Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat).

Potensi pengembangan kawasan Minapolitan di Kabupaten Lombok Barat sangatlah memberikan kemudahan bagi para pembudidaya, hal ini dikarenakan ketersediaan lahan yang ada di Kabupaten Lombok Barat yang masih belum dimanfaatkan dengan maksimal sehingga masih adanya potensi yang menjanjikan untuk mengembangkan potensi lebih lanjut. Menyikapi masih kurangnya pemanfaatan lahan pembudidayaan rumput laut Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat memiliki dua lokasi pembudidayaan rumput laut yang

sudah mulai beroperasi dan memberikan hasil dari pembudidayaan tersebut, kedua lokasi pembudidayaan rumput laut sudah dapat dilihat dari gambar 17 berikut:



Gambar 17. Kawasan Pengembangan Komoditas Unggul Rumput Laut di Kabupaten Lombok Barat T.A 2014

Sumber: Program Kerja Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat tahun 2014

Berdasarkan gambar di atas membuktikan bahwa program Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Barat dalam pengembangan kawasan Minapolitan budidaya rumput laut mempunyai dua lokasi pengembangan produk unggulan rumput laut, dari ke dua lokasi tersebut daerah Buwun Mas merupakan daerah yang menjadi pusat pengembangan rumput laut. Daerah Buwun Mas merupakan daerah yang ditetapkan sebagai daerah pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Lombok Barat, dengan ditetapkannya kawasan Buwun Mas sebagai Kawasan Minapolitan memberikan kemudahan untuk mengembangkan kawasan tersebut. Daerah Buwun Mas merupakan lokasi yang ideal dalam pelaksanaan pembudidayaan rumput laut hal ini dikarenakan daerah tersebut masih sangatlah asri/alami dan belum banyak terjadi pencemaran baik itu dari rumah tangga

ataupun industri, selain itu arus gelombang yang ada di daerah pesisir tidak terlalu besar karena adanya pemecah gelombang alami sehingga cocok untuk melakukan kegiatan pembudidayaan rumput laut. Kawasan kedua pengembangan komoditas rumput laut yaitu pada daerah Candi Manik dimana pada daerah ini pengembangan rumput laut bertempat di areal payau/*Estuarine Zone*, dengan penempatan areal tersebut memungkinkan para pembudidaya menggunakan sistem tambak rumput laut. Jenis rumput laut yang dikembangkan di daerah ini berbeda dengan rumput laut yang dikembangkan di daerah Buwun Mas, pada daerah Candi Manik mengembangkan rumput laut jenis *Gracilaria* yang cocok untuk di kembangkan diareal payau. Untuk selanjutnya pengembangan pembudidayaan rumput laut di Candi Manik masih melalui proses penyesuaian dan pengkajian lebih dalam dari pihak dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat karena daerah tersebut masyarakat daerah Candi Manik kebanyakan berprofesi sebagai nelayan dan pembudidaya ikan kerapu, oleh karena itu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat Masih melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk ikut membudidayakan rumput laut. Untuk selanjutnya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat akan terus mengembangkan areal budidaya di lokasi-lokasi lain yang ada di Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan data potensi lahan pembudidayaan rumput laut yang sudah dijelaskan pada bagian penyajian data.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan peneliti, ditemukan beberapa fakta bahwa perluasan areal budidaya rumput laut dalam agenda program Minapolitan sudah cukup baik. Selain itu Berdasarkan data yang

sudah dijelaskan di atas menyebutkan bahwa perluasan areal budidaya rumput laut di Kabupaten Lombok Barat sudah dilakukan di dua lokasi yaitu bertempat di Desa Candi manik dan Desa Buwun Mas, kemudian dalam pengembangannya masih akan terus diperluas ke desa-desa yang berpotensi untuk dilakukan pembudidayaan rumput laut. Pembimbingan dan evaluasi tetap akan dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat agar pelaksanaannya dapat terarah dan sesuai dengan tujuan, dengan demikian upaya yang dilakukan Dinas Perikanan Kabupaten Lombok Barat dalam mengembangkan areal budidaya sudah terencana bahkan sudah ada yang dilakukan. Sehingga tinggal melanjutkan proses pengembangan areal budidaya rumput laut ke tahap selanjutnya bertempat di lokasi yang berbeda.

b. Peningkatan Jumlah Pembudidaya

Pembangunan di daerah pesisir menjadi salah satu faktor yang paling banyak diperhatikan oleh setiap daerah, hal ini diakibatkan karena kawasan pesisir merupakan kawasan yang paling dominan terjadi kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi di kawasan pesisir sangat disayangkan karena masyarakat pesisir belum secara maksimal memanfaatkan sumber daya laut yang begitu kaya. Problematika kemiskinan pesisir ini yang membuat perlunya perhatian pemerintah daerah untuk mengatasi problematika kemiskinan yang terjadi di masyarakat pesisir, baik itu berupa bantuan modal atau program pemberdayaan masyarakat pesisir. Program bantuan yang diberikan bertujuan untuk memaksimalkan kegiatan perekonomian masyarakat pesisir, hal ini dijelaskan oleh Kusnadi (2009:38) yang mengelompokkan masyarakat pesisir menjadi tiga bagian yang dilihat dari aspek

interaksi masyarakat dengan sumber daya ekonomi yang tersedia dikawasan pesisir sebagian berikut:

- 1) Pemanfaatan langsung sumber daya lingkungan, seperti nelayan (yang pokok), pembudidayaan ikan di perairan pantai (dengan jaring apung atau keramba), pembudidayaan rumput laut/mutiara, dan penambak.
- 2) Pengolahan hasil ikan atau hasil laut lainnya, seperti mepindangan, pengeringan ikan, pengasapan, pengusaha terasi/tepung ikan, dan sebagainya.
- 3) Penunjang kegiatan ekonomi perikanan seperti toko atau warung, pemilik bengkel (montir dan las), perusahaan angkut, tukang perahu, atau buruh kasar.

Berdasarkan pengelompokan masyarakat yang dijelaskan oleh Kusnadi yang memberikan gambaran kepada peneliti seperti apa kehidupan masyarakat pesisir dalam hal berjalannya perekonomian dan bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tipe masyarakat pesisir yang dijelaskan oleh Kusnadi salah satunya yaitu menggantungkan kehidupannya pada pemanfaatan langsung sumber daya lingkungan dengan melakukan kegiatan pembudidayaan, hal ini karena kegiatan budidaya merupakan salah satu kegiatan alternatif yang sangat mudah dibandingkan dengan kegiatan nelayan tangkap. Dengan adanya kegiatan pembudidayaan merupakan cara lain dalam memanfaatkan potensi perairan pesisir yang dilakukan oleh masyarakat sekitar pesisir.

Kegiatan pembudidayaan pesisir banyak dilakukan oleh masyarakat disetiap daerah pesisir di Indonesia, salah satunya bertempat di Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat. Kawasan pesisir Kecamatan sekotong merupakan lokasi yang cocok untuk dijadikan lahan pembudidayaan, hal ini karena Kecamatan Sekotong merupakan kecamatan yang memiliki banyak daerah pesisir. masyarakat pesisir yang bertempat tinggal di Kecamatan Sekotong banyak

menggantungkan hidup mereka dengan memanfaatkan laut seperti menjadi nelayan tangkap atau menjadi pembudidaya ikan kerapu, kakap, lobster dan rumput laut. Para pembudidaya di Kecamatan Sekotong belakangan tahun ini menjadi pembudidaya rumput laut, hal ini karena rumput laut memiliki nilai ekonomis yang baik dan permintaan rumput laut yang banyak baik di pasar dalam negeri ataupun luar negeri. Selain itu produk rumput laut yang dihasilkan Kabupaten Lombok Barat merupakan produk unggulan Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga daerah harus ikut membantu mengembangkan produk unggulan tersebut.

Demi mengembangkan produk unggulan rumput laut daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat mengupayakan untuk mengembangkan usaha budidaya rumput laut di Kabupaten Lombok Barat. Salah satu upaya yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat yaitu dengan mengembangkan minat masyarakat pesisir untuk ikut membudidayakan rumput laut. Dengan upaya yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat tersebut harapannya mampu membantu masyarakat pesisir untuk meningkatkan perekonomian mereka. Selama pelaksanaan pengembangan pembudidayaan rumput laut yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat terjadi peningkatan pelaksanaan pembudidayaan rumput laut yang dilakukan oleh masyarakat pesisir yang bisa dilihat pada tabel 26 pada halaman 162:

Tabel 26. Perkembangan Pembudidaya Rumput Laut di Kabupaten Lombok Barat

No	Tahun	Jumlah Pembudidaya Rumput Laut
1	2009	731
2	2010	731
3	2011	1500
4	2012	1.500
5	2013	1.515
6	2014	1.515

Sumber: Laporan tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat tahun 2009-2014

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa perkembangan pelaksanaan pembudidayaan rumput laut di Kabupaten Lombok Barat terus meningkat. Peningkatan pembudidayaan dapat dilihat dari tabel di atas yang menunjukkan pada tahun 2009 pembudidayaan rumput laut berjumlah 731 orang, kemudian jumlah pembudidaya rumput laut terus bertambah hingga tahun 2014 mencapai angka 1.515 orang. Dengan bertambahnya jumlah pembudidaya tersebut menunjukkan bahwa minat masyarakat pesisir untuk membudidayakan rumput laut sangatlah besar, hal ini tidak lepas dari upaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat dalam mengembangkan produk rumput laut sebagai produk unggulan daerah.

Perjalanan pembimbingan pembudidayaan rumput laut dari tahun ketahun memberikan kemajuan dalam hasil panen rumput laut, hal ini dikarenakan kesadaran masyarakat pesisir sudah mulai memahami manfaat dari kegiatan pembudidayaan rumput dalam kehidupan mereka sehari-hari. pada tahun 2014 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat mengeluarkan data

mengenai kelompok-kelompok yang berhasil dibentuk dan berhasil menjalankan dampak yang positif bagi masyarakat pesisir, data tersebut dapat dilihat pada tabel yang ada dibawah ini:

Tabel 27. Nama Kelompok Pembudidaya Berdasarkan Daerah Pembudidayaan

No	Desa	Nama Kelompok	Kategori Usaha	Komoditi (Jenis Ikan)
1.	Taman Ayu	Pajar Jaya	Budidaya Ikan Air Tawar (Ikan Nila)	Ikan Nila
2.	Cendi Manik	Bareng Maju	Budidaya Air payau (Polykultur)	Rumput laut jenis <i>Gracilaria</i> sp., bandeng dan udang
		Semoga Sukses	Budidaya Air payau (Polykultur)	Rumput laut jenis <i>Gracilaria</i> sp., bandeng dan udang
		Ingin Maju	Budidaya Air payau (Polykultur)	Rumput laut jenis <i>Gracilaria</i> sp., bandeng dan udang
3.	Batu Putih	Mina Siung	Budidaya Laut	Siput Mutiara
4.	Buwun Mas	Nambung Bersatu	Budidaya Laut	Rumput Laut <i>Eucheuma cottonii</i>
		Pesisir Pantai Nambung	Budidaya Laut	Rumput Laut <i>Eucheuma cottonii</i>
		Nambung Biru	Budidaya Laut	Rumput Laut <i>Eucheuma cottonii</i>
5.	Sekotong Barat	Maju Bersama	Budidaya Laut	Rumput Laut <i>Eucheuma cottonii</i>
		Mina Segara	Budidaya Laut	Rumput Laut <i>Eucheuma cottonii</i>
		Tawun Bersatu	Budidaya Laut	Lobster
6.	Eyat Mayang	Kelape Gading	Silvofisheries	Kepiting dan Bandeng

Sumber: Laporan Tahunan Bidang Pengawasan dan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau kecil Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Barat, Tahun 2014

Berdasarkan tabel 27 kelompok pembudidayaan yang berhasil dibentuk oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat berjumlah dua belas kelompok yang tersebar di enam desa. Dari dua belas Kelompok tersebut kelompok pembudidayaan yang berkonsentrasi pada pembudidayaan rumput laut ada delapan kelompok yang tersebar di dua desa yaitu desa Candi manik dan desa Buwun Mas, untuk kelompok lainnya mereka mengembangkan budidaya seperti ikan nila, siput mutiara, lobster, kepiting dan bandeng. Pembentukan kelompok pembudidayaan tersebut tidak lepas dari upaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kabupaten Lombok Barat, untuk itu perlunya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan program pemerintah daerah tersebut. Pengembangan pembudidaya yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat memiliki beberapa pola pengembangan yang dirancang, hal ini untuk memberikan kontroling yang tepat sehingga dalam pelaksanaannya dapat menjadi evaluasi yang berguna bagi kedepannya. Adapun pola pengembangan yang telah dirancang oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat antara lain sebagai berikut:

1. Pola Pelaksanaan Kegiatan

Mekanisme pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan budidaya rumput laut ini dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat perikanan sepenuhnya. Dengan mekanisme tersebut diharapkan tumbuh semangat kebersamaan, rasa memiliki dan melestarikan atau memelihara keberlangsungan kegiatan. Semua komponen pengembangan

kegiatan seperti penyediaan sarana produksi, persiapan lahan budidaya dan pengelolaan kelembagaan dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok penerima manfaat dengan pendampingan oleh instansi terkait.

2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Survey lokasi kegiatan budidaya dilakukan agar dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan budidaya perikanan, yang meliputi aspek teknis, sosial masyarakat, dan kesiapan kelompok masyarakat pembudidaya penerima manfaat.

3. Identifikasi dan Verifikasi Kelompok Penerima Manfaat

Identifikasi dan verifikasi penerima manfaat dilakukan untuk menentukan kelompok sasaran yang memenuhi kriteria calon penerima seperti:

- Keberadaan dan aktivitas Kelompok
- Kesiapan dan kesediaan menerima program kegiatan
- Keterampilan dan keahlian dalam melakukan budidaya
- Potensi lahan budidaya yang dimiliki kelompok
- Jumlah anggota yang terlibat dalam kegiatan.

4. Pelaksanaan Kegiatan

Kelompok penerima manfaat yang sudah lulus verifikasi, akan tunduk dengan mekanisme pedoman pelaksanaan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.

Berdasarkan ke empat pola pengembangan yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat memberikan gambaran bahwa upaya yang dilakukan pemerintah daerah sangat memperhatikan potensi sumber daya

alam yang dimiliki, hal ini juga dilakukan demi mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat pesisir di Kabupaten Lombok Barat. Penetapan pola strategi pengembangan minat masyarakat pesisir tersebut tidak lepas dari upaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat yang memiliki tujuan yang sudah ditetapkan bersama, dengan adanya tujuan yang ditetapkan maka dalam pelaksanaan akan terarah. Peneliti mendapati keterangan tentang tujuan dari pembentukan pola strategi pengembangan minat masyarakat pesisir yang dijelaskan oleh Bapak Muhammad Irham S.PI sebagai Kepala Seksi Produksi Budidaya yang menjelaskan sebagai Berikut:

“Tujuan dari pada pengembangan minat masyarakat dalam mengembangkan komoditas unggul ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat pesisir melalui pengembangan komoditas unggulan yang berbasis potensi sumberdaya alam lokal serta terfasilitasinya sarana produksi untuk memacu penumbuhan sentral-sentral usaha ekonomi produktif dan berdaya saing secara luas. Kemudian untuk sasarannya pengembangan komoditas unggulan kami manargetkan antara lain: Terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat pesisir, terciptanya lapangan kerja yang produktif di kawasan pesisir, meningkatnya partisipasi masyarakat pesisir dalam berusaha secara produktif, termanfaatkannya potensi sumberdaya alam komoditas unggulan secara optimal dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. Harapannya dengan adanya upaya dari pemerintah daerah ini dapat dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat pembudidaya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.” (Wawancara pada tanggal 13 Oktober 2015 pukul 10.45 WITA)

Berdasarkan keterangan dari bapak Muhammad Irham S.PI sebagai Kepala Seksi Produksi Budidaya, peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa tujuan dari dibentuknya pola pengembangan minat masyarakat pesisir adalah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat pesisir, untuk lebih memanfaatkan potensi sumber daya yang ada disekitar mereka sehingga dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat pesisir. Dengan adanya upaya dari Dinas

Kelautan dan Perikanan harapannya masyarakat dapat memanfaatkannya dengan baik, selain itu upaya Dinas Kelautan dan Perikanan tersebut harapannya dapat menumbuhkan jiwa wirausaha masyarakat pesisir yang nantinya memunculkan industri-industri kecil yang akan menopang perekonomian masyarakat pesisir.

c. Pengembangan Teknologi Budidaya

Perkembangan zaman yang sudah mulai berubah dan ilmu pengetahuan yang semakin luas membuat perkembangan teknologi semakin maju. Untuk mengimbangi perkembangan zaman tersebut perlunya inovasi teknologi agar bisa mengikuti alur perkembangan zaman, namun dalam mengimbangi perkembangan zaman perlunya upaya untuk mencapai kemajuan tersebut. Upaya yang diperlukan antara lain melalui perubahan cara berfikir individu dan juga adanya bantuan finansial dalam mengimbangi majunya teknologi, dengan adanya kedua unsur tersebut kemajuan zaman dapat dicapai dengan baik. Kemajuan teknologi yang dicapai akan mempermudah dalam proses kinerja, oleh karena itu dengan adanya perkembangan teknologi dapat merubah pola kinerja yang dulunya memerlukan waktu yang lama berubah menjadi sangat singkat, hal ini yang sangat berguna diimplementasikan kepada masyarakat pesisir yang memiliki segudang permasalahan. Perbaikan teknologi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat pesisir dimaksudkan untuk merubah perilaku sehari-hari masyarakat yang condong mengarah kepada ketidak efektifan dalam kegiatan, oleh karena itu perubahan dilakukan untuk merubah perilaku tersebut. Perkembangan teknologi merupakan salah satu tindakan modernisasi yang didasari terhadap perbaikan kualitas hidup masyarakat, untuk itu paradigma modernisasi sangat

mempengaruhi pengembangan masyarakat ke arah yang lebih baik. Seperti dijelaskan oleh Siagian (2008:4) yang menjelaskan 7 aspek pembangunan sebagai berikut:

- a. Pembangunan merupakan suatu aspek: pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang di satu tempat bersifat independen akan tetapi di pihak lain merupakan bagian yang bersifat tanpa akhir.
- b. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk ditetapkan. Dengan kata lain, jika dalam rangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terdapat kegiatan yang kelihatannya seperti pembangunan, akan tetapi sebenarnya tidak ditetapkan secara sadar dan hanya terjadi secara sporadis atau insidental, kegiatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pembangunan.
- c. Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, jangka sedang, dan jangka pendek. Seperti dimaklumi merencanakan berarti mengambil keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan pada jangka waktu tertentu dimasa depan
- d. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan. Pertumbuhan dimaksudkan sebagai peningkatan kemampuan suatu negara untuk berkembang dan tidak sekedar mampu mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, dan eksistensinya. Perubahan mengandung makna bahwa setiap negara harus bersikap antisipatif dan proaktif dalam menghadapi tuntutan situasi yang berbeda, itu dapat diprediksikan sebelumnya atau tidak. Dengan kata lain, suatu negara yang sedang membangun tidak akan bisa juga hanya mampu mempertahankan status quo yang ada.
- e. Pembangunan mengarah pada modernitas, modernitas di sini diartikan sebagai cara hidup yang lebih baik dari sebelumnya, cara berfikir yang rasional dan sistem budaya yang kuat tetapi fleksibel. Walaupun

demikian, perlu di ingatkan bahwa konsep modernitas tidak identik dengan “cara hidup gaya Barat”. Setiap negara yang modern harus tetap mempertahankan jati dirinya yang bersumber dari nilai-nilai yang dipandang luhur oleh negara yang bersangkutan.

- f. Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan bersifat multidimensional. Artinya, modernitas tersebut mencakup seluruh segi kehidupan bangsa dan negara, yang dapat menjelaskan bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.
- g. Semua hal yang telah disinggung di atas ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa sehingga negara yang bersangkutan semakin kokoh pondasinya dan semakin mantap keberadaannya sehingga negara akan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia mampu menciptakan situasi kerjasama antar bangsa.

Modernisasi merupakan unsur yang tidak lepas dari paradigma pengembangan, hal ini terlihat dari dampak yang dihasilkan oleh modernisasi membuat perubahan pola pikir masyarakat yang semakin maju. Namun terjadinya modernisasi di masyarakat dapat terhambat karena permasalahan masih kurangnya kemampuan dan modal. hal ini lebih terasa efeknya oleh masyarakat yang hidup di daerah terpencil yang dimana masyarakat tersebut tinggal di daerah yang jauh dari kehidupan kota yang modern sehingga proses modernisasi di daerah terpencil berjalan lambat, selain itu masyarakat yang tinggal di daerah terpencil memiliki keterbatasan kemampuan dan modal yang membuat masyarakat ini lebih susah dalam melakukan pengembangan ke arah modernisasi, Banyak faktor yang dapat mempengaruhi terhambatnya proses modernisasi di masyarakat, hal ini seperti yang di jelaskan oleh Sanderson dalam Satria (2015:127) yang

menjelaskan pembagi tiga asumsi pokok kenapa masyarakat sulit untuk berkembang yang dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Keterbelakangan cenderung dilihat sebagai suatu “keadaan asli” (original state), sebagai suatu keadaan masyarakat yang telah ada dalam aneka bentuk. Keterbelakangan terjadi akibat belum maksudnya; kapitalisme, sehingga untuk keluar dari ketertinggalan, kapitalisme-lah jawabannya
- 2) Keterbelakangan merupakan akibat dari banyaknya kekurangan yang ada; di dalam suatu masyarakat, seperti kekurangan kapital sehingga untuk mengatasinya diperlukan formasi kapital baru melalui difusi modal dan teknologi
- 3) Masyarakat terbelakang biasanya tidak mempunyai semacam kesadaran atau mentalitas yang menawarkan perkembangan. Kemajuan terjadi bila orang telah mengadopsi pemikiran rasional, nilai-nilai yang berorientasi masa depan, dan sistem etik. Sementara itu, umumnya nilai-nilai lokal masyarakat dianggap tidak kondusif bagi pencapaian kemajuan.

Berdasarkan penjelasan diatas memberikan gambaran bagaimana masyarakat kelas bawah sangat kesulitan dalam mengembangkan pola pikir, hal ini yang menjadi dasar bahwa masyarakat pesisir merupakan masyarakat yang tergolong pada penjelasan dari Sanderson tersebut. Masyarakat pesisir yang memiliki kekayaan alam yang sangat berguna apabila dimanfaatkan, namun hal itu berbanding terbalik masyarakat pesisir tidak dapat secara maksimal memanfaatkannya. Untuk itu dengan adanya inovasi yang dilakukan akan dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat pesisir.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, masyarakat pesisir di Kabupaten Lombok Barat sangat terbuka dengan penyaluran teknologi yang diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat, hal ini dapat dilihat dari antusias masyarakat desa Buwun Mas dalam mengikuti pengarahannya bagaimana mengelola lahan budidaya yang diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Lombok Barat. Antusias masyarakat dalam mengikuti bimbingan teknis dapat dilihat dari gambar di bawah ini:



Gambar 18. Pemberian materi pengembangan kapasitas para pembudidaya rumput laut

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat



Gambar 19. Masyarakat yang mengikuti pelatihan pengembangan kapasitas pembudidayaan rumput laut

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat

Berdasarkan gambar yang ada di atas menggambarkan antusias masyarakat sekitar kawasan pembudidayaan rumput laut sudah sangat bagus dalam mengikuti pelatihan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat, dengan adanya pelatihan tersebut mampu memberikan dampak positif bagi perkembangan teknologi yang ada dimasyarakat. Bapak H. Muhammad Irham S.PI selaku Seksi Produksi Budidaya memberikan keterangan mengenai upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat dalam mengembangkan teknologi Budidaya Rumput laut di Kabupaten Lombok Barat sebagai berikut:

“Kami sudah banyak melakukan bimbingan kepada masyarakat pembudidaya rumput laut di Kabupaten Lombok Barat, antusias masyarakat pesisir di Kabupaten Lombok Barat sangat bagus. Rata-rata masyarakat disana sudah paham pentingnya pelatihan yang diberikan oleh kami, mungkin masyarakat pembudidaya rumput laut di Kabupaten Lombok Barat tidak mau kalah

dengan Kabupaten sebelah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pembudidayaan rumput laut. Untuk itu kami dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat pembudidaya. Semua pelatihan yang kami lakukan bertujuan memberikan terobosan baru bagaimana membudidayakan rumput laut agar mendapatkan hasil yang maksimal. Sekarang tergantung masyarakat pembudidaya apakah mau konsisten mengikuti cara yang kami ajarkan atau tidak melakukannya sama sekali. Tapi kami dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat terus mengontrol perkembangan yang terjadi di masyarakat.” (wawancara pada tanggal 9 Oktober 2015, pukul 10.00 WITA di ruangan Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat)

Salah satu upaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat yaitu memberikan bimbingan bagaimana mempersiapkan hasil produksi rumput laut yang dihasilkan dapat dijual dengan kualitas baik, upaya yang dilakukan diantaranya memberikan pelatihan bagaimana memanen rumput laut yang baik dan pengenalan teknologi pembudidayaan rumput laut mulai dari proses penanaman bibit rumput laut hingga pengeringan rumput laut untuk dipasarkan. Penjelasan tersebut diperkuat oleh temuan Peneliti yang memperoleh keterangan dari Bapak Kadis seorang pembudidaya rumput laut di Desa Buwun Mas yang memberikan keterangan sebagai berikut:

“kemarin saya dengan teman-teman pembudidaya rumput laut sering diundang ke kantor desa, disana kita diajak diskusi sama orang-orang dari Dinas Kelautan dan Perikanan tentang bagaimana membudidayakan rumput laut supaya hasilnya panen yang didapat bagus. Disana kita juga dikasih tahu bagaimana menghasilkan produksi rumput laut yang baik, mulai dari proses nanemnya, manen, sampai pengeringan. Untuk proses pengeringan kita dikasih tahu alat pengering yang tidak memakai panas matahari, cukup dengan panas bola lampu pengeringan rumput laut bisa dilakukan. Tapi alat tersebut semua disalurkan ada kelompok budidaya karena alat tersebut masih dalam tahap percobaan. Menurut kami peralatan tersebut masih belum cocok untuk kami, karena masyarakat di kampung kami terbiasa sehari-hari kita menggunakan alat pengering yang mengandalkan panas matahari alat tersebut juga merupakan bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan yang menurut kami sangat praktis dan tidak menggunakan energi listrik (wawancara pada 11 Oktober 2015 pukul 12.00 WITA)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Kadis seorang pembudidaya di kawasan Desa Buwun Mas. Peneliti mengambil kesimpulan bahwa upaya pengembangan teknologi yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat sudah cukup banyak. Mulai dari pemberian pelatihan, pemberian bantuan berupa alat yang berguna dalam proses pembudidayaan. Hal ini diketahui oleh peneliti berdasarkan keterangan salah satu masyarakat pembudidaya yang menjadi narasumber peneliti. Pengembangan teknologi yang diupayakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat merupakan usaha yang dilakukan untuk menjalankan program Minapolitan dan menjadikan daerah Kabupaten Lombok Barat sebagai daerah penghasil produk unggulan daerah Provinsi Nusatenggara Barat.

d. Penguatan Permodalan

Strategi penguatan permodalan merupakan salah satu strategi yang berguna bagi pengembangan perekonomian masyarakat pesisir. Adanya strategi tersebut tercipta untuk mengatasi kemiskinan yang terjadi dimasyarakat pesisir, mengingat bahwa rata-rata masyarakat pesisir di Indonesia masih hidup pada garis kemiskinan. Banyak hal yang mempengaruhi terjadinya kemiskinan di masyarakat pesisir, salah satunya yaitu tidak mampunya masyarakat pesisir mengelola sumber daya pesisir dikarenakan tidak adanya modal. Perlunya strategi bantuan modal untuk membantu terlaksana aktifitas pemanfaatan sumberdaya pesisir , untuk itu Kusnadi (2015:23) menjelaskan strategi penguatan permodalan yang dijelaskan pada halaman 174:

1. Mengembangkan fungsi lembaga keuangan mikro dan koperasi yang memihak nelayan, baik yang tumbuh melalui program intervensi pembangunan atau swadaya masyarakat.
2. Meyakinkan prospek dan meningkatkan komitmen lembaga perbankan terhadap pembangunan sektor ekonomi perikanan.
3. Membangun usaha bersama, seperti melalui sarana-prasarana penangkap secara kolektif, sehingga distribusi pendapatan yang diterima merata.

Berdasarkan penjelasan strategi pengembangan permodalan yang dijelaskan oleh Kusadi (2015:23) tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa strategi pengembangan permodalan dibuat untuk melepaskan masalah dari keterbatasan modal usaha untuk melanjutkan aktifitas mereka. Untuk itu peran pemerintah sangatlah dibutuhkan dalam membantu meringankan permasalahan modal yang diderita masyarakat pesisir pada umumnya. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Lombok Barat sudah mulai memberikan bantuan permodalan yang disalurkan kepada masyarakat di daerah pesisir, hal ini dapat dilihat pada tabel 28 berikut:

Tabel 28. Realisasi Penyaluran Anggaran Bantuan tahun 2012-2014

No	Tahun	Anggaran Dana Bantuan (Rp)	Realisasi Bantuan Anggaran (Rp)	Realisasi penyaluran bantuan
1	2012	61.421.500	61.421.500	100%
2	2013	108.760.000	103.935.000	100%
3	2014	221.820.000	218.295.000	100%

Sumber: Data diolah dari laporan tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat tahun 2012-2014

Dari data tabel di atas, dapat dilihat bahwa pemanfaatan dana bantuan permodalan dari program CCDP-IFAD yang diberikan pemerintah Kabupaten Lombok Barat sudah terealisasi dengan baik. Terlihat dari realisasi penyaluran anggaran bantuan yang sudah tercapai 100% walaupun realisasi anggaran tidak

sepenuhnya tercapai yang disebabkan realitas lapangan lebih efisien. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Lombok Barat sudah tersalurkan dengan baik, dengan penyaluran realisasi anggaran bantuan tersebut dapat membantu berjalannya perekonomian masyarakat pesisir di Kabupaten Lombok Barat.

Penguatan permodalan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat diantaranya yaitu dengan melakukan program CCDP-IFAD yang mana program tersebut memberikan beberapa bantuan finansial dan juga bantuan pengembangan perekonomian masyarakat pesisir dengan memberikan pelatihan. Berdasarkan temuan peneliti terhadap pembekalan yang diberikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat sudah dilakukan beberapa tahun belakangan ini, hal ini diperkuat dari keterangan bapak Uki sebagai pelaksana program CCDP-IFAD yang memberikan keterangan sebagai berikut:

“berjalannya program CCDP-IFAD di Kabupaten Lombok Barat sudah dilakukan mulai tahun 2013 dan akan berakhir pada tahun 2017. Banyak hal yang kami sudah dilakukan untuk membantu masyarakat pesisir di Kabupaten Lombok Barat khususnya Kecamatan Sekotong, karena di daerah sana merupakan kawasan pengembangan kawasan perikanan dan kelautan. Tugas kami dari Dinas Kelautan dan Perikanan dalam program tersebut selain memberikan bantuan, kami juga membentuk kelompok usaha sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 yang sudah terbagi dalam kelompok usaha perikanan tangkap, usaha perikanan budidaya, usaha pengolahan dan usaha pemasaran. Maksud dari pembentukan kelompok tersebut adalah untuk mempermudah pemerataan bantuan dan memberikan peningkatan skill bagi masyarakat di Kecamatan Sekotong. Untuk selanjutnya kami tetap memonitoring kinerja setiap kelompok untuk memantau perkembangan mereka” (wawancara pada tanggal 5 Oktober 2015, pukul 13.00 WITA di ruangan Bidang Pengawasan dan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa program Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir di Kecamatan Sekotong sudah berjalan. Upaya Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu langkah dalam pelaksanaan program Minapolitan di Kabupaten Lombok Barat, hal itu terlihat dari terbentuknya kelompok usaha yang sudah berjalan dari tahun 2013 hingga sekarang. Pembentukan kelompok usaha dimaksudkan untuk membantu memaksimalkan pemasaran produk pesisir, untuk itu perlunya pengawasan dalam perjalanan program tersebut. Adapun pengawasan yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk memantau perkembangan setiap kelompok, hal tersebut dijelaskan oleh bapak Uki selaku petugas pelaksana program CCDP-IFAD yang memberikan keterangan sebagai berikut:

“program CCDP-IFAD ini setiap tahunnya kami evaluasi supaya kami bisa mengetahui perkembangan mereka, ada penilaian yang kami lakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan setiap kelompok. Namun yang kami nilai hanya kelompok usaha, ini dimaksudkan karena kelompok usaha merupakan kelompok yang sangat berpengaruh dalam keberlangsungan perekonomian masyarakat pesisir di Kabupaten Lombok Barat. proses penilaian kami lakukan dengan pendekatan statistik deskriptif dan wawancara langsung kepada petani dengan memberikan gambaran data secara singkat yang dilakukan terhadap Kelompok Usaha setiap akhir semester (Juni dan Desember).” (wawancara pada tanggal 5 Oktober 2015, pukul 13.00 WITA di ruangan Bidang Pengawasan dan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat).

Keterangan yang didapat dari Bapak Uki tersebut menyimpulkan bahwa Penilaian yang dilakukan Dinas Perikanan dan Kelautan merupakan usaha kontroling dalam berjalannya program CCDP-IFAD. Penilaian kelompok usaha nantinya akan diberikan bantuan sehingga masyarakat dapat menjalankan roda perekonomian mereka dan juga bisa memperbanyak ilmu mereka dengan terbentuknya kelompok tersebut. Kelompok yang sudah terbentuk dalam

pelaksanaan kinerja sudah memberikan perkembangan yang menjanjikan, salah satunya berada di Desa Buwun mas yang merupakan desa yang ditetapkan sebagai kawasan Minapolitan budidaya rumput laut. Hal tersebut dapat dilihat dari data tabel dibawah ini:

Tabel 29. Hasil Penilaian Kinerja Kelompok dalam Program CCDP-IFAD pada Desa Buwun Mas tahun 2014

No	Nama Kelompok	Jenis Usaha Kelompok	Penilaian
1	Beriuk Maju	Penangkapan Ikan (Nelayan)	Cukup Berhasil
2	Kemanuk Maju	Penangkapan Ikan (Nelayan)	Cukup Berhasil
3	Harap Maju	Penangkapan Ikan (Nelayan)	Cukup Berhasil
4	Beriuk Dayung	Penangkapan Ikan (Nelayan)	Cukup Berhasil
5	Mau Berdiri	Penangkapan Ikan (Nelayan)	Cukup Berhasil
6	Ikhtiar Bersama	Penangkapan Ikan (Nelayan)	Cukup Berhasil
7	Nambung Bersatu	Budidaya Laut (Rumput Laut)	Cukup Berhasil
8	Pesisir Pantai Nambung	Budidaya Laut (Rumput Laut)	Cukup Berhasil
9	Nambung Biru	Budidaya Laut (Rumput Laut)	Cukup Berhasil

Sumber: Program Pengembangan kapasitas masyarakat pesisir CCDP-IFAD tahun 2014

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa perkembangan kelompok yang menggunakan bantuan dana yang berasal dari program CCDP-IFAD sudah memberikan perkembangan yang baik bagi peningkatan perekonomian, hal ini

terlihat dari hasil penilaian yang dilakukan oleh tim pelaksana program CCDP-IFAD yang menunjukkan perkembangan cukup menjanjikan untuk kedepannya. Dengan kemajuan yang terjadi menunjukkan antusias masyarakat Desa Buwun Mas untuk memaksimalkan potensi pesisir mereka dengan memanfaatkan dana tersebut cukup untuk memperbaiki kehidupan mereka.

Peneliti juga menemukan ada beberapa upaya yang dilakukan dalam membantu perekonomian masyarakat pesisir yang membudidayakan rumput laut di Kecamatan Sekotong, Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan mengembangkan jaringan pemasaran produk rumput laut dengan pihak ketiga yang bergerak dibidang pengolahan produk rumput laut, dengan adanya jaringan pemasaran dari pihak ketiga tersebut diharapkan dapat membantu memudahkan penyaluran hasil produksi rumput laut masyarakat pesisir. Adapun pihak ketiga yang sudah bersedia bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat dalam pengolahan dan pemasaran rumput laut untuk wilayah Kabupaten Lombok Barat yang ada pada tabel di bawah ini:

Tabel 30. Daftar perusahaan pengolahan dan pemasaran rumput laut di Kabupaten Lombok Barat

NO	Nama	Jenis Kegiatan	Fasilitas
1	CV. Phoenix Mas	Pemasaran & Pengolahan Rumput Laut	Swasta Nasional
2	CV. Riadi	Pemasaran Rumput Laut	Swasta Nasional
3	UD. Agung Sejahtera	Pemasaran Rumput Laut	Swasta Nasional
4	UD. Salindo	Pemasaran Rumput Laut	Swasta Nasional

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014

Berdasarkan tabel 30 pada halaman 178, menunjukkan beberapa pihak swasta yang ikut berpartisipasi dalam menerima hasil produksi rumput laut dari para pembudidaya. Dengan adanya kerjasama antara pihak swasta, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat dapat terbantu mengembangkan usaha para pembudidaya rumput laut. Terciptanya kerjasama antara pihak ketiga menggambarkan terjalinnya kerjasama antara pihak pemerintah dengan pihak swasta, hal ini sangat bagus karena dengan adanya kerjasama antar keduanya memberikan kemudahan dalam pelaksanaan program tersebut.

2. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat strategi pengembangan kawasan Minapolitan rumput laut di Kabupaten Lombok Barat

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi berjalannya program Minapolitan merupakan salah satu upaya untuk menyusun strategi apa saja yang akan dilakukan. Salah satunya dengan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dengan menggunakan analisis SWOT, analisis tersebut digunakan karena untuk menentukan atau menganalisa strategi yang ada sangat cocok menggunakan Analisis SWOT. Faktor-faktor yang menjadi pengaruh tersebut dikaitkan dengan pengembang Kawasan Minapolitan budidaya rumput laut oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat, sehingga menghasilkan sebuah usulan strategi yang akan berguna bagi pelaksanaan program selanjutnya. Berdasarkan analisis SWOT yang digunakan peneliti, membagi menjadi dua jenis analisis. Analisis tersebut antara lain yaitu analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal, dengan pembagian jenis

analisa tersebut dapat memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi dan memberikan usulan dari strategi yang ada. Kedua analisis tersebut dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini:

a) Analisis Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal adalah analisis yang dilakukan pada internal Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat. Analisis internal dilakukan untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat dalam pengimpelementasian program Minapolitan di Kabupaten Lombok Barat. Dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan tersebut peneliti dapat merumuskan strategi apa saja yang perlu dilakukan, untuk penjelasan faktor apa saja yang menjadi kekuatan dan kelemahan dari strategi pengembangan kawasan Minapolitan budidaya rumput laut dijelaskan sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Strengths*)

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber yang memberikan berbagai macam keterangan sehingga peneliti dapat menyimpulkan kekuatan apa saja yang dapat mendorong terlaksananya program Minapolitan di Kabupaten Lombok Barat, adapun kesimpulan yang didapat meneliti antara lain sebagai berikut : 1). Adanya keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2010 yang menjadikan Kabupaten Lombok Barat sebagai kawasan pelaksanaan program Minapolitan, 2). Kerjasama antara pihak ketiga dalam realisasi program Minapolitan, 3). Adanya bantuan program pendukung

yaitu CCD-IFAD, 4). Bantuan tenaga ahli yang berkompeten dalam bidang Pembudidayaan rumput laut. Dari ke empat faktor ancaman yang ditemukan, peneliti menjelaskannya sebagai berikut:

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2010 merupakan landasan hukum yang menjadi penguat dalam terlaksananya program Minapolitan pada semua daerah pelaksanaannya, dengan terbentuknya surat keputusan menteri tersebut pemerintah daerah dapat merumuskan strategi apa saja yang akan dilakukan untuk melaksanakan program Minapolitan. Untuk daerah pelaksanaan program Minapolitan di Kabupaten Lombok Barat sudah memulai dalam tahap pelaksanaan, hal ini dikarenakan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat menindaklanjuti dari keputusan menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2010 dengan mengeluarkan SK Bupati Nomor 1471/XI/Dislutkan/2010 agar program Minapolitan di Kabupaten Lombok Barat dapat terlaksana sesuai dengan program tersebut.

Kerjasama antara pihak ketiga dalam realisasi program Minapolitan merupakan upaya yang diambil oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat, hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan peluang kerjasama antar pemerintah daerah dan pihak swasta dalam proses realisasi kebijakan. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat mengupayakan keterlaksananya program Minapolitan dengan mengikut sertakan pihak swasta yang berkonsentrasi dalam bidang perencanaan pembangunan.

Program Minapolitan yang dilaksanakan di Kabupaten Lombok Barat dapat terbantu dengan adanya bantuan program pendukung yaitu CCD-IFAD. Program CCD-IFAD merupakan program bantuan dari negara maju untuk membantu negara berkembang agar mampu mengembangkan potensi perairan mereka, hal ini di karenakan kebanyakan negara-negara berkembang masih kesulitan dalam mengembangkan potensi perairan mereka yang sebenarnya begitu kaya. Untuk itu dengan adanya bantuan program CCD-IFAD memberikan dorongan kuat dalam realisasi program Minapolitan yang digagas oleh Pemerintah pusat agar bisa terlaksana dengan baik di daerah-daerah pelaksana program.

Bantuan tenaga ahli yang berkompeten dalam bidang Pembudidayaan rumput laut merupakan bantuan yang menjadi penunjang keberhasilan pelaksana program Minapolitan dibidang rumput laut. Bantuan tenaga pendukung dari para ahli dibidang budidaya rumput laut didatangkan langsung dari pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, tugas para tenaga ahli tersebut bertujuan untuk memberikan pelatihan bagi para tenaga pendukung di daerah baik masyarakat maupun SKPD yang tergabung dalam Program tersebut.

2. Kelemahan (*Weakness*)

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber yang memberikan berbagai macam keterangan sehingga peneliti dapat menyimpulkan kekuatan apa saja yang dapat mendorong terlaksananya program Minapolitan di Kabupaten Lombok Barat, adapun kesimpulan yang didapat peneliti antara lain

sebagai berikut: 1) Belum adanya tindak lanjut dari *Stakeholder* yang tergabung dalam program Minapolitan. 2) Keterbatasan tenaga ahli dalam pengimplementasian program Minapolitan. 3) Masyarakat pembudidaya yang masih belum terlalu menguasai teknologi budidaya yang moderen 4) Masih sulitnya para pembudidaya mendapatkan modal. Dari ke empat faktor ancaman yang ditemukan, peneliti menjelaskannya sebagai berikut:

Belum adanya tindak lanjut dari *stakeholder* yang tergabung dalam program Minapolitan menjadi faktor dalam terkendalanya proses pelaksana program Minapolitan di Kabupaten Lombok Barat. *Stakeholder* yang dibentuk sesuai pedoman pelaksanaan program Minapolitan di Kabupaten Lombok Barat belum terlalu menunjukkan kerjasama antar sesama *stakeholder*, hal ini dikarenakan para *stakeholder* masih memprioritaskan program tahunan yang sudah mereka rencanakan. Belum terlaksananya kerjasama antar *stakeholder* membuat program Minapolitan di Kabupaten Lombok Barat belum terlaksana secara maksimal.

Keterbatasan tenaga ahli dalam pengimplementasian program Minapolitan merupakan kendala dalam pelaksanaan program Minapolitan di Kabupaten Lombok Barat. Tenaga ahli yang dimiliki daerah Kabupaten Lombok Barat dalam hal implementasi program Minapolitan masih sedikit, hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat yang rata-rata masih dalam proses bimbingan dari para ahli yang di datangkan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Masyarakat pembudidaya yang masih belum terlalu menguasai teknologi budidaya moderen merupakan permasalahan yang dihadapi masyarakat pesisir di Kecamatan Sekotong, kehidupan masyarakat pesisir yang jauh dengan perkotaan membuat transfer ilmu yang terjadi lambat. Keterlambatan transfer ilmu tersebut berdampak pada perkembangan kehidupan masyarakat pesisir di kecamatan Sekotong yang menjadi kurang efisien, terlihat dari wawancara yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa masyarakat pesisir yang membudidayakan rumput laut masih membudidayakan secara tradisional. walaupun ada upaya dari pemerintah daerah untuk merubah kebiasaan masyarakat tersebut dengan memberikan bantuan cara budidaya yang lebih moderen, namun hal tersebut belum efektif dilakukan karena masyarakat lebih memilih cara tradisional.

Permasalahan masih sulitnya mendapatkan modal dirasakan oleh masyarakat pembudidaya rumput laut di Kecamatan Sekotong, kesulitan dihadapi oleh para pembudidaya merupakan akibat dari ketidak jelasan harga jual rumput laut yang dipatok oleh para tengkulak. Harga jual yang dipatok oleh para tengkulak bisanya tidak dapat memberikan pemasukan tambahan bagi para pembudidaya rumput laut di Kecamatan Sekotong, hal ini yang mengakibatkan sulitnya para pembudidaya mendapatkan modal untuk budidaya selanjutnya. Untuk mendapatkan modal bisanya para pembudidaya mencari pekerjaan sampingan atau menunggu bantuan dari pemerintah daerah, dengan melakukan pekerjaan sampingan mereka bisa sedikit-demisedikit

mengumpulkan modal yang nantinya bisa digunakan untuk budidaya rumput laut.

b) Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui keadaan di luar Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat. Analisis eksternal terkonsentrasi pada dua fokus yaitu Peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*) Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dapat melaksanakan program pengembangan kawasan Minapolitan budidaya rumput laut di Kabupaten Lombok Barat, dengan menemukan ke dua faktor tersebut peneliti dapat mengetahui pengaruh lingkungan eksternal apa saja yang ada pada pelaksanaan program Minapolitan rumput laut di Kabupaten Lombok Barat untuk kemudian diambil kesimpulan. Adapun faktor Peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*) yang didapat peneliti dari data dan narasumber yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Peluang (*Opportunities*)

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber yang memberikan berbagai macam keterangan sehingga peneliti dapat menyimpulkan peluang apa saja yang dapat dimanfaatkan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat dalam mendorong terlaksananya program Minapolitan di Kabupaten Lombok Barat, adapun peluang yang didapat peneliti antara lain sebagai berikut: 1) Hasil produksi rumput laut yang sangat diminati. 2) Masih adanya lahan pembudidayaan yang belum dimanfaatkan oleh pembudidaya untuk budidaya rumput laut. 3) Daerah pembudidayaan yang sangat strategis.

4) Pemberian bantuan bibit unggul dan tehnik budidaya baru. Dari ke empat faktor ancaman yang ditemukan, peneliti menjelaskannya sebagai berikut:

Minat pasar akan komoditas produk rumput laut membuat pengembangan komoditas rumput laut menjadi menjanjikan, dengan ketersediaan permintaan pasar membuat pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat berupaya mengembangkan sektor tersebut. Berdasarkan keterangan dari beberapa narasumber didapatkan bahwa komoditas rumput laut di Kabupaten Lombok Barat sangat meminati untuk mengembangkan budidaya rumput laut sebagai sumbar komoditas unggulan mereka, apa lagi dengan keadaan perairan yang dimiliki Kabupaten Lombok Barat sangat mendukung pelaksanaan budidaya rumput laut. Dengan keuntungan yang dimiliki Kabupaten Lombok Barat sebagai daerah yang cocok untuk budidaya rumput laut yang membuat Kabupaten Lombok Barat juga termasuk dalam daerah pelaksana program Minapolitan, keikut sertaan Kabupaten Lombok Barat sebagai daerah pelaksanaan program Minapolitan memberikan peluang dalam memaksimalkan potensi perairan yang bisa menambah pemasukan daerah.

Masih adanya lahan pembudidayaan yang belum dimanfaatkan oleh petani untuk pembudidayaan rumput laut menjadi peluang daerah untuk lebih memaksimalkannya. Sebagai salah satu daerah yang melaksanakan program Minapolitan, Kabupaten Lombok Barat berupaya secara maksimal dalam pengembangan daerah pesisir yang mereka miliki. Berdasarkan beberapa keterangan yang didapat peneliti menyimpulkan bahwa potensi daerah pesisir untuk dijadikan lahan budidaya rumput laut masih sangatlah luas, terbukti

berdasarkan keterangan narasumber yang mengatakan pemanfaatan lahan pembudidaya rumput laut masih seluas 1000 hektar, sedangkan potensi pengembangan pembudidayaan rumput laut di Kabupaten Lombok Barat mencapai 2900 hektar lebih. Untuk itu pemerintah daerah masih mengupayakan menumbuhkan pembudidaya baru atau mengembangkan lebih luas lagi lahan para pembudidaya agar pemanfaatan lahan lebih maksimal.

Lokasi pelaksana program Minapolitan di Kabupaten Lombok Barat merupakan daerah pembudidayaan yang sangat strategis, hal ini didapat dari keterangan narasumber yang ditemui peneliti. Daerah pelaksanaan program Minapolitan Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mengembangkan produk rumput laut sebagai komoditas unggulan dalam program Minapolitan. Penetapan komoditas rumput laut sebagai produk unggulan dalam program Minapolitan dikarenakan lokasi yang dimiliki Kabupaten Lombok Barat sangat strategis, daerah pesisir Kabupaten Lombok Barat yang kebanyakan berbentuk teluk dan gelombang yang tidak terlalu besar membuat kabupaten Lombok Barat menjadi daerah pelaksanaan program Minapolitan budidaya rumput laut.

Pemberian bantuan bibit unggul dan tehnik budidaya baru merupakan upaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat untuk memperbaiki kebiasaan lama yang ada di masyarakat. Upaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat dalam memperbaiki kebiasaan lama dikarenakan masyarakat pesisir yang membudidayakan rumput laut masih memakai teknologi tradisional, hal ini didapat peneliti dari beberapa

narasumber yang memberikan keterangan bahwa dahulu sebelum ada bantuan pemerintah daerah mereka dalam membudidayakan rumput laut hasilnya kurang memuaskan. Para pembudidaya saat itu melakukan pembudidayaan baru dengan mereka mengambil bibit dari rumput laut yang sudah mereka panen, hal tersebut merupakan cara yang salah karena dengan cara tersebut rumput laut yang dihasilkan kualitasnya akan berkurang. Dengan bantuan bibit yang diberikan, para pembudidaya dapat terbantu dalam meningkatkan kualitas hasil panen mereka. Selain itu teknik budidaya yang diberikan dapat memberikan dampak positif dalam proses budidaya mengingat dulu saat proses penjemuran rumput laut hanya mengandalkan terpal sebagai alas penjemuran namun kini pemerintah sudah memberikan bantuan alat penjemur yang lebih efisien. Semua upaya tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan mutu produksi rumput laut daerah agar mampu menambah pemasukan bagi daerah.

2. Ancaman (*Threats*)

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber yang memberikan berbagai macam keterangan sehingga peneliti dapat menyimpulkan kekuatan apa saja yang dapat mendorong terlaksananya program Minapolitan di Kabupaten Lombok Barat, adapun kesimpulan yang didapat peneliti antara lain sebagai berikut: 1) ketidak stabilan harga jual rumput laut basah ataupun kering yang berlaku dipasaran. 2) Masih banyaknya pembudidaya yang belum membudidayakan rumput laut secara terus-menerus. 3) Perubahan iklim yang tidak menentu. 4) Adanya perkembangan penyakit/parasit yang menjangkiti

tumbuhan rumput laut. Dari ke empat faktor ancaman yang ditemukan, kemudian peneliti menjelaskannya sebagai berikut:

Ketidak stabilan harga jual rumput laut basah ataupun kering yang di rasakan olah para pembudidaya didapat oleh peneliti berdasarkan wawancara yang dilakukan. Berdasarkan beberapa keterangan dari para pembudidaya diketahui bahwa rumput laut yang mereka jual kepada para tengkulak mengalami perubahan harga jual dari setiap masapanen mereka, ketidak stabilan harga tersebut membuat para pembudidaya kesulitan untuk mendapatkan modal tambahan untuk melanjutkan kegiatan budidaya rumput laut mereka. Berdasarkan keterangan yang didapat dari masyarakat pembudidaya mereka menganggap berubah-ubahnya harga jual rumput laut diakibatkan oleh permainan dari para tengkulak untuk mendapatkan keuntungan, hal ini tidak dapat dipungkiri mengingat belum adanya penentuan harga jual rumput laut oleh pemerintah daerah.

Masih banyaknya pembudidaya yang belum membudidayakan rumput laut secara terus-menerus merupakan masalah yang ditemukan peneliti berdasarkan keterangan dari beberapa warga pembudidaya. Ketidak rutinnya para pembudidayaan dalam melakukan aktifitas pembudidayaan memberikan dampak dari ketidak adanya modal yang mereka miliki, hal ini karena para pembudidaya mengalami kerugian baik karena gagal panen atau turunnya harga jual rumput laut yang membuat modal untuk melanjutkan kegiatan budidaya menjadi berkurang bahkan tidak ada.

Perubahan iklim yang tidak menentu merupakan permasalahan yang sedang dihadapi oleh para pembudidaya rumput laut di Desa Buwun Mas. Perubahan iklim yang dirasakan para pembudidaya rumput laut di Desa Buwun Mas mengakibatkan turunnya kualitas hasil panen rumput laut mereka, hal ini diakibatkan perubahan suhu air laut dan arus gelombang laut yang tiba-tiba berubah membuat pertumbuhan rumput laut menjadi terhambat. Selain itu hujan yang bisa saja turun tiba-tiba membuat air laut di daerah pantai tercampur dengan air laut yang mengakibatkan banyak rumput laut yang mati karena air laut yang tercampur dengan air tawar.

Adanya perkembangan penyakit/parasit yang menjangkiti tumbuhan rumput laut merupakan ancaman serius yang baru-baru ini dihadapi oleh para pembudidaya rumput laut di Desa Buwun Mas. Perkembangan penyakit/parasit yang menjangkiti rumput laut membuat para pembudidaya di Desa Buwun Mas menjadi khawatir, hal ini karena rumput laut yang mereka budidayakan menjadi terhambat dalam proses pertumbuhannya bahkan mampu membuat rumput laut menjadi mati.

Berdasarkan analisis SWOT yang sudah dijelaskan, peneliti dapat merumuskan strategi pengembangan kawasan Minapolitan budidaya rumput laut di Kabupaten Lombok Barat dengan menggunakan matriks SWOT yang dapat dilihat pada Tabel 31. Matriks SWOT yang di jelaskan sebagai berikut:

a. Strategi S-O

1. Penguatan hubungan kerjasama antar pihak swasta atau pihak ketiga dalam membantu merealisasikan program Minapolitan

Pengembangan kawasan Minapolitan merupakan tugas pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerah, oleh karena itu perlunya kerjasama antara gabungan seluruh SKPD yang ada di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan dalam program Minapolitan. Kerjasama antar pihak pemerintah dengan pihak swasta juga perlu terjalin dalam pelaksanaan kebijakan, hal ini dikarenakan swasta dapat membantu pemerintah dalam mengatasi keterbatasan sumber daya pada saat pelaksanaan kebijakan. Bentuk kerjasama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dengan swasta atau pihak ketiga sudah terjadi dalam setiap kegiatan pelaksanaan program, dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat bekerja sama dengan CV. Vrangloid Rait dalam hal penyusunan master plan program Minapolitan Kabupaten Lombok Barat. Kerjasama yang dilakukan menurut keterangan narasumber didapat oleh peneliti dirasa masih kurang, hal ini dikarenakan kerjasama tersebut masih sebatas perencanaannya saja tidak sampai dengan proses implementasi program. Oleh karena berdasarkan faktor kekuatan dan peluang yang sudah dijabarkan oleh peneliti, maka rekomendasi peneliti bagi program Minapolitan tersebut yaitu penguatan hubungan kerja sama antar pihak swasta atau pihak ketiga dalam membantu merealisasikan program Minapolitan. Maksud dari usulan tersebut adalah kerjasama yang dilakukan oleh pihak pemerintah Kabupaten Lombok Barat dengan pihak swasta lebih diperluas lagi tidak hanya dengan CV. Vrangloid Rait, tapi

mengikut sertakan pihak swasta lainnya dalam mengupayakan keterlaksanaanyan program Minapolitan.

2. Perluasan pasar penjualan rumput laut di dalam dan luar negeri

Pemasaran produk komoditas rumput laut dipasaran saat ini dirasa masih belum maksimal, hal ini dikarenakan pemasaran komoditas rumput laut masih belum maksimal. Belum maksimalnya pemasaran produk rumput laut membuat harga jual dikalangan pengepul masih belum stabil dari Rp. 8.000/Kg bisa berubah menjadi Rp. 6.000/Kg, hal ini berdampak pada pendapatan para pembudidaya rumput laut di Desa Buwun Mas dimana pendapatan yang mereka dapat menjadi tidak menentu dan kesulitan untuk melanjutkan kegiatan pembudidayaan selanjutnya. Masih belum maksimalnya pemanfaatan pasar dalam penjualan produk rumput laut menjadi permasalahan yang perlu diatasi demi perkembangan pembudidayaan rumput laut di Kabupaten Lombok Barat, untuk itu perlunya peran pemerintah daerah untuk mengupayakan perluasan pasar penjualan rumput laut didalam atau luar negeri. Upaya perluasan pasar yang perlu di lakukan pemerintah kabupaten Lombok Barat antara lain menarik para konsumen baik didalam ataupun luar negeri untuk mau membeli rumput laut yang berasal dari Kabupaten Lombok Barat, dengan adanya minat konsumen tersebut akan membuka pasar penjualan baru dan meningkatkan penjualan komoditas rumput laut Kabupaten Lombok Barat.

b. Strategi W-O

1. Penguatan peran *stakeholder* dalam upaya mensukseskan program

Minapolitan

Program Minapolitan yang bertujuan untuk meningkatkan potensi perairan daerah merupakan tugas yang dilakukan oleh para *stakeholder* yang telah ditetapkan dalam program Minapolitan. Kerjasama antar *stakeholder* yang dilaksanakan di Kabupaten Lombok Barat masih belum maksimal dilakukan, dengan adanya program kerja yang sudah disusun oleh para *Stakeholder* menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program Minapolitan. Belum maksimalnya koordinasi yang dilakukan para *stakeholder* disimpulkan peneliti berdasarkan keterangan dari beberapa narasumber yang memberikan keterangan, oleh karena itu perlu adanya upaya penguatan peran *stakeholder* agar program Minapolitan dapat terlaksana. Cara yang peneliti rekomendasikan dalam penguatan peran *stakeholder* antara lain perlunya pengaktifan kembali peran *stakeholder* dengan cara bupati menghimbau untuk melakukan koordinasi dan juga kontroling kepada para *stakeholder* supaya lebih aktif dalam melakukan koordinasi antar *stakeholder* demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

2. Mengajak pembudidaya-pembudidaya baru untuk memanfaatkan lahan yang belum dimanfaatkan

Pengembangan kawasan pembudidayaan rumput laut di Kabupaten Lombok Barat sangat perlu dilakukan, hal ini dikarenakan luas lahan yang baru dimanfaatkan oleh para pembudidaya baru sebesar 1000 hektar

dengan potensi pemanfaatan 2900 hektar lebih. Pemanfaatan lahan yang masih belum maksimal dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang bisa memanfaatkan potensi lahan tersebut, selain itu keterbatasan sarana dan prasarana pembudidayaan membuat masih belum maksimalnya pemanfaatan lahan di Kabupaten Lombok Barat. Untuk memaksimalkan potensi lahan yang belum dimanfaatkan tersebut membuat peneliti merekomendasikan agar pemerintah daerah untuk mengajak para pembudidaya-pembudidaya baru untuk ikut memanfaatkan lahan yang ada di Kabupaten Lombok Barat, selain itu pemerintah daerah juga lebih mengupayakan pemberian bantuan sarana dan prasarana pembudidaya rumput laut bagi para pembudidaya lama agar lebih mengembangkan lahan pembudidayaan mereka.

c. Strategi S-T

1. Penentuan batas terendah harga jual rumput laut dikalangan tengkulak atau pengepul

Permintaan komoditas rumput laut yang banyak dicari dipasar dalam dan luar negeri memberikan peluang pengembangan pembudidayaan rumput laut sangat menjanjikan, rumput laut yang dapat diolah menjadi berbagai macam produk yang bermanfaat membuat para konsumen sangat meminati rumput laut sebagai bahan baku produk mereka. Namun belakangan hari ini terjadi ketidak stabilan harga yang membuat harga jual rumput laut menjadi tidak menentu, hal ini dikarenakan permainan harga oleh para tengkulak yang mengetahui harga pasaran. untuk itu perlunya

upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk menetapkan standar harga jual rumput laut agar tidak ada permainan harga oleh para tengkulak, selain itu perlunya sosialisasi kepada para pembudidaya rumput laut agar mengetahui harga jual rumput laut tiap masa panen berlangsung untuk menghindarkan kerugian dikalangan pembudidaya rumput laut. Dengan adanya penetapan harga jual rumput laut para tengkulak tidak dapat memainkan harga dan pembudidaya rumput laut dapat memperkirakan pendapat mereka sehingga dapat melanjutkan proses pembudidayaan selanjutnya.

2. Memperbaiki teknik budidaya dan pola penanganan pasca-panen para pembudidaya rumput laut

Penjualan komoditas rumput laut yang mulai berkembang di Indonesia tidak membuat penjualan rumput laut Kabupaten Lombok Barat ikut berkembang, hal ini dilihat dari tingkat kesejahteraan para pembudidaya rumput laut di Kecamatan Sekotong yang masih belum bisa memberikan peningkatan produksi. Terhambatnya peningkatan kesejahteraan para pembudidaya rumput laut disebabkan oleh kualitas rumput laut yang dihasilkan oleh para pembudidaya di Kecamatan Sekotong masih jauh dari standar penjualan, banyak para pembudidaya melakukan proses pengeringan hanya beralaskan terpal bahkan hanya ditaruh di pasir begitu saja. Cara para pembudidaya lakukan tersebut sebenarnya salah karena bisa mengakibatkan rumput laut akan tercampur pasir pantai atau tanah yang menjadi tidak higienis pada rumput laut yang di jemur, hal ini yang berdampak pada

penurunan harga jual yang disebabkan para konsumen tidak mau membeli rumput laut yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Dampak dari permasalahan tersebut mengakibatkan peningkatan kesejahteraan para pembudidaya rumput laut di Desa Buwun Mas menjadi terhambat, hal ini dikarenakan kualitas rumput laut yang mereka jual masih kurang bagus dari pada daerah-daerah lain. Untuk mengatasi permasalahan tersebut strategi yang perlu dilakukan yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan mengupayakan untuk memberikan bimbingan kepada para pembudidaya rumput laut bagaimana cara membudidayakan rumput laut yang benar dan penanganan pasca-panen, dengan adanya upaya tersebut harapannya mampu memperbaiki kualitas rumput laut yang dihasilkan menjadi lebih baik yang bisa berdampak pada peningkatan kesejahteraan para pembudidaya rumput laut di Kecamatan Sekotong.

d. Strategi W-T

1. Pengembangan usaha kecil untuk membantu perekonomian warga pesisir

peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir merupakan tujuan dari program Minapolitan, pelaksanaan program Minapolitan di Kabupaten Lombok Barat yang terpusat pada Kecamatan Sekotong membuat pemerintah daerah harus mengupayakan terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kabupaten Lombok Barat. Upaya yang perlu dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat untuk terlaksananya tujuan tersebut salah satunya dengan

mengembangkan usaha kecil bagi para masyarakat pesisir yang tinggal di Desa Buwun Mas, cara tersebut dilakukan dimaksudkan untuk memberikan pemasukan tambahan bagi para masyarakat pesisir khususnya rumah tangga para pembudidaya rumput laut. Usaha kecil yang dikembangkan berupa usaha yang dapat menambah pemasukan ketika menunggu masa panen tiba seperti, usaha penjualan bahan sembako, tambal ban, pemandu wisata karena lokasi Desa Buwun Mas dekat dengan objek wisata pantai. Upaya pengembangan usaha kecil tersebut dikembangkan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

2. Mengembangkan keterampilan masyarakat pesisir agar lebih profesional dalam pemanfaatan hasil laut

Perairan yang dimiliki Kabupaten Lombok Barat yang luas berpotensi untuk dimanfaatkan, namun karena masyarakat pesisir yang masih belum menguasai teknologi yang lebih efektif dan efisien membuat pemanfaatan hasil laut masih belum maksimal. Belum maksimalnya pemanfaatan hasil laut itu terlihat dari masih banyaknya masyarakat pesisir yang hanya menjual begitu saja hasil yang dapat tanpa ada rencana untuk diolah kembali, dengan adanya upaya tersebut sebenarnya sangat bermanfaat bagi peningkatan pendapatan yang akan didapat. Oleh karena itu perlunya bimbingan yang diberikan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk memberikan pengarahan mengenai pengembangan keterampilan masyarakat pesisir agar mampu mengolah hasil laut yang mereka dapat,

bimbingan tersebut dimaksudkan untuk menciptakan usaha yang nantinya akan berkembang menjadi industri rumahan yang berbasis pemanfaatan hasil laut, hal ini dimaksudkan agar hasil laut yang mereka dapat diolah sendiri menjadi produk yang lebih menguntungkan. Sebagai contoh para pembudidaya rumput laut di Desa Buwun Mas dapat mengolah sendiri hasil panen mereka menjadi produk olahan seperti tortila, dodol, dan keripik rumput laut. Dengan upaya tersebut secara otomatis dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir dan dapat memanfaatkan hasil panen menjadi produk yang bermanfaat.

Untuk lebih ringkasnya peneliti menyajikan hasil analisis SWOT yang ditulis pada tabel 31 sebagai berikut:

Tabel 31. Matriks SWOT pengembangan kawasan Minapolitan Budidaya Rumput laut

	Internal	Kekuatan (<i>Strength</i>)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)
	Eksternal	1. Adanya keputusan menteri kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2010 2. kerjasama antara pihak ketiga dalam realisasi program 3. Adanya bantuan program pendukung yaitu CCD-IFAD 4. Bantuan pembinaan dari tenaga ahli kepada masyarakat pembudidaya rumput laut	1. Belum adanya tindak lanjut dari <i>Stakeholder</i> yang tergabung dalam program Minapolitan 2. Keterbatasan tenaga ahli dalam pengimplementasian program Minapolitan 3. Masyarakat pembudidaya yang masih belum terlalu menguasai teknologi budidaya yang moderen 4. Masih sulitnya para pembudidaya mendapatkan modal

Peluang (<i>Opportunity</i>)	Strategi S-O	Strategi W-O
1. Hasil produksi rumput laut yang sangat diminati 2. Masih adanya lahan pembudidayaan yang belum di manfaatkan oleh pembudidaya untuk budidaya rumput laut 3. Daerah pembudidayaan yang sangat strategis 4. Pemberian bantuan bibit unggul dan tehnik budidaya baru	1. Penguatan hubungan kerja sama antar pihak swasta atau pihak ketiga dalam membantu merealisasikan program Minapolitan 2. Perluasan pasar penjualan rumput laut di pasar dalam dan luar negeri	1. Penguatan peran <i>stakeholder</i> dalam upaya mensukseskan program Minapolitan 2. Mengajak pembudidaya-pembudidaya baru untuk memanfaatkan lahan yang belum dimanfaatkan
Ancaman (<i>Threats</i>)	Strategi S-T	Strategi W-T
1. Ketidak stabilan harga jual rumput laut basah ataupun kering yang berlaku di pasaran 2. Masih banyaknya pembudidaya yang belum membudidayakan rumput laut secara terus-menerus 3. Perubahan iklim yang tidak menentu 4. Adanya perkembangan penyakit/parasit yang menjangkiti tumbuhan rumput laut	1. Penentuan batas terendah harga jual rumput laut dikalangan tengkulak atau pengepul 2. Memperbaiki tehnik budidaya dan pola penanganan pasca-panen	1. pengembangan usaha kecil untuk membantu perekonomian warga pesisir 2. mengembangkan keterampilan masyarakat pesisir agar lebih profesional dalam pemanfaatan hasil laut

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai strategi pengembangan kawasan Minapolitan budidaya rumput laut dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir yang kemudian dijelaskan dan dianalisis, maka penulis memberikan kesimpulan berdasarkan fakta yang ditemui di lapangan dan hasil analisis sebagai berikut:

1. Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terpilih sebagai daerah pengembangan program Minapolitan sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2010 tentang penetapan kawasan Minapolitan yang terletak di Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong. Dengan terpilihnya Desa Buwun Mas sebagai daerah pelaksana program Minapolitan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengeluarkan SK Bupati Nomor 1471/XI/Dislutkan/2010 sebagai landasan dalam pengembangan kawasan Minapolitan di Kabupaten Lombok Barat, dengan terbitnya SK Bupati tersebut terbentuklah *Stakeholder* yang terdiri dari beberapa SKPD yang berperan sebagai pelaksana tugas. Namun selama pelaksanaan program Minapolitan peneliti menemukan bahwa implementasi program masih belum maksimal, hal ini dikarenakan belum maksimalnya koordinasi

antar *stakeholder* dalam pelaksanaan program Minapolitan. Jadi selama pelaksanaan program Minapolitan tersebut hanya dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat.

2. Pelaksanaan program pengembangan kawasan Minapolitan budidaya rumput laut di Desa Buwun Mas yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat memakai empat strategi pengembangan yang antara lain: 1) perluasan areal budidaya rumput laut, 2) peningkatan Jumlah pembudidaya rumput laut, 3) pengembangan teknologi budidaya 4) penguatan Permodalan. Penyusunan strategi tersebut bertujuan untuk memaksimalkan potensi perairan pesisir demi kesejahteraan masyarakat pesisir di Kabupaten Lombok Barat.
3. Strategi pengembangan kawasan Minapolitan budidaya rumput laut yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat merupakan strategi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, namun dalam pelaksanaannya masih mengalami kendala yang dimana masyarakat yang masih belum maksimal dalam memanfaatkan potensi yang ada. Terlihat masih kurangnya pemahaman masyarakat dalam melakukan pembudidayaan yang benar, pengelolaan potensi yang masih belum memperhatikan lingkungan sehingga terjadi pencemaran lingkungan yang berpengaruh pada kualitas hasil rumput laut para pembudidaya.
4. Selain program Minapolitan Pengembangan Kawasan pembudidayaan rumput laut di Desa Buwun Mas, Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Lombok Barat juga mendapatkan program bantuan luar negeri yaitu CCD-IFAD yang bertujuan mengembangkan potensi perikanan dengan terkonsentrasi pada daerah-daerah tertinggal diseluruh Indonesia. pelaksanaan Program CCD-IFAD di Kabupaten Lombok Barat sudah terlaksana pada tahun 2013 yang terkonsentrasi pada Kecamatan Sekotong, penentuan Kecamatan Sekotong sebagai daerah pelaksanaan program CCD-IFAD dikarenakan daerah tersebut mempunyai potensi kelautan yang pemanfaatannya masih belum maksimal. Selama pelaksanaannya program CCD-IFAD tersebut sudah memberikan banyak perkembangan bagi kemajuan kelautan dan perikanan Kabupaten Lombok Barat, hal ini dilihat dari tingkat aktifitas masyarakat pesisir dalam mengelola potensi perairan yang ada dilingkungan mereka.

B. SARAN

Berdasarkan penentuan strategi yang diterapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat, peneliti mendapat fakta-fakta yang menghambat dan mendukung dalam implementasi program Minapolitan. Dengan penemuan fakta-fakta tersebut penulis mendapatkan rekomendasi berupa saran yang bermanfaat sebagai penentuan strategi selanjutnya, saran tersebut dijelaskan sebagai berikut::

1. Guna memaksimalkan potensi perikanan daerah dalam program pengembangan kawasan Minapolitan, perlunya sumber daya manusia yang berkualitas untuk mengimplementasikan program-program

pengembangan kawasan Minapolitan tersebut. Maka dari pada itu peneliti memberikan saran perlunya upaya peningkatan kualitas SDM yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat dalam upaya pelaksanaan program pengembangan kawasan Minapolitan dan program-program lainnya. Peningkatan kualitas SDM dilakukan dengan memberikan pelatihan dan bimbingan teknis bagi SDM yang diberikan oleh orang-orang yang berpengalaman sehingga SDM tersebut mampu mengembangkan kemampuannya.

2. Pelaksanaan pengembangan kawasan Minapolitan di Kabupaten Lombok Barat masih belum maksimal, hal ini dikarenakan koordinasi antar *stakeholder* masih belum terlaksana. Koordinasi yang kurang maksimal antar *stakeholder* disebabkan oleh para *stakeholder* masih mementingkan program kerja masing-masing sehingga koordinasi antar *stakeholder* masih barjalan sendiri-sendiri, oleh karena itu peneliti memberikan saran agar peran para *stakeholder* dimaksimalkan dengan melakukan koordinasi demi terlaksananya program pengembangan kawasan Minapolitan di Kabupaten Lombok Barat.
3. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pembudidaya rumput laut dengan menjalankan program pengembangan kawasan Minapolitan budidaya rumput laut di Desa Buwun Mas dirasa masih belum maksimal, hal ini dikarenakan para pembudidaya masih kesulitan untuk mendapatkan modal untuk melakukan pembudidayaan. Masih kurangnya minat para investor untuk ikut berpartisipasi dalam mengembangkan

pembudidayaan rumput laut di Kabupaten Lombok Barat menjadi faktor masih sulitnya mendapatkan modal usaha. Dengan adanya investor yang ikut berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir tentunya akan berdampak pada ketersediaan modal dan bantuan usaha yang dapat membantu para pembudidaya. Untuk itu peneliti memberikan saran dengan pengembangan permodalan dengan para investor dalam bidang perbangkan untuk memberikan kemudahan dalam pemberian modal usaha bagi para pembudidaya rumput laut di Desa Buwun Mas, dengan adanya investor perbangkan yang berpartisipasi dalam pemberian modal dapat memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pembudidaya sehingga bisa melakukan aktivitas pembudidayaan laut kembali.

4. Minat konsumen akan komoditas rumput laut yang terus meningkat menjadi faktor pendorong dalam pengembangan pembudidayaan rumput laut di Kabupaten Lombok Barat. Namun masih belum luasnya pasar yang dimiliki Kabupaten Lombok Barat untuk memasarkan komoditas rumput laut menjadi terkendala, permasalahan pemasaran komoditas rumput laut diakibatkan masih rendahnya kualitas komoditas rumput laut yang dihasilkan membuat konsumen masih jarang memilih komoditas rumput laut dari Kabupaten Lombok Barat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut peneliti memberikan saran agar pemerintah daerah mau berupaya memberikan bantuan dalam memperbaiki kualitas rumput laut yang dihasilkan para pembudidaya rumput laut di Desa Buwun Mas,

selain itu dengan peningkatan kualitas tersebut diimbangi dengan upaya pemerintah daerah dalam menarik minat para konsumen untuk mau membeli komoditas rumput laut dari Kabupaten Lombok Barat. Dengan upaya-upaya tersebut menjadikan pasar komoditas rumput laut Kabupaten Lombok Barat menjadi lebih luas.

5. Peningkatan kesejahteraan masyarakat pembudidaya rumput laut di Desa Buwun Mas menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan dengan memanfaatkan potensi perairan pesisir. dengan berjalannya program Minapolitan dan CCD-IFAD dapat terbantu dalam mengatasi permasalahan tersebut, namun perlu diperhatikan bahwa pelaksanaan program tersebut perlu adanya pengawasan oleh pihak pemerintah Kabupaten Lombok Barat agar terlaksana sesuai dengan tujuan. Untuk itu peneliti merekomendasikan adanya pengawasan terhadap perkembangan pembudidayaan rumput laut, hal ini dimaksudkan agar perkembangan program yang dilakukan dapat terkontrol dengan baik sehingga memberikan gambaran tentang situasi yang dihadapi oleh para pembudidaya rumput laut di Desa Buwun Mas untuk kemudian dirumuskan menjadi strategi-strategi baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul_Wahab, Solichin 1997. Analisis Kebijakan: *dari formulasi Keimplementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Adiyoso, Wigyo 2009. *Mengutan Perencanaan Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Surabaya : Putra Media Nusantara
- aim-services.co.id. 2014. “*ekspor Produk Perikanan Ri bias salip Thailand*” diakses pada tanggal 13 Mei 2015 dari <http://aim-services.co.id/ekspor-produk-perikanan-ri-bisa-salip-thailand-investordaily/>
- Bakosurtanal.go.id. 2014. “*Indonesia Memiliki 13.466 Pulau yang terdaftar dan berkoordinat*” diakses pada tanggal 11 Februari 2015 dari <http://www.bakosurtanal.go.id/berita-surta/show/indonesia-memiliki-13-466-pulau-yang-terdaftar-dan-berkoordinat>
- Bawono, Icut Ranga. 2007. *Manajemen Strategik Sektor Publik: Langkah Tepat Menuju Good Governance*. Purwokerto: Fakultas Ekonomi UNSOED
- bi.go.id. 2011. “Potensi Laut NTB: Menjadi Lumbik Prikanan” di akses pada tanggal 7 juli 2015 dari <http://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/ntb/Documents>
- Bogart, W.T., 2016 Don't Call It Sprawl: Metropolitan Structure in the Twenty-First Century. Cambridge, Cambridge University Press. 218p.
- Dahuri, R. 1998. Pengaruh Pencemaran Limbah Industri Terhadap Potensi Sumberdaya Laut. Makalah Pada Seminar Teknologi Pengolahan Limbah Industri Dan Pencemaran Laut. Agustus 1998. SPPT Jakarta.
- Data-Data Pelolehan Produksi Penan Rumput Laut Kabupaten Lombok Barat Tri wulan I tahun 2015
- Data-Data Pelolehan Produksi Penan Rumput Laut Kabupaten Lombok Barat Tri wulan II tahun 2015
- David, Fred R., 2006. *Manajemen Strategi. Edisi Sepuluh*. Jakarta: Salemba Empat
- Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Minapolitan Rumput Laut Di 10 Kawasan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2010
- Gema Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013

- GINANJAR, Kartasmita. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta, Cides.
- GRIFFIN, W Ricky. 2004. *Manajemen. Edisi Ketujuh Jilid 2, Penerjemah: Gina Gania*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- indonesia-investments.com. 2014. “Kemiskinan di Indonesia” diakses pada tanggal 13 Mei 2015 dari <http://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi/makro/kemiskinan/item301>
- ISLAMY, M. Irfan. 2004. *Prinsip-Perinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Malang: PT. Bumi Aksara
- Kabupaten Lombok Barat dalam Angka 2014 dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Barat
- kbbi.web.id . Definisi strategi dalam kamus besar bahasa Indonesia” di akses pada tanggal 7 juli 2015 dari <http://kbbi.web.id/strategi>
- KHAERON, herman. 2012. *Trasformasi Politik Kelautan Indoneisa Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Pustaka Cidesindo
- kkp.go.id . 2014 “Peningkatan Hidup Nelayan(PKN)” di akses pada tanggal 7 Juli 2015 dari <http://www.pupi.kkp.go.id/index.php/peningkatan-kehidupan-nelayan>
- KUSNADI. 2009. *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*. Yogyakarta: Ar-RuzzMedia
- KUSNADI. 2015. *Pembangunan Wilayah Pesisir Terpadu Strategi Mengatasi Kemiskinan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Laporan Konsiltan Program CCDP-IFAD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok barat tahun 2014
- Laporan Tahunan Disan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010
- Laporan Tahunan Disan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011
- Laporan Tahunan Disan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012
- Laporan Tahunan Disan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013

Laporan Tahunan Disan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014

Materplan Minapolitan Rumput Laut dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabuapten Lombok Barat Tahun 2012

Miles, Matthew B; Huberman, A Micheal; Saldana, Johnny. 2014. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook_3rd Edition*. United States of America : SAGE Publication, Inc.

Muhammad, Sahri. 2011. *Kebijakan Pembangunan Perikanan dan kelautan: Pendekatan sistem*. Malang : UB Press

Nawawi, Hadari. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif. Cetakan Ke-4*. Yogyakarta: Gajah Mada Univercity Press

Nikijuluw, Vactro P.H.,2001. *Populasi dan sosial ekonomi Masyarakat Pesisir serta strategi pemberdayaan mereka dam konteks pengelolaan sumberdaya pesisir secara terpadu*. Proyek pesisir, Pisat Kajian Sumber daya Pesisir dan lautan, Institut Pertanian Bogor (IPB). Hotel Permata, Bogor, 29 Oktober 2001

Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. ALFABETA.

Pearce II, John A. dan Richard B. Robinson, Jr., (2008), *Manajemen Strategis Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian*, Edisi 10, Buku 1,Salemba Empat, Jakarta

pupi.kkp.go.id. 2011. "Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN)" diakses pada tanggal 7 juli 2015 dari <http://www.pupi.kkp.go.id/index.php/peningkatan-kehidupan-nelayan>

Rangkuti, Freddy. 2006. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Rencan Strategis Dinas Kelautan dan Perikan Kabupaten Lombok Barat tahun 2014-2019

Rencana kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat tahun 2015

Ruslan, Rosady. 2008. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers

Salusu, J. 1996. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Non Profit*. Jakarta: Grasindo Gramedia Widia Sarana Indonesia

- Satria, Arif. 2015. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesi
- Siagian, Sondang P. 2008. *Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi, dan Strategi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Simon, A. Herbert. 2004. *Administrative Behavior, Perilaku Administrasi : Suatu Studi tentang Proses Pengambilan Keputusan dalam Organisasi Administrasi*, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat, Alih Bahasa ST. Dianjung, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sugiono. 2008. *Metode Penerilian Kiantitatif, Kulaitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suhana. 2011. *Ekonomi Politik Kebijakan Kelautan Indonesia*. Malang: Cita Intrans Selaras.
- Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Bandung; rafika ADITAMA
- Sumodiningrat, Gunawan.1997. *Pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat*. Cet 2 bina rena Pariwara, Jakarta
- Sunoto, M. (2010). *Arah Kebijakan Pengembangan Konsep Minapolitan di Indonesia*. IPB Press. Bogor.
- Supriharyono. 2000. *Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Pesisir Tropis*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Suryono, Agus. 2010. *Dimensi-dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang: UB Press
- USAID. 2006. *Satrategi Framework For Asia and Near East. Blue revolution Initiative*
- WAHYUDIN. 2011. *Kebijakan Pembangunan Ekonomi Berbasis Sumberdaya Alam dan Lingkungan*
- Wheelen, Thomas L and J David Hunger. 2012. *Strategic Management and Business Policy*. Thirteenth Edition. United State of America
- Widodo, Johanes, Suandi. 2008. *Pengelolaan Sumber daya Pengelolaan Laut*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitay Press.

_____, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2011
tentang Pedoman Umum Minapolitan

_____, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2010
tentang Penetapan Kawasan Minapolitan

_____, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 12 tahun 2010
tentang Minapolitan

